



**KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI
(PIDANA/TINDAKAN)
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

**TESIS
DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI
PERSYARATAN PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

OLEH :

**Rr. SUGIHARTI, SH
NIM. B4A 099 138
SPP PAGI**

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H**
- 2. EKO SOPONYONO, S.H, M.H**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGOREO
SEMARANG
2004**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI
(PIDANA/TINDAKAN)
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

Oleh :

**Rr. SUGIHARTI, SH
NIM. B4A 099 138
SPP PAGI**

**Tesis ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji
Pada Tanggal : 1 Juli 2004**

Pembimbing I



**Prof. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H
NIP. 130 350 519**

Pembimbing II



**EKO SOPONYONO, S.H, M.H
NIP. 130 675 155**

**Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**



Prof. Dr. BARDA NAWANI ARIEF, S.H

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulisan tesis dengan judul “Kebijakan Penerapan Sanksi (Pidana/tindakan) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana” dapat terselesaikan.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, selaku pembimbing sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, perhatian, dan sumbangan pemikiran yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Eko. Soponyono, S.H, M.H, selaku pembimbing pembantu, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan, perhatian, bimbingan dan sumbangan pemikiran dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Paulus Hadi Suprpto, S.H, M.H, yang telah banyak memberikan masukan dalam review proposal tesis.
4. Ibu Ani Purwati, SH, M.Hum dan Staf Administrasi yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam urusan Akademis.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Segenap karyawan perpustakaan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam pengumpulan data.
7. Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Kepala Poltabes Semarang yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam pengumpulan data.
8. Kawan-kawan seangkatan yang telah bekerja sama sebaik-baiknya dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum.

Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini, akan penulis terima dengan tulus dan rendah hati.

Teriring doa semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis, akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

Harapan penulis, semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana.

Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Kerangka Teoritik	14
D. Tujuan Penelitian	32
E. Kontribusi Penelitian	32
F. Metodologi Penelitian	33
G. Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Anak Nakal	39
A.1. Pengertian Anak.....	39
A.2. Anak Nakal	43
A.3. Ruang Lingkup Kenakalan Anak.....	48
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Anak	52
C. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana	59

C.1. Pengertian Perlindungan Anak	59
C.2. Tujuan Perlindungan Anak	63
C.3. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Positif	65
C.3.1. Tindakan Umum	65
C.3.2. Perlindungan Anak Dalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	68
C.3.3. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	74
C.3.4. Perlindungan Anak pelaku Tindak Pidana Dalam UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	75
C.4. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Internasional	76
C.4.1. Sekilas Tentang Perlindungan Anak Dalam Hukum Internasional	76
C.4.2. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam SMR-JJ (Beijing Rules)	78
C.4.3. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam <i>Convention The Right Of Child</i> (Konfensi Hak Anak 1989) Resolusi MU PBB 44/25	88
C.4.4. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam	

<i>United Nations Guidelines For The Prevention</i>	
<i>Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) ...</i>	90
C.4.5. Perlindungan Anak pelaku Tindak Pidana Dalam	
<i>United Nation Rules The Protection Of Juvenile</i>	
<i>Deprived Their Liberty.....</i>	92
D. Kebijakan Pidana dan Pemidanaan Anak Pelaku Tindak	
Pidana	96
D.1. Pengertian Kebijakan Pidana	96
D.2. Teori – Teori Pemidanaan	100
D.3. Tujuan Pemidanaan	118
D.4. Pedoman Pemidanaan	125
E. Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana	140
E.1. Dasar Pemikiran Pemidanaan Anak Pelaku Tindak	
Pidana	140
E.2. Penerapan Sanksi (Pidana/Tindakan) Terhadap Anak	
Pelaku Tindak Pidana	146
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	156
A. Kebijakan Penerapan Sanksi (Pidana/Tindakan) Terhadap	
Anak Pelaku Tindak Pidana	156
A.1. Proses Penerapan Sanksi (Pidana/Tindakan) Terhadap	
Anak Pelaku Tindak Pidana (Penyidikan, Penangkapan,	
Penahanan, Penuntutan, Pemeriksaan Dalam	
Sidang Anak).	156

A.1.1.	Penyidikan	157
A.1.2.	Penangkapan	160
A.1.3.	Penahanan	167
A.1.4.	Penuntutan	176
A.1.5.	Pemeriksaan Dalam Sidang Anak	184
A.2.	Peraturan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perundang- Undangan Yang Terkait Dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana (UU No.3/1997, UU No.23/2002, UU No.4/1979)	238
A.2.1.	Perlindungan Anak Dalam UU No.3/1997 Tentang Pengadilan Anak	238
A.2.2.	Perlindungan Anak Dalam UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak	285
A.2.3.	Perlindungan Anak Dalam UU No.4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak	289
B.	Kebijakan Sanksi (Pidana/Tindakan) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dimasa Mendatang	290
B.1.	Keterkaitan Sanksi (Pidana/Tindakan) Dalam UU No.3/1997, Konsep KUHP Tahun 2000 dan Dokumen Internasional	290
B.1.1.	Ditinjau Dari Aspek Batasan Umur Pertanggung Jawaban Pidana	291

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial, secara utuh selaras dan seimbang. Hal yang menarik perhatian masyarakat, akhir-akhir ini semakin meningkatnya kualitas maupun kuantitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam menanggapi tindak pidana anak diatur secara khusus dalam UU No.3/1997 yang memberikan perlindungan anak dalam proses peradilan, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum acaranya. Undang-undang ini ditunjang dengan Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran.

Atas dasar hal tersebut diatas, sangat relevan untuk dilakukan pengkajian, tentang "Kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana". Masalah pokok dalam penelitian ini, Pertama apakah kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) telah mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana. Kedua bagaimana kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) dimasa mendatang yang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Metode penelitian studi ini adalah a) dengan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris b) Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, sedang data primer lebih bersifat menunjang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penganalisaan data dengan metode normatif kualitatif dengan melakukan analisa diskriptif dan perskriptif.

Analisa terhadap hasil penelitian terungkap bahwa: Penerapan sanksi (pidana/tindakan) belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat adanya pelanggaran penerapan UU No3/1997 yaitu: 1) Belum ada rumah tahanan khusus untuk anak; 2) Tahanan anak tidak dipisahkan dengan tahanan dewasa; 3.) Anak yang berkonflik dengan hukum tidak diberikan bantuan hukum; 4) Penjatuhan pidana semata-mata menitik beratkan faktor yuridis formal. 5) Pidana penjara masih menjadi pilihan utama penjatuhan sanksi. Kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) dimasa mendatang yang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana, perlunya pembaharuan hukum, dengan penambahan/penyempurnaan UU No.3/1997, yang berkaitan dengan batasan usia pertanggungjawaban pidana, pedoman pemidanaan, dan jenis sanksi (pidana/tindakan) dengan tetap mengacu pada Konsep KUHP Tahun 2000, yang aturan sanksinya lebih lengkap, jelas, dan rinci, serta mempertimbangkan dokumen Internasional dan KUHP negara asing yang berkaitan dengan sanksi pidana anak.

Kata Kunci; Kebijakan, Pidana Anak, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Youth is part of young generation, as one of potential human resource which continue national aspiration struggle in the future, youth which its strategic position needs treatment and protection in order to guarantee physical, emotional, and social growth, in complete, harmonious and well balanced. The things that attract society attention are either quality or quantity of criminal act which done by juvenile rises lately. In handling criminal act which done by juvenile peculiarly arranged in institution number 3/1997 about juvenile justice, which give juvenile protection in justice process. This institution supported with institution number 23/2002 about juvenile protection. However in reality there are some deviances.

Based on mentioned above, it's very relevant to examine its implementation "Policy of Applying Sanction (punishment/measures) to Juvenile Offender". The main problems in this thesis are, first policy of applying sanction (punishment/measures) which expressing protection to juvenile offender. Second policy of applying sanction (punishment/measures) which expressing protection to juvenile offender in the future.

This research is applying juridic as normative approach which support juridic empiric approach. The data in this research are primary data and secondary data. This research accentuate on secondary data, whereas primary data more as supporter. Source of data in this research are primary data and secondary data. Analysing data is normative qualitative method done by doing descriptive and perscriptive analysis.

The finding of this research show that applying sanction (punishment/measures) not yet fully expressing protection of juvenile offender. There are some incation of deviances in applying institution number 3/1997, there are: 1) District Court of Semarang do not has special prison for juvenile; 2) juvenile prisoner do not separated from adult prisoner; 3) juvenile who had conflict with law do not defend by lawyer; 4) Applying sanction exclusively accentuate on juridic formal aspect; 5) sentence to imprisonment still become first choise in applying sanction. Policy of applying sanction (punishment/measures) in the future which expressing juvenile protection to juvenile offender, need to reform the law by adding/completing institution Number 3/1997, which interlaced with age limitation in criminal responsibility, guidelines of sentence, and variety of sanction (punishment/measures) by keep uphold penal code concept year 2000, which have rule of santion more complete, clear, and detail, also to consider international documents and foreign penal code which interlaced with juvenile justice.

Key word : policy, juvenile punishment, juvenile protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bahan-bahan penyusunan GBHN Tahun 1983, terutama yang berkaitan dengan Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Peningkatan Usaha Kesejahteraan Anak terutama yang berhubungan dengan Masalah Perlindungan anak antara lain dinyatakan:

Anak Indonesia merupakan generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental sosial Indonesia.

Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹

Demikian pula dalam Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak butir a disebutkan bahwa: Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras seimbang.²

¹ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal 123

² Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 127

Dari beberapa pernyataan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda, merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, memerlukan perlindungan dari berbagai bahaya yang mengganggu perkembangan anak.

Menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu, pembangunan nasional yang merupakan modernisasi, membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana, delinkuensi/ kenakalan anak atau meningkatnya deviasi serta meningkatnya anak-anak terlantar.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku usia muda, atau meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya, khusus di bidang Hukum Pidana (Anak), beserta Hukum Acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya.³

Kondisi anak yang merupakan bagian dari generasi muda, saat ini menurut Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2000 dalam Bab II tentang Kondisi Umum antara lain dinyatakan bahwa:

³ Agung Wahyono, Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal

Penurunan peranan dan kualitas diri terjadi juga dikalangan generasi muda. Kreativitas kemauan dan kemampuan mengembangkan pemikiran dan melakukan kegiatan eksploratif, melakukan aksi sosial untuk berani coba-ralat pada generasi muda mengalami hambatan, sehingga pada akhirnya menghambat proses kaderisasi bangsa.

Hal yang perlu mendapat perhatian, masalah remaja sudah sejak lama dibicarakan di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai gambaran: Laporan "*United Nations Congress on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" di London pada tahun 1960 menyatakan adanya kenaikan jumlah *Juvenile Delinquency* (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan dan peningkatan keragaman serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok daripada tindak kejahatan individual.⁴

Dipandang dari sudut formil, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dikenakan pidana. Ditinjau lebih dalam lagi sampai pada intinya bertentangan dengan kesusilaan.

Di Indonesia, sebagai gambaran merebaknya pelanggaran hukum yang dilakukan anak, termasuk anak sekolah dan remaja di kota-kota besar misalnya di Jakarta berupa perkelahian antar pelajar, penodongan, perampokan, perampasan, pemilikan senjata tajam.

Dalam Harian Kompas 19 Juni 2000 diungkapkan antara lain: Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) mulai diguncang oleh kejahatan remaja dan pelajar yang eskalasinya makin tinggi. Hari Sabtu setidaknya terjadi 3 tindak

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kanakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992 hal. 3

kekerasan dikalangan remaja, di beberapa tempat terpisah. Di Jakarta Timur aparat Keamanan Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur menangkap 43 pelajar SMU karena diduga membawa senjata tajam dan merampas barang – barang penumpang di dalam Bus Mayasari Bakti Jurusan Kampung Rambutan-Kota. Di jalan Kota Bumi Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat, tiga remaja merampas satu sepeda motor milik Firmansyah Arifin. Di Kampung Juragan Jakarta Selatan dua remaja bernama Rediansyah (15) dan Wadi (16) menodong dan meminta uang Haria Puspita (15) secara paksa dengan pisau dan rantai besi.⁵

Dalam Harian Kompas 2 Juni 2000 diungkapkan antara lain: Di hari terakhir penyelenggaraan evaluasi belajar tahap akhir Nasional sejumlah pelajar di Jakarta terlibat perkelahian masal di sejumlah tempat. Salah seorang pelajar bernama Umar Husni, tewas dengan luka tusuk dipunggungnya dalam perkelahian di jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan.⁶

Dalam Harian Kompas 14 Februari 2000 antara lain dimuat: Sebanyak 27 pelajar dari beberapa sekolah Tangerang diamankan petugas Kepolisian Resort Tangerang dalam Operasi Kilat Jaya. Dari tangan mereka, polisi menyita berbagai senjata tajam, antara lain celurit, pedang, golok, pisau serta beberapa senjata dari benda keras seperti ikat pinggang berkepala gir.⁷

Dalam Harian Kompas 21 Februari 2000 antara lain diungkapkan: 20

⁵ Fer/Rst, Aksi Kejahatan Oleh Remaja Meningkat, Pelajar Rampas Sepeda Motor dan Barang Penumpang Bus, Harian Kompas, 19 Juni 2000.

⁶ Msh, Selesai Ebtanas Siswa SLTP Tewas Dalam Tawuran, Harian Kompas 2 Juni 2000.

⁷ Mul, 27 Pelajar Bawa Senjata Diamankan, Harian Kompas 14 Februari 2000.

orang berseragam sekolah menodong sejumlah penumpang Bis PPD Patas 11 Jurusan Kampung Rambutan—Kota.⁸

Dalam Harian Kompas 29 Mei 2000 antara lain diungkapkan: Puluhan pelajar berpakaian seragam sekolah menghadang dan menghentikan kereta rel listrik (KRL) tujuan Bekasi dan kemudian merampok sejumlah penumpangnya. Dalam aksinya, para pelajar juga melukai tiga penumpang. Semuanya dibawa ke rumah sakit Bekasi.⁹

Dari beberapa kasus pelanggaran hukum yang dipaparkan di atas yang umumnya terjadi di Jakarta (kemungkinan kasus-kasus tersebut terjadi juga di kota-kota besar lainnya), memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, anak remaja yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berbicara masalah sanksi pidana atau pemidanaan dilihat dari mekanisme penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu:

- (1) tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- (2) tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
- (3) tahap kebijakan eksekusi/administratif. Berdasarkan uraian diatas dapat

⁸ Msh, Kawan Pelajar Menodong Penumpang Bus, Harian Kompas 21 Februari 2000.

⁹ Msh, Puluhan Pelajar Merampok Penumpang KRL, Harian Kompas 29 Mei 2000.

dikatakan bahwa dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung tiga kekuasaan/kewenangan.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, kalau pada tahap legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pengertian pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, akan tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas. Dalam arti sempit/formal berarti penjatuhan/ pengenaan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang. Dilihat dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Dengan demikian dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas, maka penerapan kebijakan/kewenangan penjatuhan pidana melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan;
- b. Penerapan kebijakan/kewenangan penuntutan;
- c. Penerapan kebijakan/kewenangan pemidanaan;
- d. Penerapan kebijakan/kewenangan pelaksanaan/eksekusi pidana.¹¹

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan tersebut di atas, dalam

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 hal 30.

¹¹ Ibid, hal 30-31.

penelitian ini lebih dititik beratkan pada kebijakan/kewenangan pemidanaan.

Kembali kepada masalah pemidanaan, dalam hal pelaku tindak pidananya anak, maka dalam keadaan apapun anak harus mendapat perlindungan dalam rangka kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak harus pula terjadi dalam proses pidana.

Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti karena di samping merupakan masalah universal, juga karena dunia tidak pernah sepi dari anak-anak dan selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan mengenai masalah anak ini, menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya para orang tua.¹²

Masalah anak di Indonesia kurang mendapat perhatian padahal perhatian dunia Internasional nampaknya tidak pernah sepi membicarakan masalah ini. Perhatian dunia Internasional mengenai perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jeneva tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang diakui oleh *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Right of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak) yang terdiri dari 10 prinsip.

Masalah anak terus dibicarakan dalam kongres PBB mengenai *The*

¹² Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 107

Prevention of Crime and The Treatment of Offenders Pada kongres ke I di Geneva tahun 1955 dibicarakan topik *Prevention of juvenile Delinquency*, pada kongres ke II tahun 1960 di London dibicarakan masalah *New Forms Juvenile Delinquency dan Special Police Services of the Prevention of Juvenile Delinquency* dan masalah *Juvenile Delinquency* ini masih juga dibicarakan pada kongres ke III di Stockholm. Dalam perkembangannya pusat perhatian diarahkan pada masalah *Juvenile Justice* (Peradilan Anak). Masalah perlunya perlindungan khusus bagi anak yang dijamin oleh hukum, berkaitan dengan prinsip kedua dari *Declaration of the Rights of the Child*.

Perhatian masyarakat bangsa-bangsa terhadap masalah *Juvenile Justice* kemudian dibicarakan dalam Kongres PBB Ke VI di Caracas Venezuela pada tahun 1980 dengan topik *Juvenile Delinquency Before and After the Onset Delinquency*. Kongres ini menghasilkan suatu resolusi mengenai *Development of Minimum Standards of Juvenile Justice*.

Resolusi ini meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk menyelenggarakan peradilan anak dalam rangka melindungi hak-hak asasi dari *juvenile* yang terlibat dalam persoalan hukum.

Resolusi ini merekomendasikan agar Komite PBB mengenai Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan (*The Committee Crime Prevention and Control*) mengembangkan *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (disingkat SMR – JJ). Komite PBB ini kemudian menyusun sebuah draf rules yang kemudian dibicarakan dalam pertemuan persiapan antar-regional di Beijing pada 14–18 Mei 1984, untuk bahan kongres PBB ke VII di Milan

1985. Kongres ke VII di Milan menyetujui (*United Nations for the Administration of Juvenile Justice* (dikenal dengan istilah *Beijing Rules*) dan selanjutnya diterima dan dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 29 Nopember 1985 dalam resolusinya No 40/33.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa justru dunia Internasional memusatkan perhatiannya pada masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan.¹³

Dalam rangka perlindungan hukum pidana terhadap anak, pada tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat Pemerintah RI menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (Resolusi MU PBB 44/25). Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 dikeluarkan Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang pengesahan "*Convention the rights of the child*". Dengan demikian upaya melakukan perlindungan anak melalui hukum pidana sewajarnya memperhatikan prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut khususnya yang dinyatakan dalam Artikel 37 dan 40.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, sewajarnya kita berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana.¹⁵

Sebagai pengimplementasian secara optimal prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang No.3/1997

¹³ Ibid, hal. 108-110.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Op. Cit hal. 158.

¹⁵ Ramli Atmasasmita, Team Penyunting, Peradilan Anak Di Indonesia. CV. Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 109

sebagai aturan yang khusus diperuntukkan terhadap anak yang dinyatakan melanggar hukum pidana. Hal ini tercantum dalam Konsideran b Undang-Undang No.3/1997 yang dinyatakan bahwa: untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹⁶

Kekhususan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pelaksanaan sanksi, hakim mempunyai kekhususan dalam rangka melindungi anak

Peranan peradilan anak tidak lain merupakan bagian integral dari keadilan sosial Anak.¹⁷

Sebagai gambaran pelaksanaan peradilan anak di Indonesia, contoh kasus yang dimuat dalam Harian Suara Merdeka 2 Agustus 1997 antara lain: Kasus di Palembang bulan Juli 1997 mengisahkan Tintus (13) dan Ramdani (14) menjadi bulan-bulanan oknum polisi yang hanya karena mencuri sandal seharga Rp.40.000 milik tetangganya. Penyelesaian damai telah diupayakan, namun petugas ngotot menahan mereka dan untuk membebaskannya diminta sejumlah uang dan sertifikat tanah. Karena orang tuanya menolak menyerahkan uang yang jumlahnya cukup besar, maka Tintus dan Ramdani ditahan. Yang menyedihkan, anak itu telah diperlakukan secara sewenang-wenang. Perlakuan

¹⁶ Darwan Print, Op.Cit, hal, 127

¹⁷ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 109.

seperti itu menimbulkan trauma dalam diri Tintus dan Ramdani, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan keduanya menjadi pendiam dan senang mengurung diri.¹⁸

Dalam Harian Kompas 2 Maret 2000 diungkapkan antara lain: Belum adanya undang-undang Perlindungan anak menyebabkan berbagai undang-undang yang bertujuan melindungi anak menjadi tidak jalan. Benar bahwa UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak telah ada, tetapi karena belum ada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka anak-anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlindungi. Mereka mengalami abuse baik dari kondisi fisik maupun tempat penahanan maupun perlakuan petugas.¹⁹

Dalam Harian Kompas 7 Agustus 2001, yang memuat pendapat Dr. Seto Muljadi selaku Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, dalam Semiloka Konvensi Hak Anak di Jayapura diungkapkan antara lain: Di Indonesia anak-anak dalam usia masih sangat muda sudah harus menanggung beban begitu berat baik fisik maupun mental. Ini sangat menghambat proses tumbuh kembang anak secara optimal. Di antara mereka adalah anak-anak yang saat ini kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua, atau bahkan hidup tanpa keluarga sama sekali. Mereka itu hidup di jalanan, tidur di emperan toko atau di stasiun kereta api secara menggelandang dengan mengais rejeki melalui aktivitas kehidupan di sekitarnya. Kekerasan hidup yang harus mereka jalani, kadang-kadang terpaksa menyeret mereka untuk melakukan

¹⁸ Wiwiek W. Ragil, Ketika Anak-Anak Berlaku Kriminal, Harian Suara Merdeka, 2 Agustus 1997.

¹⁹ Purniati, Perlindungan Anak Harus Direalisasikan dengan Undang-Undang, Harian Kompas, 2 Maret 2000

berbagai tindak kriminal, sehingga pada usia yang amat dini, mereka sudah berurusan dengan aparat penegak hukum. Tak jarang mereka harus meringkuk di bui tanpa perlindungan yang wajar, kemudian mendapat perlakuan setingkat dengan narapidana dewasa.²⁰

Dalam Harian Kompas 2 Agustus 1999 antara lain diungkapkan: Di Medan narapidana Anak Legiman (17) mengatakan lima kali didatangi jaksa penuntut umum Romel Tarigan, sebelum di vonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo, ia ditemui jaksa di ruang tahanan pengadilan sebelum sidang dimulai. "Jaksa menanyakan siapa orang tua saya, dan dimana alamatnya. Setelah itu dia mengatakan hukumanmu nanti kita buat ringan" kata Legiman menirukan ucapan jaksa Romel Tarigan ketika ditemui ditemui Kompas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjunggusta, Medan, Sabtu 31/7. Ketika diwawancarai, Legiman didampingi pengacaranya dari Lembaga Advokasi Anak Indonesia Darwan Paranginangin dan Mahadi.

Legiman dihukum seumur hidup oleh PN Kabanjahe, 19 Agustus 1998. Ia dipersalahkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Mayora Sinuraja majikannya sendiri, dengan cara memotong-motong tubuh korban menjadi enam potong lalu menghanyutkan ke sungai. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Dahlia Brahmana menyatakan perbuatan terdakwa keji dan tak manusiawi. Sehingga wajar bila hakim menghukumnya seumur hidup.

Menurut Legiman, dia tidak mengetahui apa maksud dan tujuan jaksa

²⁰ Fan/Har, Sepatutnya Anak-Anak Dapat Remisi Khusus, Harian Kompas 7 Agustus 2001

menanyakan alamat orang tua dan keluarganya. Setiap kali ditanya, saya mengatakan ayah saya Siwal sudah meninggal. Sedang ibu saya Rukinah ikut dengan abang di Tebing tinggi (Sumatera Utara). Ditegaskan Legiman, sejak ditahan polisi dia tak pernah didampingi pengacara. Bahkan selama berlangsungnya persidangan Legiman mengatakan, hanya sekali didampingi pengacaranya, yaitu saat pembacaan penuntutan. "Saya nggak mengerti hukum, jadi saya hanya pasrah saja dihukum seumur hidup. Padahal jika waktu itu ada pembela mungkin bisa banding atau kasasi."²¹

Dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana walaupun telah ada undang-undang No.3 /1997 kondisinya masih memprihatinkan, khususnya kebijakan menjatuhkan sanksi pidana, masih terjadi tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang tentunya sangat merugikan bagi anak.

Bertolak hal tersebut diatas, sangat relevan untuk dilakukan pengkajian melalui penelitian. Dalam penelitian tesis ini akan dilakukan kajian dari aspek penerapan/pengenaan/penjatuhan pidana yang menitik beratkan pada kebijakan yudikatif/aplikatif guna menunjang perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai

²¹ Legiman Lima Kali di datangi Jaksa, Harian Kompas 2 Agustus 1999

berikut:

1. Apakah kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) telah mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.
2. Bagaimana kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) dimasa mendatang, yang mencerminkan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana

C. KERANGKA TEORITIK

Menurut hukum yang berlaku terdapat pluralistis kriteria tentang anak, hal ini disebabkan tiap-tiap peraturan mengatur sendiri kriteria tentang anak. Berikut ini dipaparkan beberapa kriteria tentang anak:

1. Undang – Undang Pengadilan Anak, (Undang-Undang No.3 Tahun 1997), dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang RI. No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 2 menyatakan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²²
3. Undang-Undang R. I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. The Beijing Rules. Rule 2.2 *Definition of Juvenile range from 7 years to 18*

*years above.*²³ (definisi remaja terentang dari umur 7 tahun sampai 18 tahun).

Dari beberapa rumusan tentang pengertian anak, nampaknya belum ada kesamaan batasan tentang anak. Namun yang berkaitan dengan tindak pidana anak ada kekhususan yaitu untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan, minimal anak berumur 8 tahun sampai dengan umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Anak Nakal (*juvenile Delinquency*) secara etimologi berarti kejahatan anak

Dalam UU No. 3/1997 yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain, yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁴

Masalah anak melakukan tindak pidana mudah dipahami, yaitu melanggar ketentuan dalam hukum pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar diluar KUHP seperti tindak pidana ekonomi dan lain-lainnya. Akan tetapi masalahnya, dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut perundang-undangan maupun aturan hukum yang hidup dalam masyarakat luas, pengertiannya jauh lebih luas

²² Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Edisi kelima, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal 151

²³ Comentary Beijing Rules 2.2 form 1410, 18 May 1984: hal. 142.

²⁴ Darwan Prinst, Op. Cit hal 132

karena selain norma hukum, juga norma kebiasaan/adat, norma agama, dan kebudayaan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.²⁵

Dalam Konsep KUHP Baru tahun 1999/2000 tindak pidana diatur dalam pasal 15 yang rumusannya sama dengan pasal 14 Konsep tahun 1993

Konsep berpendirian bahwa tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formil ataupun materiil (Konsep KUHP edisi tahun 2000). Disebutkan dalam Pasal 15, tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana²⁶.

Menurut Bagir Manan dikatakan, bahwa dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang, anak sekali-kali tidak boleh dilupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus, walaupun pada dasarnya dan dalam batas wajar telah menentukan sendiri tingkah laku perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya.²⁷

Selanjutnya dikatakan, hubungan orang tua dengan anak merupakan hubungan yang hakiki termasuk hubungan mental maupun spiritual. Mengingat

²⁵ Ibid, hal 36

²⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hal 92.

²⁷ Bagir Manan, dalam Peradilan Anak di Indonesia Penyunting Romli Atmasasmita, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 6.

hakikat hubungan tersebut dalam kehidupan manusia, maka dalam menangani masalah anak-anak, harus senantiasa diusahakan agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya. Kalaupun terpaksa dipisahkan, tetaplah dipertimbangkan pemisahan itu semata-mata demi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar.²⁸

Dikatakan pula bahwa peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan memutuskan perkara yang menyangkut kepentingan anak, menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak.²⁹

Dalam membicarakan pembedaan, dikemukakan pendekatan kebijakan, ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:

- (1) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- (2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
- (3) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- (4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan

²⁸ Ibid,

²⁹ Ibid,

sosial.

Selanjutnya ditegaskan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan ini. Pidana hanya dipergunakan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat.³⁰

Selain pendekatan yang berorientasi pada nilai dalam penggunaan sanksi pidana ada pendekatan yang dikenal dengan pendekatan “humanistik” yang berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat³¹.

Sehubungan dengan hal terakhir ini, patut dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence* menurut Marc Ancel, yang bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi.

Hal ini perlu dikemukakan karena istilah “perlindungan masyarakat” atau “*social defence*” yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi, resosialisasi sering digunakan di Indonesia. Marc Ancel melihat kejahatan sebagai gejala kemanusiaan, yaitu kejahatan merupakan manifestasi dari kepribadian si pelaku. Pertanggungjawaban pribadi menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu, oleh karena itu mencoba untuk

³⁰ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 39-40

³¹ Ibid, hal 41-42

merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian yang demikian, merupakan konsekwensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai manifestasi dari kepribadian si pelaku³². Adapun tujuan dari kebijakan menetapkan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik dalam arti keseluruhannya yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan” Tujuan demikian itu nampaknya disepakati oleh seluruh anggota UNAFEI (*United Nations Asia and Far East Institute*) dan Indonesia termasuk anggota.

Salah satu kesimpulan Seminar Kriminologi ke 3 tahun 1976 dirumuskan sebagai berikut: hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu “*Social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk kesejahteraan masyarakat, maka tahap penetapan pidana menurut Barda Nawawi Arief justru harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan, tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pembedaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum³³.

³² Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori -Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1998, hal 168-169.

³³ Ibid, hal 92

Selama ini tujuan pidana belum pernah dirumuskan. Perumusan tujuan pidana baru nampak dalam konsep KUHP nasional (1972). Buku I yang merumuskan dalam Pasal 2 ayat 1. Kemudian ada perubahan perumusannya dalam Pasal 50 konsep KUHP tahun 1999-2000 tujuan pemidanaan yaitu:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berkaitan dengan rumusan diatas, Sudarto berpendapat bahwa pemberian pidana memperlihatkan pengaruh dari aliran *social defence* suatu aliran yang merupakan pertumbuhan lanjut dari aliran modern. Aliran modern menitik beratkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat.³⁴

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, Sahetapy mengatakan bahwa tujuan pemidanaan berorientasi pada filosofis Pancasila, pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan mengandung makna menghendaki agar pelaku bukan saja dibebaskan dari alam pikiran jahat yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.³⁵

³⁴ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief Op. Cit, hal 96

³⁵ Ibid hal 97

Tujuan pemidanaan yang berlatar belakang filsafat pembinaan yang berorientasi pada orang, berpengaruh dalam menetapkan sanksi pidana. Kebijakan menetapkan sanksi pidana pada umumnya meliputi masalah-masalah menetapkan jenis, jumlah dan berat ringannya pidana.

Kebijakan menetapkan jenis sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan memilih berbagai alternatif. Masalah pemilihan alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling patut, paling berhasil atau efektif.³⁶

Penetapan jenis pidana oleh undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Disamping itu dimaksudkan pula untuk membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan³⁷

Dalam Undang-Undang Pengaduan Anak, tujuan pidana tidak dirumuskan secara rinci. Oleh karena itu walaupun anak mempunyai sifat khusus, tujuan pidana tersebut diatas dapat mempedomani dalam penerapan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana, yang bertujuan kesejahteraan anak.

Berbicara masalah pemidanaan, berikut ini dikemukakan teori-teori pemidanaan. Secara tradisional teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid hal 98-99

dalam dua kelompok teori:

1. Teori absolut atau teori pembalasan, (*retributive/vergeldings theorieen*)
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
2. Teori Relatif. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenais teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Menurut *Negel Walker* teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat oleh karena itu teori inipun sering disebut teori tujuan.³⁸

Sedang menurut Andi Hamzah ada tiga golongan utama untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Teori ini

³⁸ Ibid, hal. 10-16.

○

disebut absolut, pidana merupakan tuntutan mutlak;

2. Teori relatif, teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan;
3. Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula, ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar ada unsur pembalasan dan prevensi seimbang.³⁹

Berbicara masalah teori pemidanaan yang memberikan dasar pembenaran dijatuhkannya pidana, kiranya dasar ini perlu juga dianut dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Membahas masalah pemidanaan tidak dapat dipisahkan dengan sistem pemidanaan. Menurut *LHC. Husman* sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan⁴⁰

Sub sistem pemidanaan dalam konsep KUHP Baru meliputi:

1. jumlah atau lamanya ancaman pidana;
2. peringan dan pemberatan pidana;
3. sistem perumusan dan penerapan pidana.

Ad 1. Sistem penetapan jumlah ancaman pidana menurut konsep ada dua alternatif sistem;

- a. Sistem atau pendekatan absolut ialah: Untuk setiap tindak pidana

³⁹ Ibid, hal. 24-31.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 129

ditetapkan bobot/kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan pidana maksimum (dapat juga minimumnya), untuk setiap tindak pidana;

- b. Sistem atau pendekatan relatif yang dimaksud ialah; Untuk tiap tindak pidana ditetapkan bobot kualitas/maksimum pidananya sendiri-sendiri tetapi bobotnya di "relatif" kan yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu⁴¹

Ad 2. Masalah peringanan pidana dan pemberatan pidana.

Mengenai hal-hal yang memperingan pidana didalam konsep KUHP Tahun. 1999-2000 diatur dalam Pasal 51 ayat 2. Sedang mengenai lamanya peringanan diatur dalam Pasal 54. Dari ketentuan diatas terlihat bahwa sistem pemidanaan untuk peringanan pidana menurut konsep tidak berbeda dengan KUHP yang saat ini berlaku yaitu dikurangi sepertiganya.

Mengenai pemberatan pidana, hal-hal yang memberatkan pidana diatur dalam Pasal 54 Konsep.⁴²

Ad 3. Sistem perumusan dan penerapan pidana

Sistem pemidanaan yang bertolak dari faham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-

⁴¹ Ibid, hal. 130-131.

⁴² Ibid, hal 142-145

aparatus lainnya, tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofi, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah⁴³

Selanjutnya tentang pedoman penerapan sistem perumusan ancaman pidana, konsep akan menggunakan sistem tunggal dan sistem alternatif dalam merumuskan ancaman pidana untuk suatu tindak pidana. Hanya dalam hal-hal tertentu sebagai pengecualian akan digunakan sistem kumulatif-alternatif. Untuk penerapan ancaman pidana yang dirumuskan secara tunggal diatur dalam Konsep Pasal 49; Penerapan pidana denda tunggal diatur dalam Pasal 50 Konsep; Pedoman penerapan pidana alternatif diatur dalam Pasal 51 Konsep.⁴⁴

Berkaitan dengan masalah kebijakan sanksi pidana anak, berikut ini diuraikan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana, karena masalah ini mempunyai arti yang sangat penting bagi pengenaan pidana terhadap anak, namun sebelumnya dikemukakan dahulu bentuk perlindungan anak dalam Konvensi Internasional dan Hukum nasional.

Perlindungan anak dalam konvensi Internasional diatur dalam artikel 37 dan 40 Konvensi Hak-Hak Anak.

Artikel 37 memuat prinsip sebagai berikut:

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabatnya

⁴³ Ibid, hal 153

⁴⁴ Ibid, hal 155-161.

2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia 18 tahun;
3. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
4. Penangkapan-penahanan dan pidana penjara hanya digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek.
5. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dimuka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan dirinya itu.

Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
 - a. Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
 - b. yang memperkuat/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan lain;
 - c. Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan mengembangkan pengintegrasian kembali serta pengembangan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
2. Tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut, atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan dilakukan.
3. Tiap anak yang dituduh atau dituntut melanggar hukum pidana sekurang-kurangnya memperoleh jaminan hak-hak:
 - a. Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;
 - b. Untuk diberitahukan tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali, atau kuasa hukumnya;
 - c. Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan berwenang mandiri dan memihak
 - d. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah;
 - e. Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku;
 - f. Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak

- memperoleh bantuan penterjemah secara cuma-cuma;
- g. Kerahasiaan pribadi (*privacy*)-nya dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.
4. Negara harus berusaha membentuk hukum prosedur pejabat yang berwenang khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana khususnya menetapkan batas maksimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana.
5. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah tindakan atau melakukan perawatan, pembinaan, pengawasan program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan Institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraan dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.⁴⁵

Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional.

Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional khususnya perlindungan anak pelaku tindak pidana secara khusus diatur dalam UU No.3 Tahun 1997, yang mengatur baik hukum pidananya maupun hukum acaranya. Perlindungan ini antara lain dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak yang utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.⁴⁶

Tujuan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ditegaskan dalam SMR-JJ (*Beijing Rules*). Dalam *comentary* yang terdapat dalam Rule 5.1 menunjuk pada dua sasaran yang sangat penting

⁴⁵ Barda Nawawi Arief dalam Peradilan Anak di Indonesia, Penyunting Ramli Atmasasmita, Mandar Maju, Bandung, 1977, hal 72-74

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal 111.

- a. Memajukan kesejahteraan anak. Sasaran pertama ini merupakan faktor utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak khususnya didalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengemukakan kesejahteraan anak. Ditegaskan selanjutnya bahwa prinsip ini berarti menunjang prinsip untuk menghindari sanksi yang semata-mata bersifat menghukum;⁴⁷
- b. Prinsip Proporsionalitas. Sasaran kedua yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi pidana yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata. Apabila dasar pemikiran dan tujuan peradilan difokuskan pada kesejahteraan anak maka bertolak dari Undang Undang No.4 tahun 1979, Undang-Undang Kesejahteraan anak, proses peradilan anak harus juga dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, harus dapat memberikan hak-hak anak atas kesejahteraan berdasarkan kasih sayang untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan harus bertujuan menolong anak guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.⁴⁸

Bertolak dari pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan dan kepentingan anak, jelas memerlukan pendekatan khusus. Pendekatan khusus dalam masalah hukum dan peradilan anak antara lain:

1. Pendekatan Humanistik, anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan

⁴⁷ Ibid hal 113.

⁴⁸ Ibid, hal 114.

(*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan pengertian, dan kasih sayang.

2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat, serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.⁴⁹

Menurut Maulana Hassan Wadong, bahwa wujud perlindungan anak dalam proses peradilan yakni terpenuhinya beberapa hak sebagai berikut:

1. hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya;
2. hak untuk mendapatkan penasehat hukum;
3. hak untuk mendapatkan fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah, dan lain-lain);
4. hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang *probation, sosial worker*;
5. hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan/ penahanan/ pemeriksaan/ tanpa putusan perkara pra peradilan;
6. hak untuk menyatakan pendapat dan keberatan- keberaan terhadap kasus yang melibatkan dirinya;
7. hak untuk mendapat proses persidangan tertutup.⁵⁰

Sanksi pidana terhadap anak nakal diatur mulai dari Pasal 22 sampai Pasal 32 UU .No.3/1997.

Menurut pasal 4 (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997, batas umur anak

⁴⁹ Ibid, hal 115.

⁵⁰ Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 76.

nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal seorang anak terbukti secara sah dan meyakinkan anak dikenakan sanksi pidana/tindakan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap anak nakal menurut Pasal 23 (2) terdiri dari:

Hukuman pokok:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda atau
- d. Pidana pengawasan

Pidana Tambahan:

- a. Perampasan barang-barang tertentu atau
- b. Pembayaran ganti kerugian.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 26 (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997, paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak dapat dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana. Ancaman pidana terhadap anak pelaku tindak pidana paling lama 10 tahun.

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana:

Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati/seumur hidup dijatuhkan sanksi, akan tetap dikenakan sanksi berupa tindakan. Untuk dapat diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak, maka anak nakal minimum telah berumur 8 tahun dan

maksimum 18 tahun. Sementara anak yang belum berumur 8 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 8 tahun itu, belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Untuk menentukan apakah si anak akan dikenakan pidana atau tindakan haruslah memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga, keadaan penghuninya dan memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasjarakatan.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal (Pasal 24 Undang-Undang No.3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut:

- a. Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali/Orang Tua Asuh.
- b. Diserahkan kepada Negara.
- c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina.

Di samping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan Pasal 24 (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Teguran itu berupa

peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini agar anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Umpama: seminggu sekali, sebulan sekali, atau pada hari hari tertentu⁵¹

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji, apakah kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) menurut undang-undang telah mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengkaji bagaimanakah kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) menurut undang-undang dimasa mendatang, yang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis dalam upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, guna menunjang perlindungan anak pelaku tindak pidana

⁵¹ Darwan Prinst, Op.Cit, hal 23-28.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi:

- a. Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya para hakim Pengadilan Anak dalam melaksanakan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam proses persidangan;
- b. Memberikan bahan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya aparat yang berwenang menjatuhkan pidana agar mengoptimalkan upaya perlindungan anak, merealisasikan semaksimal mungkin hak-hak anak, baik menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku maupun Konvensi Internasional dalam mewujudkan kesejahteraan anak
- c. Memberikan motivasi dan dorongan kepada aparat dan masyarakat supaya tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi dalam penanggulangan anak yang bermasalah dalam upaya perlindungan anak dalam rangka kesejahteraan anak.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan salah satu dari kebijakan kriminal. Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan kriminal. Mengingat sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan sanksi pidana dalam penerapan sanksi pidana, maka pendekatannya terutama adalah pendekatan

juridis normatif yang ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, sedang data primer lebih bersifat menunjang.

Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di kumpulkan dari bahan:

- a. Bahan-bahan hukum primer:
 1. UUD 1945 dan Ketetapan MPR;
 2. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak;
 3. Yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara pengadilan Anak;
- b. Bahan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan primer yaitu:
 1. Rancangan peraturan Perundang-Undangan;
 2. Hasil karya ilmiah para sarjana;
 3. Hasil penelitian;

4. Hasil pertemuan ilmiah⁵²

- c. Bahan bahan sekunder yang bersifat publik seperti: statistik, majalah dan surat kabar.

Untuk data empiris digunakan data primer dari penelitian di Poltabes Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang .

3. Metode Pengumpulan Data.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatiannya pada data sekunder maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Di samping itu penelitian ini dilengkapi dengan studi lapangan di Poltabes Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara.

Menurut Maria SW Soemardjono apabila wawancara sebagai pilihan seyogyanya wawancara dilengkapi dengan panduan agar tidak ada hal hal yang terlewat dan pencatatannya dapat dilakukan dengan cepat.⁵³

Populasi dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Semarang. Namun tidak semua populasi tersebut diambil sebagai sampel, tetapi dipilih hakim yang menangani perkara pidana anak.

Penarikan sampel atau *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.⁵⁴

⁵² Ronny Hanitiyo Soemintoro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988 hal 11-12.

⁵³ Maria S.W. Soemardjono, Pedoman Penelitian Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1997 hal 35

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit. hal. 51

Menurut Maria SW. Soemardjono dalam *purposive sampling* peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.⁵⁵ Dalam hal ini dipilih hakim pengadilan anak

4. Analisa Data

Analisa data yuridis normatif dan yuridis empiris yang telah terkumpul dilakukan dengan metode normatif kualitatif dengan melakukan analisa diskriptif dan perskriptif. Analisa yuridis normative dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.⁵⁶ Asas hukum yang terdapat dalam Undang-undang Pengadilan Anak mengatur perlindungan anak baik hukum materiil maupun hukum formilnya.

Analisa kualitatif dilakukan secara diskriptif dan perskriptif, karena penelitian ini bertujuan mengungkapkan kebijakan yudikatif dalam penerapan saksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana menurut undang-undang, tetapi juga bertujuan mengungkapkan kebijakan judikatif sebagaimana diharapkan, guna menunjang perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Penganalisaan diskriptif inipun bertolak pada analisa yuridis untuk pendalamannya dilengkapi dengan analisa yuridis empiris.

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Seurjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, C V Rajamwali Jakarta, 1985, hal 70.

Analisa yuridis empiris ditetapkan focus penelitian pada domein tertentu yang sangat berguna dalam upaya mengungkapkan fenomena yang menjadi obyek penelitian.⁵⁷

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 Bab:

Setelah menguraikan Bab I, dalam Bab II (Tinjauan Pustaka) akan dipaparkan tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang anak, yang meliputi pengertian anak, anak nakal; ruang lingkup kenakalan anak, jenis-jenis tindak pidana anak. Hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan hukum pidana terhadap anak yang meliputi: pengertian dan tujuan perlindungan anak, Perlindungan hukum pidana terhadap anak dalam hukum Internasional dan Hukum Nasional, Hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sanksi pidana dan pemidanaan yang meliputi: pengertian dan ruang lingkup kebijakan pidana; teori-teori pemidanaan, tujuan dan pedoman pemidanaan, dasar pemikiran pemidanaan anak; pengenaan pidana yang menunjang perlindungan anak. Selanjutnya Hasil Penelitian dan Pembahasan akan dipaparkan dalam Bab III yang akan penulis golongkan dalam Pembahasan hasil penelitian yang menyangkut:

- A. Kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) yang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.
- B. Kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) menurut undang-undang

⁵⁷ Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikadi Cet I, Malang, 1990, hal 88.

dimasa mendatang yang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Terakhir bab IV (penutup) akan penulis simpulkan hal- hal yang telah dibahas, serta menyampaikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran kepada aparat yang berwenang dalam penerapan sanksi (pidana/tindakan) yang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana, serta bagaimana kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) dimasa mendatang menurut undang-undang, yang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ANAK NAKAL

A.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dapat ditinjau dari aspek umur dan aspek kejiwaan.

Sebagai gambaran akan diuraikan batasan tentang umur didasarkan tingkat usia dari berbagai peraturan perundang-undangan. Nampaknya tidak ada keseragaman dalam merumuskan tentang anak. Berbagai peraturan perundang-undangan berbeda-beda dalam memberikan batasan usia seseorang dikategorikan sebagai anak.

Dalam Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seorang dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian R. Soepomo tentang hukum Adat Jawa barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seorang diukur dari segi:

- a. dapat bekerja sendiri;
- b. cakap untuk melakukan apa yang dipersyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan bertanggung jawab;
- c. dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Jadi dalam Hukum Adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi berdasarkan pada ciri tertentu yang nyata¹

¹ Irma Setyaowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bina Aksara, 1990, hal 19.

Demikian pula dalam Hukum Islam batasan kedewasaan tidak berdasarkan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak pria maupun bagi anak wanita.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyebutkan: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi kedudukannya belum dewasa.

Dalam Hukum Perburuhan, menurut UU Kerja No.1 Tahun 1951 telah ditetapkan bahwa: Anak yaitu seorang yang berusia 14 tahun ke bawah, tidak boleh menjalankan pekerjaan³

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) Pasal 47 ayat (1) menyebutkan: Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Demikian pula Pasal 50 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 menyebutkan: Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan: Seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita

² Ibid.

³ Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 122.

telah mencapai usia 16 tahun. Apabila perkawinan dibubarkan, walaupun belum berumur 21 tahun mereka tidak kembali menjadi anak.

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No.4 Tahun 1979) Pasal 1 ayat (2) merumuskan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan⁴

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No.3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Maksudnya anak tidak sedang terikat perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan, dan perkawinannya putus karena perceraian maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun⁵

Dalam Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 menyebutkan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Konvensi Hak Anak yang telah disetujui MU PBB tanggal 20 Nopember 1989 Pasal 1, yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap

⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hal 137.

⁵ Darwan Prinst. Hukum Anak Indonesia, Cet ke I, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hal 2.

orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal⁶

Di Amerika serikat 29 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun ada 6 negara bagian yang menentukan batas umur 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur 6-18 tahun.

Di Negara Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia antara lain Sri Lanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-20 tahun, Taiwan menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan batas umur 15-18 tahun. Negara ASEAN antara lain: Filipina menentukan batas umur 7-16 tahun, Malaysia menentukan batas umur 7-18 tahun, Singapura menentukan batas umur 7-16 tahun.⁷

Sementara *Task Force Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas usia atas antara 16-18 tahun.

Resolusi PBB yang tertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang UU *Standrad Minimum of juvenile Rules for the Administration justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak adalah seorang yang berusia 7-18 tahun (Commentary Rule 2.2).

⁶ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*.

⁷ Sri Widoyati Wiratno Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 10-11.

Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas yaitu 18 tahun. Artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 17 tahun (Rule 119 (a))⁸

Dilihat dari kepentingan penentuan batas anak dalam kaitannya dengan tidak pidana anak yang diatur dalam UU No.3 Tahun 1997, serta batasan yang ditentukan Negara lain sesuai dengan Rule 4 Resolusi PBB 40/33 sedikit banyak dapat dipakai sebagai pedoman dalam penentuan pertanggung jawaban pidana anak pelaku tindak pidana.

Dalam bahasan ini hanya dipaparkan pengertian anak ditinjau dari aspek usia saja, sedang pengerian anak ditinjau dari aspek psikologis tidak diuraikan lebih lanjut, mengingat batas usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan kriminal.⁹

A.2. Anak Nakal

Pengertian anak nakal dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut: Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tidak pidana atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

⁸ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal 9.

⁹ Agung Wahyono, Siti Rahayu, *Op.Cit*, hal 20.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya "Patologi Sosial 2", kenakalan remaja/juvenile delinquency ialah: perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Juvenile berasal dari bahasa latin. Juvenile artinya anak-anak muda. Ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquent berasal dari kata latin "*delinquere*" yang berarti terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat-ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Delinquency itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah 22 tahun.¹⁰

Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya "Psikologi Remaja" mengutip pendapat M. Gold dan J. Petronia mendefinisikan kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

Di dalam definisi tersebut di atas faktor yang penting adalah unsur pelanggaran hukum dan kesengajaan serta kesadaran anak itu sendiri tentang konsekuensi dari pelanggaran itu.

¹⁰ Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal 7.

Sarlito berpendapat, bahwa jika penyimpangan perilaku itu terjadi terhadap norma-norma hukum pidana, barulah disebut kenakalan. Dengan demikian, kenakalan dibatasi pada tingkah laku, yang jika dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.¹¹

Ny Singgih Gunarso dan Singgih Gunarso dalam bukunya "Psikologi Remaja", antara lain mengemukakan kenakalan remaja dari aktifitas yang menunjukkan ciri-ciri pokok dari kenakalan remaja sebagai berikut:

1. Dalam pengertian kenakalan harus dilihat adanya perbuatan atau tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral.
2. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang a-sosial yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada dalam lingkungan hidupnya.
3. Kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berusia 13-17 tahun dan belum menikah.
4. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seseorang remaja atau dapat dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok remaja.¹²

Menurut Maulana Hassan Wadong dalam bukunya "Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak" antara lain dikatakan, bahwa ketentuan kejahatan anak atau delinkuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau peraturan perundang-undangan¹³

Dalam UU No.4 Tahun 1979 pengertian anak nakal tersirat dalam pasal 1 angka 8 menyebutkan: Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Cet ketiga, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 196-197.

¹² Ny. Singgih Gunarso, Singgih Gunarso, Psikologi Remaja, Gunung Mulia, Jakarta, 1985, hal 30.

Jadi menurut undang-undang ini anak nakal adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat.¹⁴

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya “Kesehatan Mental”, pendapat umum tentang kenakalan anak, adalah kelakuan dan kebiasaan tertentu yang dipandang sebagai kelakuan yang digolongkan kepada kenakalan misalnya mencuri, merampok, nenodong, membunuh, melanggar kehormatan, dan sebagainya, dan yang oleh hukum dipandang sebagai sesuatu tindak pidana yang harus dihukum, jika yang melakukan tindak pidana tersebut anak-anak yang belum dewasa dipandang sebagai kenakalan.

Jika kenakalan ditinjau dari segi agama Islam, yaitu apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Maka segala kelakuan dan tindakan dalam agama, jika dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dia akan berdosa dan di akhirat nanti dihukum. Tetapi jika tindakan itu dilakukan anak-anak yang belum baligh/belum mencapai kematangan seksuil atau lebih kurang berusia (15 tahun kebawah), maka tanggung jawab dan dosanya belum dapat dipikulkan kepada anak, kerana kelakuan-kelakuan dan perbuatan-perbuatan jahat si anak dianggap sebagai akibat dari pendidikan orang tua yang salah kepada si anak.¹⁵

Kalau kenakalan anak-anak itu ditinjau dari segi Ilmu Jiwa, dalam hal ini Ilmu Kesehatan Mental maka kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain yang dianggap

¹³ Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hal 81.

¹⁴ Agung Wahyono, Ny. Siti Rahayu, Op.Cit, hal 104.

¹⁵ Zakiah Darajat, Kesehatan Mental, CV Haji Ma Agung, Yakarta, Cetakan keenam belas, 1990, hal 112-113.

sebagai kenakalan atau sebagai perbuatan dosa, oleh ajaran agama dipandang oleh ahli jiwa sebagai manifestasi dari gangguan jiwa atau akibat tekanan batin yang tak dapat diungkapkan secara wajar.

Dengan ringkas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kenakalan anak-anak, baik dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maupun sebagai manifestasi dari rasa tidak puas, kegelisahan, ialah perbuatan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain dan kadang-kadang diri sendiri¹⁶.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan anak nakal ialah:

- a. Yang melakukan tindak pidana;
- b. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh;
- c. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa izin/sepengetahuan orang tua/wali/pengasuh;
- d. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu;
- e. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak;
- f. Yang sering mempergunakan kata-kata kotor;
- g. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak itu.

Meskipun perumusannya tidak jelas namun tentunya yang dimaksud dengan anak nakal ialah anak yang memenuhi salah satu dari ketujuh sebutan itu.¹⁷

Dari pendapat-pendapat para ahli dan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diatas, nampak terdapat unsur kesamaan pengertian tentang anak nakal. Pada dasarnya anak tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, peraturan undang-undang diluar KUHP, atau melanggar norma-norma lain dalam masyarakat, atau norma agama. Pelakunya belum dewasa dan belum pernah kawin.

¹⁶ Ibid, hal 113.

¹⁷ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hal 135-136.

A.3. Ruang Lingkup Kenakalan Anak.

Dalam membahas ruang lingkup kenakalan anak, titik tolak bahasan meliputi perilaku, perbuatan/tindakan anak yang tidak dikategorikan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut tidak dapat dihukum menurut ketentuan hukum yang berlaku (tidak melanggar pasal-pasal dalam KUHP/ peraturan – peraturan lainnya), dan perbuatan/tindakan anak yang dapat dihukum bila dilakukan oleh orang dewasa, karena dianggap sebagai kejahatan.

Berbagai pendapat para ahli tentang hal ini sebagai berikut:

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya Psikologi Remaja, mengutip pendapat Yansen, yang dimaksud kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang dan atau melanggar hukum, dibagi menjadi 4 jenis sebagai berikut:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hubungan seks sebelum menikah.
4. Kenakalan melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar misalnya membolos, mengingkari status orang tua misalnya dengan cara minggat dari rumah, membantah perintah orang tua. Perilaku mereka memang belum melanggar hukum yang sesungguhnya.¹⁸

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, mengutip pendapat (Adler, 1952), wujud perilaku delinkuen adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketenteraman milih sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan

¹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, Op.Cit, hal 200.

dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.

3. Perkelaian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu menggelandang sepanjang jalan, atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak a-susila.
5. Kriminalitas anak, remaja, adolesens, antara lain berupa perbuatan mengancam mengintimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil mabuk- mabukan, melakukan hubungan seks bebas, orgi/mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau yang mengganggu lingkungan
7. Perkosaan agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
9. Tindak kejahatan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hiperseksualitas, Geltungsrieb (dorongan menuntut hak) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain, pada remaja disertai tindak- tindak sadistis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lainnya dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan kekerasan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja,
14. Perbuatan a-sosial dan anti sosial lain yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik, dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya.
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephalitis lethargical), dan ledakan meningitis serta post-ensephalitics; juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak, ada kalanya dapat membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan control diri.

16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.¹⁹

Menurut Ny.Singgih Gunarso dan Singgih Gunarso, dalam bukunya "Psikologi Remaja" menyebutkan, bahwa kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang besar sesuai kaitannya dengan norma hukum yaitu:

1. Kenakalan yang bersifat a-moral dan a-sosial, tidak diatur dalam undang-undang sehingga sulit digolongkan pelanggaran hukum. Kasus mengenai kenakalan yang dilakukan oleh remaja, dan pengamatan murid di sekolah lanjutan maupun mereka yang putus sekolah, dapat dilihat adanya gejala:
 - a. Membohong, memutar balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang lain, atau menutupi kesalahan.
 - b. Membolos, pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
 - c. Kabur, meninggalkan rumah tanpa izin orang tua, atau menentang keinginan orang tua.
 - d. Keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan dan mudah menimbulkan perbuatan iseng yang negatif.
 - e. Memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terangsang untuk mempergunakannya. Misalnya: pisau, pistol, krakeling, pisau silet dan sebagainya.
 - f. Bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, hingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal.
 - g. Berpesta pora semalam suntuk tanpa pengawasan sehingga mudah timbul tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab/a-moral dan a-sosial.
 - h. Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak sopan, tidak senonoh, seolah-olah menggambarkan kurang perhatian dan pendidikan dari orang dewasa.
 - i. Secara berkelompok makan di rumah makan, tanpa membayar atau naik bus tanpa membeli karcis.
 - j. Turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan tujuan kesulitan ekonomis maupun tujuan lainnya.
 - k. Berpakaian tidak pantas, dan minum- minuman keras atau mengisap ganja, sehingga merusak dirinya maupun orang lain.

¹⁹ Kartini Kartono, Op.Cit, hal 21-23.

Jenis kenakalan yang biasanya ditangani langsung orang yang berkepentingan atau pihak yang bersangkutan yakni:

- a. Menyontek sebagai perwujudan ketidak jujuran dan membolos ditangani oleh pihak sekolah
- b. Kabur dari rumah dan bergaul dengan orang yang tidak disetujui oleh orang tua, akan ditanggulangi oleh orang tua sendiri.

2. Kenakalan yang dianggap melanggar hukum diselesaikan melalui hukum dan acapkali bisa disebut dengan istilah kejahatan. Misalnya:

- a. Perjudian dan segala macam bentuk perjudian yang mempergunakan uang;
- b. Pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, pencopetan, perampokan, perampasan dan penjambretan;
- c. Penggelapan barang;
- d. Penipuan dan pemalsuan;
- e. Pelanggaran tata susila, menjual gambar-gambar porno dan film porno, pemerkosaan;
- f. Pemalsuan uang dan pemalsuan surat-surat keterangan ;
- g. Tindakan-tindakan anti sosial, perbuatan yang merugikan milik orang lain;
- h. Percobaan pembunuhan;
- i. Menyebabkan kematian orang, turut tersangkut dalam pembunuhan;
- j. Pembunuhan;
- k. Pengguguran kandungan;
- l. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian seseorang.

Masih banyak lagi jenis kenakalan dalam rangka pembahasan kenakalan remaja.²⁰

Dari uraian diatas, nampaknya ada kesamaan pandangan dari para ahli psikologi mengenai ruang lingkup kenakalan anak. Pada dasarnya meliputi:

²⁰ . Singgih Gunarso Ny, Singgih Gunarso, Op.Cit, hal 31-34.

- a. Perbuatan /perilaku anak yang bertentangan dengan moral (a-moral) dan melanggar kesusilaan (a-susila) yang tidak termasuk kategori perbuatan melanggar hukum, yang berakibat dijatuhi hukuman.
- b. Perbuatan/tingkah laku yang melanggar aturan dilingkungan sekolah, dilingkungan rumah tangga dan ketertiban dilingkungan masyarakat.
- c. Perbuatan yang di kategorikan sebagai pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

B. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA ANAK

Membahas masalah jenis-jenis tindak pidana anak identik dengan pembahasan masalah tindakan/perbuatan anak yang melanggar hukum khususnya ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maupun pelanggaran perundang-undangan diluar KUHP, yang berakibat dikenakan pidana bagi pelakunya

Menurut Maulana Hassan Wadong, delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP, menyebar pada beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun pelanggaran yaitu:

1. Delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP ialah:
 - a. Delinkuensi anak dalam kejahatan yang terdiri dari:
 1. pencurian;
 2. perampokan;
 3. perkelaian;
 4. penggelapan;
 5. pembunuhan;
 6. pemerasan;
 7. pornografi;
 8. kejahatan kesusilaan;
 9. kejahatan yang mengganggu ketertiban umum;

10. perkosaan.
- b. Delinkuensi anak dalam pelanggaran yang terdiri dari:
 1. pelanggaran lalu lintas;
 2. pelanggaran narkoba/narkotika;
 3. pelanggaran minuman keras;
 4. perkelaian;
 5. prostitusi.²¹

Dari pendapat Maulana Hassan Wadong tersebut diatas, nampaknya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak mutlak, di lihat kasus perkusus. Dalam kasus yang sejenis, dapat termasuk kategori kejahatan, atau termasuk dalam kategori pelanggaran. Hal ini pernah dinyatakan pada Seminar Hukum Nasional tahun 1963 di Semarang, bahwa penggolongan dua macam delik harus ditiadakan.²²

2. Delinkuensi anak yang diatur diluar KUHP, yang menyebar pada beberapa pokok ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Delinkuensi Anak Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Narkotika.

Ketentuan delinkuensi anak dirumuskan dalam delik-delik perbuatan yang diancam dan dilarang dalam penggunaan semua jenis dan tingkatan narkoba.

Ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pidana UU No.22 Tahun 1977 sebagai berikut:

²¹ Maulana Hassan Wadong, Op.Cic, hal 84.

²² Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan kedua, diterbitkan oleh Yayasan Sudarto, d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hal 21.

1. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 78 ayat (1, 2, 3).
2. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 79 ayat (1, 2, 3)
3. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 80 ayat (1, 2, 3).
4. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 81 ayat (1, 2, 3)
5. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 82.
6. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 84.
7. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 85.

Mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 80, 81, 82, menurut pasal 83 diancam yang sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal yang tersebut

Jenis- Jenis Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Adalah:

1. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 59 ayat (1, 2).
2. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 60 ayat (2, 3, 4, 5).
3. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 61 ayat (1).
4. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 52.
5. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 63 ayat (1).
6. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 65.

Mengenai percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika, menurut Pasal 69, di pidana sama sebagaimana jika tindak pidana tersebut dilakukan. .

o

Pembagian lain tentang delinkuensi yang dikemukakan oleh Kartini Kartono sebagai berikut:

1. Delinkuensi Individual.

Tingkah laku anak (kriminal anak) merupakan gejala personal atau individual dengan ciri khas “jahat” disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopat, psikotis, neorotis, a-sosial) yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kombinasi kultural. Mereka adalah anak-anak yang melakukan tindak kriminal dan kejahatan tanpa motif dan tujuan apapun, dan hanya didorong impuls primitif yang sangat kuat. Mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan, dan sulit dicegah hati nuraninya.

2. Delinkuensi Situasional.

Delinkuensi ini dilakukan anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh menekan, memaksa pada perilaku buruk sebagai produknya anak-anak remaja tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formal. Anak muda itu menjadi jahat, delinkuensi sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa.

3. Delinkuen Sistematis.

Perbuatan kriminal anak remaja tersebut di sistematisir dalam bentuk satu organisasi yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang disistematisir itu, disertai pengaturan status formal, peranan tertentu, nilai-nilai rite-rite,

norma-norma, rasa kebangsaan, dan moral delinkuen yang berbeda dengan yang umum berlaku. Semua kejahatan anak ini kemudian dirasionalisir dan dibenarkan.

4. Delinkuen Komulatif.

Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repititif terus-menerus dan berlangsung berulang kali dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja, sehingga menjadi komulatif sifatnya. Yaitu terdapat dimana-mana, di hampir semua ibu kota, kota-kota, bahkan di daerah pinggiran/pedesaan. Secara komulatif gejala tadi menyebar luas ditengah-tengah masyarakat, lalu menjadi fenomena disorganisasi/disintegrasi sosial dengan subkultur delinkuen di tengah-tengah kebudayaan suatu bangsa.²³

Pembagian Dari Juvenile Delinquency Menurut Struktur Kepribadian oleh Kartini Kartono.

Pembagian berdasarkan ciri kepribadian ini dikemukakan oleh Kartini Kartono dengan mengutip pendapat dari (Reiss, 1951, Hweit&Jenkins, 1949), Antara lain menyebutkan, bahwa berdasarkan ciri kepribadian yang defek mendorong mereka menjadi delinkuen. Anak-anak muda ini pada umumnya bersifat agresif, tidak mampu mengenal nilai-nilai etis dan cenderung suka menceburkan diri dalam perbuatan berbahaya. Hati nurani mereka hampir tidak dapat digugah (beku).

Tipe delinkuensi menurut struktur kepribadian dibagi atas:

1. Delinkuensi terisolir

²³ Kartini Kartono, Op. Cit, hal 37-44.

2. Delinkuensi neurotik;
3. Delinkuensi psikopatik
4. Delinkuensi defek mental.

Ad 1. Delinkuensi terisolir.

Kelompok ini merupakan jumlah yang terbesar dari para remaja delinkuen, merupakan kelompok mayoritas. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologi. Delinkuensi terisolir ini mereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial mereka.

Ad 2. Delinkuensi neurotik.

Pada umumnya anak-anak delinkuen tipe ini mendapat gangguan kejiwaan yang sangat serius, antara lain berupa kecemasan, mereka selalu tidak aman, merasa terancam, tersudut, terpojok, merasa bersalah, berdosa dan lain-lain. Perilakunya memperlihatkan kualitas kompulsif (paksaan). Kualitas demikian itu tidak terdapat pada tipe delinkuen terisolir. Anak-anak dan orang muda bakar, para peledak dinamit dan bom waktu, penjahat seks, dan pecandu narkotik, dimasukkan dalam kelompok tipe neurotik. Oleh karena perubahan tingkah laku anak delinkuen neurotik berlangsung atas dasar konflik jiwani yang serius itu mendalam sekali, maka mereka akan terus melanjutkan tingkah laku kejahatannya sampai usia dewasa dan umur tua.

Ad 3. Delinkuensi psikopatik.

Delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya.

Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan ciri-ciri sebagai berikut: Tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri; Orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral; Dia selalu konflik dengan norma sosial dan hukum; Biasanya juga immoral; Tingkah laku dan relasi sosialnya selalu a-sosial, eksentrik kegila-gilaan, dan jelas tidak memiliki kesadaran sosial serta intelegensi sosial; Mereka sangat egoistis, fanatik, dan selalu menentang apa dan siapa pun juga; Sikapnya aneh, sangat kasar, kurang ajar, ganas buas terhadap siapa pun tanpa sebab sesuatu pun juga; Kata-katanya selalu menyakiti jasmani orang lain, tanpa motif apa pun juga; Karena itu remaja delinkuen psikopatik ini digolongkan ke dalam bentuk penjahat yang paling berbahaya .

Ad 4. Delinkuen Defek Mental.

Defek (defect, defektus) artinya: rusak, tidak lengkap, salah, cedara, cacat, kurang.

Delinkuansi defek moral mempunyai ciri: selalu melakukan tindakan a-sosial atau anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan dan gangguan kognitif, namun ada disfungsi pada intelegensinya.

Anak muda yang defek moralnya, itu biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki. Mereka adalah para residivis yang melakukan kejahatan karena didorong oleh naluri rendah, impuls dan kebiasaan primitif. Di antara para penjahat habitual (terbiasa) dan kaum residivis muda, lebih kurang 80% mengalami kerusakan psikis, berupa disposisi dan perkembangan mental yang salah. Jadi mereka menderita defek mental.

Jumlah pembunuh kejam yang defektif secara moral dan tidak sedikitpun mempunyai perasaan belas kasihan serta perikemanusiaan, itu dua kali lipat dari pada jumlah pembunuh biasa. Juga pembakar yang dihinggapi pyromania (nafsu patologis untuk membakar) lebih banyak yang defek moral. Di samping itu, pemerkosa anak-anak kecil dan para pemerkosa seksual yang sadis, pada umumnya juga defek moralnya.²⁴

Sehubungan dengan pembagian delinkuensi anak yang diuraikan diatas, penulis berpendapat pembagian ini penting sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi terhadap pelaku tindak pidana, yaitu pertimbangan kondisi anak pelaku tindak pidana.

C. PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA

C.1. Pengertian Perlindungan Anak.

Menurut Arief Gosita: Perlindungan Anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁵

Disisi lain, perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun

²⁴ Ibid, hal 49-56.

²⁵ Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hal 18.

manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak, tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak, akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa, perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.²⁶

Dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua rumusan tentang perlindungan anak yaitu:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamatan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, sosial anak dan remaja, sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.²⁷

Selanjutnya akan diuraikan beberapa pengertian tentang Hukum Perlindungan Anak. Beberapa sarjana memberi batasan-batasan sebagai berikut:

Menurut Arief Gosita, dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁸

²⁶ Ibid.

²⁷ Suwantji Sisworahardjo, dalam Mulyana W. Kusumah, Penyunting, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Diterbitkan oleh Yayasan LBHI bekerja sama dengan CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal 39-40.

²⁸ Arief Gosita, *Op.Cit*, hal 53.

Bismar Siregar menyebutkan aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban. Selama si anak itu masih disebut anak, selama itu pula dari dirinya tidak dituntut pertanggung jawaban. Oleh sifat itu, tepat bila dijadikan masalah bagaimana agar haknya untuk hidup dilindungi oleh hukum.²⁹

De Bie merumuskan *kinderrecht*, aspek hukum anak sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, anak/remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, serta peraturan pelaksanaannya.³⁰

JE Doek dan H.MA Drewes memberi pengertian *jengdrecht* hukum perlindungan anak muda dalam dua pengertian: yaitu pengertian luas dan pengertian sempit.

Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan mereka untuk berkembang

Dalam pengertian sempit meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam:

- Ketentuan hukum perdata;
- Ketentuan hukum pidana;
- Ketentuan hukum acara.³¹

²⁹ Bismar Siregar, Mulyana W. Kusumah, Penyunting, Hukum Dan Hak Anak, CV Rajawali, Jakarta, 1988, hal 3.

³⁰ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cetakan ke II, Bumi Aksara, Jakarta, 19, hal 15.

³¹ JE Doek, en Drewes, Jengdrech en Jeukdbescherming in Nederland, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1984, hal 11.

Dalam *Convention on the Rights of the Child*, (Konvensi Hak anak). Pasal 2 menyebutkan:

1. Negara- negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini, terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan lain, asal- usul bangsa, suku bangsa, atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
2. Negara- negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.³²

Dalam Seminar tentang Perlindungan Anak dalam rangka peringatan ulang tahun berdirinya Perhimpunan Pra Yuwana yang ke 45 dan Pra Yuwana Jakarta dan Kongresnya yang ke 4, sebagai dasar pemikiran dan pembahasan lebih lanjut dapat dipakai sebagai titik tolak pengertian mengenai perlindungan anak/remaja antara lain sebagai berikut: Perlindungan anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan asasinya.³³

³² *Convention on the Rights of the Child*, Konvensi Hak-Hak Anak, Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah dan United Nations Childrens Fund, Semarang hal 6

³³ Arief Gosita, Masalah perlindungan anak, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hal 3.

Dalam Undang-Undang RI Tahun No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2 menyebutkan: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari beberapa rumusan pengertian perlindungan anak, terkandung maksud yang sama, yaitu suatu usaha setiap orang untuk melaksanakan /menjamin agar hak anak terpenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.

C. 2. Tujuan Perlindungan Anak.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 3, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu: aspek perlindungan anak ditinjau dari segi psikologis, bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.³⁴

Candra Gautama penyunting Hanif Suranto, dalam Konvensi Hak Anak mengatakan bahwa: tujuan utama implementasi Konvensi Hak Anak adalah

³⁴ Agung Wahyono, Siti Rahayu, Op.Cit, hal 10.

untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di negara yang bersangkutan. Namun bila suatu negara mereservasi salah satu atau beberapa pasal yang ada, maka negara tersebut berhak untuk tidak terikat dengan pasal-pasal itu.³⁵

Maulana Hassan Wadong mengemukakan tentang perlindungan hak-hak asasi anak adalah: meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.³⁶

Berkaitan dengan tujuan perlindungan anak Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa: Membicarakan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri. Bertitik tolak dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak.

Tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak, tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak, yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari keadilan sosial.³⁷

Tujuan perlindungan anak juga tersimpul dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Undang-Undang Kesejahteraan Anak,

³⁵ Candra Gautama, penyunting Hanif Suranto, Konvensi Hak Anak, Panduan bagi Jurnalis, Cetakan ke 3, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2001, hal 26.

³⁶ Maulana Hassan Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 36.

³⁷ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1992, hal 111.

ditegaskan bahwa: dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.³⁸

C.3. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Positif.

C.3.1. Tinjauan Umum

Masalah dan usaha perlindungan anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia, maupun dunia Internasional. Perbicaraan mengenai anak tidak pernah berhenti, karena dunia ini selalu diisi oleh anak. Pembicaraan mengenai masalah ini, menandakan adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya para orang tua.³⁹

Di Indonesia perhatian terhadap perlindungan anak sudah lama dipikirkan. Konsep Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak sudah siap pada tahun 1967, dapat memberi landasan untuk mendekatkan pada kita kelahiran bayi yang berupa peradilan anak. Akan tetapi sebelum apa yang telah kita nantikan itu benar-benar lahir, perlu ditinjau segala sesuatunya dan dipersiapkan sarana agar kelahirannya dapat lancar. Selanjutnya yang lebih penting dari kelancaran pada waktu lahir, ialah persiapan yang matang yang diperlukan agar bayi ini bisa tumbuh menjadi orang yang memenuhi harapan dari yang melahirkan dan masyarakat pada umumnya.⁴⁰

Lebih lanjut Sudarto mengemukakan: masalah Peradilan Anak dalam keseluruhan tata hukum Indonesia, merupakan suatu sistem dalam arti bahwa:

³⁸ Ibid, hal 112.

³⁹ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit hal 107.

⁴⁰ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal 128.

berbagai peraturan ada hubungannya satu sama lain, bahwa peraturannya itu dapat disusun secara logis dan hal-hal yang khusus diperoleh aturan-aturan yang umum sehingga sampai pada azas-azasnya.⁴¹

Berkaitan dengan hal tersebut, Bagir Manan dalam Pemikiran-Pemikiran Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak mengatakan antara lain: Memperhatikan berbagai perkembangan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak dan untuk melindungi mereka dari suatu perkembangan yang tidak sehat, perhatian terhadap anak sudah lama diberikan. Hal ini terbukti, dari berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh badan-badan sosial, seperti Pra Yuwana dan Wisma Permadi Siwi. Perhatian dan rasa peduli terhadap nasib anak-anak semakin nampak bentuknya, terutama ketika Departemen Sosial bekerja sama dengan Departemen Kehakiman, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesehatan, dan Mahkamah Agung, pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 oktober 1970 menyelenggarakan Loka Karya mengenai masalah anak dan pemuda, dalam kaitannya dengan Hukum Pidana dan Acara Pidana, pendidikan sosial, kesehatan dan ketenaga kerjaan..⁴²

Tujuh tahun kemudian usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak semakin jelas, ketika pada tanggal 30 Mei sampai dengan 4 Juni 1977, Pra Yuwana menyelenggarakan seminar mengenai anak dan remaja.

⁴¹ Ibid, hal 128-128.

⁴² Bagir Manan dalam Peradilan Anak Di Indonesia, Team Penyunting Ramli Atmasasmita, Mandar Maju, Bandung, 1997 hal 7.

Seminar tersebut berhasil menyusun kesimpulan mengenai pokok-pokok tentang perlindungan anak dan remaja dan kelembagaannya.⁴³

Berbagai pertemuan ilmiah tersebut selain sebagai masukan, memacu usaha RUU tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian lahir Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sehubungan dengan berbagai masukan mengenai pentingnya Peradilan Anak yang berperilaku menyimpang atau melakukan perbuatan melanggar hukum, maka pada tahun 1979, Departemen Kehakiman memprakarsai penyusunan RUU Peradilan Anak.⁴⁴

Dalam kesempatan lain dengan masalah yang sama, pada tanggal 8-10 Agustus 1977 diadakan Loka Karya tentang Peradilan Anak oleh BPHN Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Undip, yang membicarakan tentang RUU Peradilan Anak⁴⁵

Berbicara masalah hak anak dalam hukum pidana, berkaitan erat dengan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB Nomer 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara, dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat, dan swasta), dalam menjamin perlindungan anak.⁴⁶

Sehubungan dengan Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kepres No.36 Tahun 1990, ini mengintrodusir kaidah hukum

⁴³ Ibid, hal 8.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 108.

⁴⁶ Bagir Manan, Loc.Cit, hal 8.

yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, kedalam Hukum Nasional. Dengan perkataan lain, terdapat kewajiban pemerintah Republik Indonesia mengikat negara peserta dan sekali gus sebagai sumber hukum dalam pembentukan Hukum Nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak.⁴⁷

Pemerintah Republik Indonesia menerapkan secara bertahap Konvensi Hak Anak. Kewajiban negara untuk mengadakan peradilan khusus pada anak sebagaimana diamanatkan Pasal 40 HKA, diwujudkan dalam Undang-undang Pengadilan Anak yang baru disetujui pada 19 Desember 1997. Undang-Undang ini relevan dengan sumber kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yang mengatur masalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁴⁸ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan implementasi Pasal 40 Konvensi Hak Anak kedalam hukum nasional.⁴⁹

C.3.2. Perlindungan Anak Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Esensi Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai Hukum Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana dapat dilihat dalam konsideran:

Menimbang a: bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri

⁴⁷ Muhammad Joni, Zulchaena Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 65.

⁴⁸ Ibid. hal 68.

⁴⁹ Ibid. hal 74.

dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Konsideran menimbang b: bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak, perlu dilaksanakan secara khusus.

Menurut Darwan Prinst, Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang No.3 Tahun 1997) yang mengatur hukum pidana materiil dan hukum formil mengenai perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, menganut beberapa asas/prinsip yang membedakan dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Asas-Asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 4 ayat 1). Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara Pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 tahun dan maksimum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat 2). Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang Pengadilan Anak, hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.
3. Ditangani Pejabat khusus (Pasal 1 Ayat 5, 6, 7). Undang-Undang No.3 Tahun 1997 menentukan bahwa perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti:
 - a. Ditingkat penyidikan oleh penyidik anak;
 - b. Ditingkat penuntutan oleh penuntut umum anak.
 - c. Ditingkat pengadilan disidangkan oleh hakim anak, hakim banding anak, hakim kasasi anak
4. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 11). Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan dari:
 - a. pembimbing kemasyarakatan;
 - b. pekerja sosial;
 - c. pekerja sosial suka rela.
5. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1). Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai toga.

6. Keharusan Splitsing (Pasal 7). Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di pengadilan militer.
7. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat 1). Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
8. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14, 18). Hakim yang memeriksa perkara anak, baik di tingkat Pengadilan Negeri, banding atau kasasi, dilakukan dengan hakim tunggal.
9. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai dengan pasal 49). Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHP.
10. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan pasal 32). Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 tahun.⁵⁰

Berkaitan dengan masalah perlindungan anak, Maulana Hassan Wadong mengatakan bahwa: Melihat perumusan Undang-Undang No.3 tahun 1997, di Indonesia terjadi babak pencerahan bagi hukum yang mengkhususkan ketentuan dasar sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana Anak yang persuasif dan kondusif. Pengkajian dalam acara pidana semakin rasional dari sistem politik hukum di Indonesia. Kepentingan hukum acara pidana menjadi sentral dalam merumuskan tujuan hukum, demokrasi, hak asasi manusia, sebagai citra supremasi hukum dalam masyarakat. Ketentuan yang mengikat dari asas umum Hukum Acara Pidana, tetap menjadi proporsional dalam UU No.3 tahun 1997, dengan ketentuan asas *lex specialis de rogat, lex generalis*.⁵¹

Ketentuan dasar Hukum Acara Pidana dalam UU No.3 Tahun 1997 meliputi asas-asas sebagai berikut:

⁵⁰ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Adirya Bakti, Bandung, 1997, hal 15-16.

⁵¹ Maulana Hassan Wadong, Op. Cit, hal 58-59.

1. Asas belum dewasa. Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam Peradilan Anak. Ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 4. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak, yang dapat melakukan hak dan kewajibannya.
2. Asas keleluasaan pemeriksaan. Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, maupun petugas lembaga pemasyarakatan atau petugas *probation/social worker* untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi anak, dan lain-lain, mempermudah sistem peradilan. Asas keleluasaan pemeriksaan diatur dalam pasal 59. Tujuan utama adalah meletakkan kemudahan dan sistem peradilan anak yang diakibatkan ketidak mampuan rasional fisik/jasmani dan rohani atau keterbelakangan pemahaman hukum yang didapat secara kodrat dalam diri anak.
3. Asas *Probation* /pembimbing Kemasyarakatan/*Social worker*. Kedudukan *probation* atau *social worker* yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidak mampuan seseorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.⁵²

Sehubungan dengan proses peradilan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak, yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial⁵³

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak, tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak, yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.⁵⁴

Bertitik tolak dari masalah kesejahteraan anak, jelas perlunya tindakan khusus dalam masalah hukum dan peradilan.

⁵² Ibid, hal 59-60.

⁵³ Barda Nawawi Arif, dalam Muladi, Barda Nawawi Arif, Op, Cit, hal 111.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 111.

Pendekatan khusus dalam menangani masalah anak, hukum, dan peradilan anak, terungkap dalam berbagai pernyataan antara lain:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif, dan pendekatan kejiwaan, yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental, penurunan semangat, serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.⁵⁵

Dalam proses atau sidang peradilan anak menurut pasal 3 UU No.3 Tahun 1997 menyebutkan: Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Kebijakan ini akhirnya mengelompokkan bahwa pengadilan anak adalah sebuah badan peradilan yang khusus di sediakan untuk menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana, kejahatan, dan pelanggaran.

Tentang perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan, persidangan dimulai dari penentuan hakim yang ditetapkan untuk menangani peradilan anak dimaksud, yang diatur dalam Pasal 9 UU. No.3 Tahun 1997. Pasal tersebut

⁵⁵ Ibid, hal 115.

menyebutkan bahwa: hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak ialah:

1. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
2. Memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam semua tingkat persidangan adalah hakim tunggal, kecuali dipandang perlu untuk diperiksa majelis.

Keutamaan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu: dalam hal perkara anak, sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Petugas pembimbing kemasyarakatan ditentukan oleh Departemen Kehakiman, yang bertugas mulai awal penyelidikan sampai pada penuntutan, persidangan dan pemasyarakatan anak di mana pada tiap-tiap tingkatan, pembimbing harus melaporkan hasil penelitiannya terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran. Dari hasil penelitian ini, maka pada tiap-tiap tingkatan pemeriksaan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan anak, dapat dihentikan atau sebaliknya diteruskan pemeriksaannya.⁵⁶

⁵⁶ Maulana Hassan Wadong, Op.Cit, hal 72-75.

Masa penahanan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut pasal 49 UU.No.3 Tahun 1997 adalah 15 hari, dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Apabila dalam jangka waktu 45 hari sidang perkara anak belum selesai, maka anak tersebut harus dikeluarkan dari tahanan. Pembatasan waktu pemeriksaan tersebut mengingat bahwa anak mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Hak-hak dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur sekolah, dan lain-lain).
- d. Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seseorang *probation, social worker*.
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan/penahanan/penuntutan yang melibatkan dirinya.
- f. Hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatan terhadap kasus yang melibatkan dirinya;
- g. Hak untuk mendapat proses persidangan tertutup.⁵⁷

C.3.3. Perlindungan Anak Dalam UU R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dalam aspek pidana, menurut UU Perlindungan Anak tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 16 Ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

⁵⁷ Ibid, hal 76.

Pasal 16 ayat (3). Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 ayat (1). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 ayat (2) sebagai berikut:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas dalam media masa dan untuk menghindari lebelisasi .

C.3.4. Perlindungan Anak Dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak

Perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum, diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

Ayat (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Ayat (2) Pelayanan dan asuhan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Dari uraian diatas, perlindungan anak pelaku tidak pidana dalam hukum positif nampak secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, baik hukum materiel maupun hukum formil, telah mengatur berbagai aspek perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ketentuan perundang-undangan lainnya, memperkuat hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan tujuan perlindungan anak yaitu kesejahteraan anak.

C.4. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Internasional

C.4.1. Sekilas Tentang Perlindungan Anak Dalam Hukum Internasional

Dunia Internasional nampaknya tidak pernah sepi membicarakan masalah perlindungan anak. Perhatian akan perlunya perlindungan anak berawal dari Deklarasi Jeneva, tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924, yang diakui dalam *Declaration of Human Rights* tahun 1948. Atas dasar hal itu pada tanggal 20 Nopember 1959 Majelis Umum PBB mengesahkan *Deckaration of the Right of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak) yang terdiri dari 10 prinsip.⁵⁸

Jiwa dari Resolusi PBB ini terkandung dalam Mukadimah Preambul nya yaitu bahwa: Umat manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak.⁵⁹

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 108.

⁵⁹ Paulus Hadi Suprpto, Op. Cit, hal 84.

Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam Kongres PBB, masalah anak terus dibicarakan mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada kongres ke I tahun 1955 di Geneva dibicarakan topik *Prevention of Juvenile Delinquency*. Pada kongres ke II di London tahun 1960 dibicarakan masalah *New Form of Juvenile Delinquency and Special of Juvenile Delinquency*, dan masalah *Juvenile Delinquency* masih juga dibicarakan pada kongres ke III di Stockholm.⁶⁰

Setelah masyarakat dunia berulang kali memusatkan perhatiannya pada masalah *Juvenile Delinquency*, dalam perkembangannya pusat perhatian diarahkan pada masalah *Juvenile Justice* (Peradilan Anak). Perhatian pada masalah perlunya perlindungan khusus bagi anak yang dijamin oleh hukum, berkaitan dengan prinsip kedua dari *Declaration of the Rights of the Child*.

Sehubungan dengan Konvensi Hak Anak Paulus Hadi Suprpto mengatakan bahwa Asas 2 Konvensi Hak anak, merupakan perlindungan anak untuk memperoleh kepentingan terbaik bagi anak. Asas 2 menyatakan bahwa: Anak berhak memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral spiritual yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak, harus merupakan pertimbangan utama.⁶¹

Menurut Barda Nawawi Arief, perhatian masyarakat bangsa-bangsa terhadap masalah *Juvenile Justice* kemudian dibicarakan dalam kongres PBB

o

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 108.

⁶¹ Paulus Hadi Suprpto, Op. Cit, hal 85.

ke VI tahun 1980 di Caracas Venezuela dengan topik: *Juvenile Justice before and after the onset of delinquency*. Kongres ini akhirnya menghasilkan suatu Resolusi No.4, mengenai *Development of Minimum Standards of Juvenile Justice*. Resolusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk menyelenggarakan peradilan anak (*The Administration of Juvenile Justice*) dalam rangka melindungi hak-hak asasi dari *Juvenile* yang terlibat dalam konflik hukum.⁶²

C.4.2. Perlindungan Anak Dalam SMR- JJ (Beijing Rules)

Aturan-aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Peradilan remaja (*Beijing Rule*), yang mencakup perlindungan anak dalam proses pidana adalah sebagai berikut:

- a. Asas umum, secara umum berisi tentang perlunya Kebijakan Sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak.
- b. Menegaskan peranan peradilan anak, tidak lain merupakan bagian integral dari Keadilan Sosial.

Dalam hal ini harus dicatat bahwa batasan umur anak sangat tergantung pada sistem hukum negara anggota, pada satu pihak dan kondisi sosial ekonomi, politik dan budaya masyarakat pada lain pihak, oleh karena itu batasan anak dirumuskan secara relatif, yaitu anak (*Juvenile*) adalah seorang yang berumur antara 7-8 tahun atau mungkin di atasnya. Satu hal yang penting harus diperhatikan bagi negara-negara anggota, ialah perumusan perundang-undangan nasional khusus, dan

⁶² Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Loc.Cit, hal 109.

pengimplementasiannya secara optimal ketentuan SMR-JJ ini dilingkungan negara anggota. Walaupun telah dirumuskan batasan tentang perbuatan pelanggaran, dalam hal ini harus diingat bahwa pengkategorian perbuatan-perbuatan untuk anak dan remaja hendaknya lebih luas dari jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana untuk orang dewasa, misalnya dimasukkan pula perbuatan membolos sekolah, ketidakpatuhan pada orang tua, atau pada peraturan sekolah, mabuk dimuka umum dan sebagainya (Rule 3.1)

- c. Batas usia pertanggungjawaban pidana, sebagai unsur penting pengimplementasian kaidah ini, pada pokoknya menyatakan bahwa, karena latar belakang sejarah dan budaya masyarakat suatu bangsa, sering sangat berpengaruh terhadap penentuan batas usia pertanggung jawaban pidana, maka pendekatan modern diterapkan. Pertanggung jawaban atas diri anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dan perbuatan anti sosial anak. Yang penting batas usia pertanggungjawaban pidana anak tidak ditentukan terlalu rendah apalagi tidak ditentukan sama sekali (Rule 4).
- d. Tujuan peradilan anak. Peradilan Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak, dilaksanakan atas dasar Asas Proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap perbuatan anti sosial, artinya tanggapan dan reaksi itu tidak saja dilandaskan pada bobot

perbuatan, melainkan memperhatikan pula lingkungan anak, status sosial, keadaan keluarga, dan faktor-faktor lain yang menjadi sebab timbulnya perbuatan.⁶³

- e. Tujuan peradila.1 anak tersebut diatas secara operasional diperankan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini kepada para aparat penegak hukum diberikan keleluasaan seluas mungkin dan dalam segala tingkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi (Rule 6).
- f. Hak-Hak Remaja./Anak selama dalam peradilan, hak-haknya harus dilindungi seperti misalnya, asas praduga tak bersalah, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua atau wali, hak untuk bertemu berhadapan dan menguji silang atas dirinya, dan hak untuk banding. Disamping itu selama dalam proses, privacy anak harus dilindungi mengingat anak sangat rawan terhadap stigmatisasi. Pemaparan identitas anak selama dalam proses oleh media masa harus dihindarkan (Rule 7 dan 8)⁶⁴

Jaminan perlindungan anak dalam proses peradilan dirumuskan dalam Rule7.1 SMR-JJ (Beijing Rules) ditegaskan bahwa jaminan prosedural yang pokok /mendasar dijamin pada setiap anak yang dalam proses peradilan anak antara lain:

1. Hak untuk diberitaukan tuduhannya.
2. Hak untuk tetap diam.
3. Hak untuk memperoleh penasehat hukum.

⁶³ Paulus Hadi Suprpto, Op.Cit, hal 109-110.

⁶⁴ Ibid, hal 111.

4. Hak untuk hadirnya orang tua / wali.
5. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi.
6. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi.

Di samping jaminan hukum yang Umum SMR-JJ (Beijing Rules), yang menekankan hal-hal yang patut mendapat perhatian khusus yaitu:

1. Dalam Bidang Penyidikan Dan Penuntutan

- a. Perhatian khusus dalam masalah kontak awal dengan anak yang tersangkut masalah hukum dalam Rule 10 dikemukakan bahwa: dalam hal penangkapan atau penahanan terhadap anak, orang tua atau walinya harus segera diberi tau atau diberitaukan dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah penangkapan atau penahanan dilakukan (Rule 10.1) dan hakim atau pejabat yang berwenang tanpa menunda-nunda waktu harus mempertimbangkan masalah pengeluaran anak dan penangkapan/penahanan, bahwa kontak antara aparat penegak hukum dengan pelanggar anak (*juvenile offender*) harus dilakukan dengan cara:
 1. Menghormati kedudukan hukum si anak.
 2. Memajukan kesejahteraan anak.
 3. Menghindari hal-hal yang merugikan/merusak/ membahayakan anak.
- b. Sehubungan dengan hal diatas SMR-JJ memandang sangat perlu adanya pendidikan dan latihan khusus bagi aparat penegak hukum yang berhubungan dengan masalah anak Rule 12.1 menentukan suatu polisi khusus yang terdidik dan terlatih yang menangani anak.

- c. Dalam menangani masalah anak di tingkat awal ini SMR-JJ memandang penting adanya jaminan bagi aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana, atau menyerahkan kepada masyarakat, dan bentuk-bentuk kegiatan sosial (Rule 11.1 dan Rule 11.2).⁶⁵

Dalam masalah penyidikan dan penuntutan Paulus Hadi Suprpto berpendapat yang senada dengan Barda Nawawi Arief sebagai berikut: Dalam proses penyidikan dan penuntutan anak harus dihindarkan dari hal-hal yang merugikan. Kontak awal antara anak dengan polisi harus dihindarkan dari penanganan-penanganan yang berupa gertak kekerasan fisik dan sebagainya. Diversi (pengalihan) suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini disemua tingkatan pemeriksaan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Penyelidikan atas diri anak oleh polisi merupakan pangkal tolak pribadi anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu diperlukan adanya satu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menangani anak.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit hal 115-118.

Di dalam kaitan adanya penundaan sidang anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak hanya semata-mata demi penundaan sidang Rule 10-13).⁶⁶

Berkaitan dengan penahanan menunggu sidang, Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa penahanan menunggu sidang harus digunakan sebagai tindakan terakhir dan hanya dalam waktu yang sesingkat mungkin (Rule 13.1). Bilamana mungkin penahanan menunggu sidang diganti dengan tindakan alternatif seperti pengawasan yang ketat, perlakuan/pemeliharaan yang intensif, penempatan pada keluarga, atau dalam lingkungan pendidikan atau dirumah. (Rule 13.2). Selama penahanan memperoleh semua hak dan jaminan menurut *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Penahanan ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa dan di dalam lembaga yang terpisah atau bagian yang terpisah dari lembaga yang juga digunakan orang dewasa (Rule 13.4). Selama dalam tahanan tetap menerima asuhan perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan sesuai jenis kelaminnya dan kepribadiannya (Rule 13.5).⁶⁷

2. Dalam Pemeriksaan Pengadilan dan Putusan .

- a. SMR-JJ menegaskan bahwa dalam kasus anak tidak dilakukan tindakan deversi, berdasarkan ketentuan Rule 11, maka anak harus ditangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. (Rule 14.1). Selanjutnya ditegaskan bahwa

⁶⁶ Pautus Hadi Suprpto, Op.Cit, hal 111.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda NawawinArief, Op.Cit, hal 118-119.

proses pemeriksaan harus bersifat kondusif bagi kepentingan anak yang terbesar dan dilakukan dalam suasana saling pengertian sehingga anak dapat berpartisipasi dan memberikan pernyataan secara bebas (Rule 14.2).

b. Mengenai bantuan hukum dan kedudukan orang tua/wali, SMR-JJ menegaskan bahwa:

1. Selama proses persidangan, anak berhak diwakili oleh penasehat hukum atau berhak menggunakan/meminta bantuan hukum gratis, apabila ada ketentuan demikian di negara yang bersangkutan (Rule 15.1).

2. Orang tua atau wali berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemeriksaan dan dapat diwajibkan untuk hadir oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan anak, sebaliknya merekapun dapat ditolak untuk berpartisipasi apabila ada alasan demi kepentingan anak (Rule 15.2).

c. Sebelum mengambil keputusan akhir untuk pemidanaan SMR-JJ menegaskan perlunya diteliti secara tepat laporan penelitian sosial mengenai latar belakang dan keadaan-keadaan dimana anak itu tinggal, atau keadaan-keadaan yang menyebabkan tidak pidana itu dilakukan (Rule 16.1).

d. Beberapa prinsip sebagai pedoman pada pengambilan keputusan yaitu:

1. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil, selamanya harus diseimbangkan, tidak hanya pada keadaan-keadaan dan

keseriusan/berat ringannya tindak pidana, tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

2. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
3. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan, kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain, atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat.
4. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Rule 17.2. Pidana mati jangan dikenakan pada setiap tindak pidana kejahatan yang dilakukan anak.

Rule 17.3. Anak-anak jangan dikenakan pidana badan.

Rule 17.4 Pejabat yang mempunyai kekuasaan untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan

5. Macam macam tindakan

Beberapa jenis tindakan untuk menghindari sejauh mungkin bentuk sanksi institusionalisasi disebutkan dalam Rue 18.1 sebagai berikut:

- a. tindakan/perintah perawatan bimbingan dan pengawasan..
- b. pengawasan.
- c. perintah kerja sosial .
- d. pidana yang bersifat uang dan ganti rugi.
- e. perawatan lanjutan dan tindakan perawatan lainnya.
- f. tindakan tindakan/perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok konseling dan kegiatan lain yang serupa.
- g. tindakan-tindakan atau perintah-perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu perkembangan dengan tinggal di dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang bersifat mendidik..
- h. tindakan-tindakan lain yang relevan.

Dalam rule 18.2 ditegaskan bahwa: Tidak seorang anakpun dapat dilepaskan dari pengawasan orang tua, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali hal itu diperlukan mengingat keadaan kasus si anak. Dijelaskan dalam *commentary* Rule 18.2 ini, menunjukkan pentingnya peranan keluarga dalam masalah pembinaan anak, oleh karena itu pemisahan anak dari orang tuanya harus merupakan tindakan terakhir.

6. Batas usia pertanggungjawaban anak. Masalah *The Age Criminal Responsibility*, erat sekali kaitannya dengan pengambilan keputusan oleh hakim, malaupun dalam SMR-JJ dimasukkan dalam Bagian I mengenai *General Principles* (Rule.4.1). Dalam Rule 4.1 ditetapkan batas usia minimum untuk dapat dipertanggung jawabkannya anak, karena menurut SMR-JJ *the Age of Criminal Responsibility* ini sangat berbeda –beda di antara Negara-negara di dunia, tergantung pada latar

belakang sejarah dan kebudayaannya masing-masing. Oleh karena itu Rule 4.1 menegaskan bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggung jawaban bagi anak permulaan batas usia pertanggung jawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.

7. Masalah Rekor Anak (Catatan dokumen, identitas dan riwayat pelanggaran anak), SMR-JJ menegaskan sebagai berikut :

Rule 21.1. Rekor anak harus disembunyikan secara ketat dan tertutup bagi pihak ketiga. Penggunaan rekor/arsip-arsip itu dibatasi untuk orang-orang yang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan terhadap perkara itu, atau orang lain yang seharusnya berwenang.

Rule .21.2 Rekor anak (dokumen dan sebagainya) jangan digunakan dalam proses pemeriksaan pelanggar dewasa dalam perkara-perkara berikutnya yang melibatkan anak tersebut.

Bentuk perlindungan terhadap rekor anak dalam Rule 21 diatas, merupakan bentuk kekhususan atau bagian dari *Protection of Prervacy* (perlindungan terhadap rahasia Pribadi anak yang dimasukkan dalam *General Principles*.

Rule 8. Dalam Rule ini ditegaskan bahwa hak anak tentang rahasia pribadinya harus dihormati pada semua tahapan proses untuk menghindarkan kerugian bagi anak yang disebabkan oleh publikasi yang tidak semestinya atau karena proses labelling (pencapan/stigmatisasi) (Rule 8.1).

Pada prinsipnya tidak ada suatu informasi apapun yang dapat dipublikasikan untuk mengidentifikasi si pelanggar anak (Rule 8.2).

8. Penegasan dalam Rule 20.1 SMR-JJ, bahwa setiap perkara anak harus ditangani sejak awal secara cepat, tanpa penundaan yang tidak perlu.⁶⁸

C.4.3. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Convention the Rights of the Child. (Konvensi Hak Anak 1989) Resolusi MU PBB 44/25.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak dalam Konvensi Hak- Hak Anak tertuang dalam Artikel 37 dan 40.

Artikel 37 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam.
- b. Pidana mati atau penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan, tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun.
- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang- wenang.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 116-130.

- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara, hanya digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan jangka waktu yang sangat pendek.
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya, harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya, akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan kontak dengan keluarganya.
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dimuka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Setiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak, tentang harkat dan martabatnya yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau tidak berbuat sesuatu) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.
- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan hak-hak:
 - (1) Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.
 - (2) Untuk diberitakan tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya.
 - (3) Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang mandiri dan tidak memihak.
 - (4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah.

- (5) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku.
 - (6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang dipergunakan, berhak memperoleh bantuan penterjemah secara cuma-cuma.
 - (7) Kerahasiaan pribadinya dihormati, dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.
- d. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukkan yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut akan dinyatakan telah melanggar hukum pidana khususnya:
- (1). Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang telah melakukan tindak pidana.
 - (2) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa proses peradilan harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati
- e. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.⁶⁹

C.4.4. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam United Nations Guidelines For The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)

Instrument Internasional ini tercantum dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Instrument ini dianggap penting untuk diperhatikan dalam masalah perlindungan anak bermasalah di bidang hukum.ialah:

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 158-160.

- a. Perlu diingat bahwa anak/remaja yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan kriminalisasi atau penghukuman atas perbuatannya (Rule 1.1- 1.5).
- b. Hendaknya diperhatikan pula norma dan instrument-instrumen Internasional yang berkaitan dengan hak-hak anak kepentingan akan kesejahteraan anak remaja pada satu pihak dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dari negara anggota. (Rule 7-8).
- c. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan delinkuensi anak, pemerinah merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan khusus, prosedur khusus dalam kerangka perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan semua anak remaja.
- d. Kebijakan yang telah tersusun hendaknya di dalamnya terkandung rencana dan program strategis dalam rangka penanggulangan *juvenile delinquency* baik melalui sistem Peradilan Pidana Anak, maupun tidak lewat sistem Peradilan Anak. Penjara hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir dan itupun hanya untuk jangka pendek.

Dalam rangka mencegah stigmatisasi dan kriminalisasi berkelanjutan terhadap anak, perundang-undangan hendaknya menjamin bahwa setiap perilaku yang bila dilakukan oleh orang dewasa tidak dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana, maka perbuatan itu pun bukan kejahatan atau perbuatan yang dapat dipidana bila dilakukan oleh anak remaja.

Penegak hukum dan petugas lain yang relevan baik laki-laki maupun wanita harus dilatih untuk cepat tanggap dan terbiasa terhadap kebutuhan khusus anak dan harus menggunakan ketrampilannya semaksimal mungkin demi tersusun dan tertanganinya program-program dan kemungkinan-kemungkinan lain, sehingga anak terhindarkan dari campur tangan sistem peradilan (Rule. VI 52-56).⁷⁰

C.4.5. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam United Nation Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty

Instrumen Internasional ini tertuang dalam Resolusi PBB 45/113, mulai berlaku 14 Desember 1990. Resolusi ini merupakan pemantapan standar minimum bagi perlindungan anak dari semua bentuk perampasan kemerdekaan yang dilandaskan pada hak-hak asasi manusia, dan menghindarkan anak dari efek sampingan semua bentuk penahanan demi tercapainya pengintegrasian anak kedalam masyarakat. Oleh karena itu resolusi ini harus diterapkan secara utuh tanpa adanya diskriminasi dan tetap menghormati konsep moral yang

⁷⁰ Paulus Hadi Suprpto, Op.Cit, hal 101-106.

dimiliki anak. Resolusi yang direncanakan sebagai bahan acuan baku para profesional yang terlibat dalam pengelolaan sistem peradilan anak ini, hendaknya di buat siap pakai dan dimasukkan dalam sistem perundang-undangan negara anggota.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan ialah ketentuan yang menekankan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak didalam penyelenggaraan peradilan anak guna mewujudkan kesejahteraan fisik dan mental anak. Perampasan kemerdekaan anak harus dipertimbangkan masak-masak dan dilandaskan pada asas-asas dan prosedur yang tertuang dalam Resolusi ini sendiri dan Resolusi 40/33 (*Beijing Rules*). Perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal dan untuk kasus- kasus tertentu saja.

Pihak-pihak yang berwenang wajib secara teratur dan konsisten berupaya meningkatkan kesadaran publik bahwa perhatian terhadap anak dan mempersiapkan anak kembali ke masyarakat, adalah merupakan satu bentuk pelayanan sosial dan sangat penting, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk membuka hubungan antara anak dengan masyarakat. (Bagian 1).

Anak menurut resolusi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Batas usia minimal untuk seseorang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan ditentukan oleh undang-undang. Perampasan kemerdekaan sendiri berarti, setiap bentuk penahanan atau penempatan anak dalam Lembaga

Koreksi, dimana anak tidak boleh meninggalkan tempat itu atas kehendak sendiri, atas dasar perintah Lembaga Pengadilan Administrasi atau lembaga publik lainnya.

Perampasan kemerdekaan atas diri anak, tetap memperhatikan penghormatan hak-hak anak, pemberian kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan *self-respect* anak, serta mendukung usaha-usaha pengintegrasian* anak kembali ke masyarakat. (Bagian II).

Anak yang ditahan kerana menunggu persidangan hendaknya tetap dianggap tak bersalah dan diperlakukan sebagai demikian itu. Penahanan jenis ini hendaknya dihindarkan dan dibatasi untuk kasus dan situasi tertentu saja. Bilamana penahanan jenis ini tetap dikenakan pada diri anak maka pengadilan harus memberikan prioritas utama dalam pemrosesan kasusnya, sehingga jangka waktu penahanan tidak berlarut-larut.

Anak dalam status ini harus dipisahkan dengan yang berstatus pelaku kejahatan dan didampingi penasehat hukum secara gratis, yang dapat berkomunikasi secara teratur dan dijamin privasinya (Bagian III)

Rekaman (records) yang berisi semua laporan termasuk catatan tentang norma hukum yang dituduhkan, kesehatan anak, cara kerja, pendisiplinan dan dokumen-dokumen tentang bentuk isi dan rincian perlakuan terhadap anak harus dibuat dan ditempatkan dalam arsip perorangan yang bersifat rahasia. Anak bila ternyata mendapat kesalahan catatan tentang dirinya, diijinkan untuk mengadakan pembetulan. Bila saatnya anak dilepaskan, maka semua catatan

itu harus disegel dan setelah jangka waktu tertentu dihapus dihilangkan (Bagian IV.1).

Di Semua tempat dimana anak dirampas kemerdekaannya, catatan lengkap yang tersimpan baik harus disediakan baginya catatan itu meliputi identitas anak, alasan perintah penempatan anak dalam penjara, serta pihak-pihak yang memerintahkan hari dan jam masuknya, pemindahan dan penglepasan, rincian pemberitahuan pada orang tua dan wali yang berisi permasalahan fisik dan kesehatan jiwa anak, khusus bagi anak pecandu narkotik. Pada saat anak masuk di rumah penjara, ia harus segera diberi copy aturan-aturan yang berlaku ditempat itu. Diskresi tertulis tentang hak-hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, beserta alamat- alamat pihak yang berwenang menerima keluhan, agen pemerintah dan swasta yang dapat memberikan bantuan hukum (Bagian IV. 2).

Anak yang masuk dalam penjara sesegera mungkin harus diwawancarai, dibuat laporan kejiwaan dan sosialnya, diidentifikasi faktor-faktor lain yang kesemuanya itu nantinya akan berguna untuk penentuan tipe dan tingkat perlakuan serta penyusunan program-program yang sesuai dengan kondisi anak. Perampasan kemerdekaan anak, harus dilandaskan pada pertimbangan yang masak setelah memperhatikan status umur, personalitas, jenis kelamin, tipe pelanggaran dan kondisi fisik kejiwaan anak. Penempatan

anak dalam tahanan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali ada hubungan keluarga (Bagian IV.3).⁷¹

Dari beberapa ketentuan instrumen-instrumen internasional yang telah diuraikan diatas, menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dalam upaya mencapai kesejahteraan anak. Khususnya perlindungan anak dalam hukum pidana. Berbagai instrumen internasional mempedomani dan mengatur mulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan sampai anak ditempatkan dalam lembaga, yang menghormati hak-hak asasi anak.

D. Kebijakan Pidana Dan Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana

D.1. Pengertian Kebijakan Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana, dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal.

Menurut Sudarto, politik hukum ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.⁷²

⁷¹ Ibid, hal 115-118

⁷² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal 159.

Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hal 27

- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷³

Dengan menunjuk pengertian diatas, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik kukum pidana, berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁷⁴

Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti: Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang⁷⁵

Disamping pengertian politik hukum pidana, Sudarto mengemukakan kebijakan kriminal (politik kriminal). Menurut beliau politik kriminal mempunyai 3 pengertian yaitu:

- a. Dalam arti sempit politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

⁷³ Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 20.

⁷⁴ Sudarto, Op.Cit, hal 161.

Lihat juga Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 28.

⁷⁵ Sudarto, Op. Cit, hal 93.

- c. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁷⁶

Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut.⁷⁷

Pengertian yang dikemukakan Sudarto, nampaknya senada dengan definisi penal policy yang dikemukakan Marc Ancel, secara singkat dapat dinyatakan, sebagai suatu ilmu sekaligus bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan dengan baik. Menurut Marc Ancel, peraturan hukum positif adalah perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, [⊙]penal policy adalah sama dengan kebijakan atau politik hukum pidana.

Sedang menurut A. Mulder *Strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁷⁸

⁷⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 113-114.

⁷⁷ Ibid, hal 114.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 28.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana, juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksana pidana.⁷⁹

Peter Hoefnagels yang mengemukakan definisinya sebagai berikut:
*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*⁸⁰

Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels ialah:

- a. *Criminal Policy is the science of responses;*
- b. *Criminal Policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal Policy is a policy of designating human behavior as crime;*
- d. *Criminal Policy is a rational total of the responses to crime.*⁸¹

⁷⁹ Ibid. hal 28-29.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 2.

Lihat juga Marc Ancel, Social Defence, 1965, hal 209.

⁸¹ Ibid.

D.2. Teori-Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dibagi sebagai berikut:

1. Teori absolut atau teori pembalasan.
2. Teori relatif atau teori tujuan
3. Teori Gabungan.

Ad 1. Teori absolut

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenais tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut, ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁸²

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*" yakni: seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

⁸² Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi revisi, Alumni, Bandung, 1998, hal 10-11.

Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

Tokoh lain penganut dari teori absolut yang terkenal ialah Hegel, yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekwensi dari adanya kejahatan.

Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan "*Negation der Negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).⁸³

Seiring dengan Hegel seorang filsafat hukum Fichte dengan teorinya "kontrak sosial" dibagi dalam kontrak tentang milik dan kontrak tentang perlindungan.

Dengan hak milik seseorang menjadi warga, tetapi hubungan timbal baliknya adalah bahwa: tiap-tiap orang harus mempunyai hak milik, karena tidak seorangpun dapat dikeluarkan dari masyarakat hukum.

Hubungan antara individu dan negara didefinisikan dalam tiga prinsip: (1) Dengan pemenuhan kewajiban- kewajiban warga negara seseorang menjadi anggota dari negara; (2) Hukum membatasi dan menjamin hak individu; (3) Diluar bidang kewajiban-kewajiban warga ini, individu adalah bebas dan hanya

⁸³ Ibid, hal 12.

bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dia adalah seorang manusia; bukan seorang warga.

Hak untuk menghukum merupakan bagian kontrak sosial dan didasarkan atas pembalasan dendam. Hukum pidana mewujudkan dan menjamin perlindungan hak-hak yang dijamin oleh negara hukum.⁸⁴

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif dibagi dalam beberapa golongan yaitu:

1. Penganut teori distributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif yang tidak murni (dengan modifikasi) dapat dibagi pula dalam:
 - a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok dengan/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Nigel Walker bahwa hanya teori retributif yang murni yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan- pengenaan pidana. Oleh karena itu golongan ini disebut sebagai golongan “Punishers” (penganut aliran/teori pembedaan).

⁸⁴ Friedmann, Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis, Problema Keadilan, Susunan II, Cetakan kedua, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 7

Sedangkan penganut teori retributif murni, tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana.

Menurut Negel Walker kebanyakan KUHP, disusun sesuai dengan teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yaitu dengan menerapkan pidana maksimum sebagai batas atas tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

Menurut John Kaplan teori retribution ini dibedakan lagi menjadi dua teori:

- a. teori pembalasan (*the revenge theory*) dan
- b. teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”.

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayar kembali (*the criminal is paid back*). Sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*)

Menurut Leo Polak dalam masalah pembalasan ia menyatakan bahwa kebahagiaan dan penderitaan harus dibagi antara mereka secara rata. Tiap-tiap kejahatan mengganggu usaha pembagian ini.

Penderitaan hipotetis yang dialami oleh tiap penduduk yang menghormati hukum, dituangkan menjadi pidana maksimum yang diancamkan terhadap suatu kejahatan.

Menurut Polak, keuntungan yang semula diperoleh seorang penjahat harus diobyektifkan. Karena itu teorinya disebut teori yang mengobyektifkan (*obyectiverings theorie*).

Menurut Sudarto, sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern.

Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan pidana sendiri, melainkan sebagai pembalasan, dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Maka dapat dikatakan ada azas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana. Pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.⁸⁵

Menurut Van Bemmelen, teori mutlak dalam pidana adalah suatu gejala yang mempunyai arti sendiri. Mutlak disini mempunyai pengertian

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 14-15.

“dilepaskan” dari setiap tujuan apapun. Jadi pidana tidak usah mempunyai tujuan lain, selain hanya pidana “saja”. Karena kejahatan tidak dibolehkan dan tidak diijinkan menurut susila dan menurut hukum, jadi tidak boleh terjadi, maka kejahatan seharusnya dipidana. Jadi pidana mempunyai fungsi sendiri yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan. Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak boleh dihargai. Oleh karena itu pidana dilepaskan dari tujuan.⁸⁶

Dilain kesempatan Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pencegahan main hakim sendiri tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yakni memenuhi keinginan akan pembalasan.

Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali ter hukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevesi special*) dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan *prevensi general* apapun.⁸⁷

Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan, menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tak ada manfaatnya seperti dalam pandangan mereka yang anti

⁸⁶ Van Bemmelen, Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, Diterjemahkan oleh Hasnan, Penerbitan Edisi Indonesia pada Binacipta, Edisi kedua, Dicitak oleh Percetakan Bina Cipta, Bandung, 1987, hal 25.

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 15.

pembalasan. CHR. J. Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas dari beratnya pidana. Hanya saja ia berpendapat bahwa, tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan.⁸⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, teori absolut atau mutlak menyatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apakah dengan demikian mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat kemasa lampau tidak ke masa depan. Utang pati nyaur pati, utang laro nyaur laro, yang berarti pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.

Demikianlah terdengar semboyan di Indonesia Oog om oog, tand om tand, mata-mata, gigi sama gigi dari Kitab Injil Perjanjian Lama bermakna sama.

⁸⁸ Ibid.

Pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan, kepuasan keadilan yang dikejar, lain tidak.⁸⁹

Menurut Andi Hamzah, teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah maka teorinya disebut absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Hakikat pidana adalah pembalasan.⁹⁰

Menurut Vos, menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan obyektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan obyektif dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, dan akan dipidana lebih berat.⁹¹

Variasi-Variasi Teori Pembalasan .

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, Asas Hukum Pidana di Indonesia, Adisi kedua, Cetakan keempat, PT ERESCO, Bandung, 1986, hal 21.

⁹⁰ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cetakan kedua, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 26.

⁹¹ HB. VOS, Leerboek Van Nederlands Strafrecht, Haarlem, HD Tjeenk Willik, 1950, hal 10.

Diperinci oleh Leo Polak menjadi:

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum, atau pertahanan pemerintah negara. Teori ini menggambarkan pidana sebagai paksaan belaka. Akibat teori ini siapa yang secara suka rela menerima putusan hukum pidana, dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut tidak sebagai penderitaan.
2. Teori kompensasi keuntungan. Penganut teori ini adalah Herbert yang mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquino, yang menyatakan apabila kejahatan tidak dibalas pidana, maka timbullah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan. Menurut istilah, penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya.
3. Teori yang melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan. Penganut teori ini adalah Hegel yang mengatakan bahwa etika tidak dapat mengijinkan berlakunya suatu kehendak subyektifitas yang bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan teori Hegel ini, teori Von Bart yang mengatakan makin besar kehendak menentang hukum, makin besar penghinaan yang dijatuhkan. Oleh karena itu teorinya ini disebut dengan teori penghinaan atau reproduksi.
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Heymans yang diikuti oleh Kant-Rumelin Nelson-Kranenburg. Menurut teori ini asas persamaan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, menuntut suatu perlakuan menurut hukum yang sama terhadap setiap anggota masyarakat. Kranenburg menunjukkan pembagian syarat-syarat untuk mendapat keuntungan dan kerugian. Maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Mereka yang sanggup mengadakan syarat-syarat istimewa, akan mendapat keuntungan dan kerugian yang istimewa pula. Keberatan terhadap teori pembalasan ialah: 1) Teori ini tidak menerangkan mengapa negara harus menjatuhkan pidana. 2) Sering pidana itu tanpa kegunaan yang praktis.
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan. Teori ini dikemukakan oleh Heymans yang mengatakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada perbuatan apakah orang lain mendapat kebahagiaan atau penderitaan. Tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Niat-niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh diberi kepuasan. Segala yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.
6. Teori mengobyektifkan. Teori ini diperkenalkan oleh Leo Polak sendiri, berpangkal pada etika. Menurut etika Spinoza, tiada seorangpun boleh

mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukan⁹².

Ad. 2 Teori Relatif.

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andrenais teori ini dapat disebut "teori perlindungan masyarakat".

Menurut Negel Walker teori ini disebut teori reduktif, karena dasar membenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Pidana menurut teori ini, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

⁹² Ibid, hal 12.

Menurut O. Christiansen, tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini bisa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering digunakan istilah "*special deterrence*" dan "*general deterrence*".

Yang dimaksud dengan prevensi spesial ialah: pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi

Ini berarti bahwa: pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini, dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.

Yang dimaksud dengan prevensi general ialah: pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana, dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya, untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johanes Andenais ada tiga pengaruh dalam pengertian *general prevention* yaitu:

- a. pengaruh pencegahan;
- b. pengaruh untuk memperkuat larangan moral;
- c. pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Menurut J. Andenais pengertian "*general prevention*", tidak hanya mencakup adanya pengaruh pencegahan, tetapi termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana.

Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori deterrence.

Menurut Van Veen pengertian *preverensi general* mempunyai tiga fungsi yaitu:

- a. menegakkan kewibawaan;
- b. menegakkan norma;
- c. membentuk norma.⁹³

Menurut Wirjono Prodjodokoro, dalam teori relatif atau nisbi, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, melainkan harus dipersoalkan perlunya dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi. Prevensi ada dua macam, yaitu *prevensi khusus* (*spesial*) dan *prevensi umum* atau *general*. Keduanya berdasar atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman pidana dan kemudian dengan

⁹³ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 16-19,

dijatuhkannya pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi spesial hal bikin takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedang dalam prevensi general diusahakan agar para oknum semua takut akan menjalankan kejahatan.

Ada teori relatif lain yang melihat bahwa dengan menjatuhkan pidana, memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut pendapat Zevenbergen yang dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, ada tiga macam memperbaiki penjahat yaitu: perbaikan yuridis, perbaikan intelektual dan perbaikan moral

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal mentaati undang-undang; perbaikan intelektual mengenai cara berpikir si penjahat agar ia insaf akan jeleknya kejahatan; sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar menjadi orang yang bermoral tinggi⁹⁴

Berkaitan dengan teori relatif Van Bemmelen mengemukakan bahwa disamping atau sebagai dasar pembenaran oleh kebanyakan sarjana ialah:

1. Prevensi umum (pencegahan umum) bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Prevensi umum diuraikan oleh Van Vien dalam disertasinya

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal 23-24.

mempunyai tiga fungsi yaitu: menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma.

2. Prevensi khusus (pencegahan khusus) Mereka beranggapan bahwa pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari pendapat bahwa manusia (pelaku tindak pidana) dikemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia mengalami (belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.
3. Fungsi perlindungan. Mungkin sekali bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika ia bebas.⁹⁵

Sehubungan dengan teori pembedaan relatif atau teori tujuan atau utilitarian theory, seorang tokoh mazhab utilitarianisme Joreme Bhentan yang mengembangkan pikirannya dalam bidang hukum pidana dan hukuman terhadap tindak pidana, menurut Benthon setiap kejahatan harus diklasifikasikan dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari pada yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya Benthon

⁹⁵ Van Bemmelen, Op. Cit, hal 28.

mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus menciptakan hukum yang adil yang dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat.⁹⁶

Ad 3. Teori Gabungan

Dalam hal teori gabungan Van Bemmelen mengemukakan bahwa: Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa pembalasan memang betul merupakan dasar dan pembenaran pidana. Akan tetapi dengan menjatuhkan pidana pembalasan itu, selalu harus diperhatikan apa yang dapat dicapai oleh pemerintah dengan pidana itu. Penulis yang pertama-tama dengan jelas sekali mempropagandakan teori menggabungkan ialah Pellegrino Rossi (1787-1848) dalam bukunya *Traite de Droit Penal* pada tahun 1828. Menurut pendapatnya pembenaran pidana terletak dalam pembalasan. Hanya “yang bersalah” boleh dipidana; pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan: “.....hukum..... harus menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang bersalah dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan”.

Tujuan pidana menurut Rossi ialah;

- a. Perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi pidana harus memberikan manfaat kepada tata tertib masyarakat. Pelaksanaan pidana kepada masyarakat terbatas dalam tujuannya (menegakkan tata tertib masyarakat) dan dalam sarannya yaitu dalam sanksi yang boleh dijatuhkan jika ada manfaatnya.

⁹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Lembaran Hukum dan Masyarakat, Mazhab-Mazhab Dalam Ilmu Hukum dan Beberapa Perspektif Terhadap Hukum, Masalah-Masalah Hukum* No.4 Tahun 1990 hal 28.

Hakim diberi kebebasan yang luas dalam menentukan sanksi itu. Pembuat undang-undang tidak boleh menetapkan suatu aturan pidana saja yang tidak boleh dirubah-rubah, karena sudah diberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan semua sebab yang mengakibatkan gangguan terhadap tata tertib masyarakat . Hakim harus memperhatikan manfaat apa yang akan diberikan oleh pidana itu kepada tata tertib masyarakat.

- b. Prevensi umum. Akibat penting dari pidana ialah pelajaran (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitu pula kepada penjahat. Mengenai tujuan ini tidak mengharapkan banyak “Usaha memperbaiki para penjahat barang kali merupakan usaha yang paling tidak pasti akan membawa hasil.
- c. Memberikan dua akibat, yaitu memberikan kepuasan moral kepada masyarakat dan menimbulkan perasaan aman dan sentosa. Rossi merupakan penganut teori menggabungkan, karena mengakui bahwa pidana akan menimbulkan berbagai akibat yang harus dirasakan supaya tercapai. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak melupakan bahwa ia menganggap pembalasan sebagai dasar pidana, dan berpendapat bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi pembatasan yang adil.⁹⁷

Sehubungan dengan teori gabungan Wirjono Prodjodikoro mengatakan: Disamping teori absolut dan teori telatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga, yang satu pihak mengakui unsur-unsur pembalasan dalam

⁹⁷ Van Bemmelen, Op.Cit, hal 29-30.

hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur preverensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.⁹⁸

Menurut Andi Hamzah teori gabungan antara pembalasan dan prevensi berveriasi pula. Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu yang menitik beratkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe menyatakan "Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi dan ciri-cirinya. Tetapi tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum"⁹⁹

Sedang Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.¹⁰⁰

⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal 24.

⁹⁹ Pompe, dalam Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Cetekan kedua, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal 31-32.

¹⁰⁰ E. Utreht, Hukum Pidana I, Djakarta, Penerbitan Universitas, 1958, hal 38.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan, tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Teori gabungan yang kedua senada dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa, kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. Pidana bersifat pembalasan kerana ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara suka rela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, kerana kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak perlu takut lagi, kerana sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Ini kurang dibahas oleh para sarjana.¹⁰¹

¹⁰¹ Utrecht, Ibid, hal 189

Dalam Rancangan KUHP, penjabaran teori gabungan dalam arti luas meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembalasan rasa bersalah pada terpidana¹⁰².

D. 3. Tujuan Pemidanaan

Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya tentang tujuan pemidanaan sebagai berikut:

1. Richard D.Schwartz dan Joreme H. Skolnik: Sanksi pidana dimaksudkan untuk:
 - a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
 - b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana;
 - c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.
2. Jahn Kaplan: Disamping mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembenaran pidana yaitu (Retribution, Deterrence, Incapacitation, dan Rehabilitation), mengemukakan pula dasar pembenaran pidana yang lain, yaitu:
 - a. Untuk menghindari balas dendam.
 - b. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik;
 - c. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian.

¹⁰² Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Cet kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal 33.

3. Emile Durkheim: mengemukakan bahwa fungsi pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan.
4. Fouconnet: mengatakan bahwa penghukuman dalam arti pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu.
5. Roger Hood: menngemukakan bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau penbuat potensiil melakukan tindak pidana, juga untuk:
 - a. memperkuat kembali nilai-nilai sosial;
 - b. menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan.
6. G. Peter Hoefnagels: mengemukakan tujuan pidana adalah :
 - a. penyelesaian konflik;
 - b. mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain kearah perbuatan yang kurang sesuai dengan hukum.
7. R. Rijksen: mengemukakan perbedaan antara dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana.

Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dalam pembalasan itu terletak pembenaran daripada wewenang pemerintah untuk memidana.

Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki.

Tujuan-tujuan itu menurut R. Rijkzen serta penulis-penulis lain yaitu Veen, Hulsman dan Hoefnagels adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.

8. Ruslan Saleh: mengemukakan pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:
 - a. segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
 - b. segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Dengan demikian, pada hakikatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

9. Dr. Sahetapy: mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan “pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya.

Makna pembebasan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia terbelenggu.

Menurut Dr. Sahetapy tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan, dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh kejaan.

10. Bismar Siregar: menyatakan antara lain, yang pertama-tama patut di perhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah

terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia.

11. Moelyatno mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah kompleks yang dengan singkat dapat disimpulkan bahwa: Bukan saja harus dipandang untuk mendidik terpidana kearah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya, tetapi juga untuk memberi ketenangan bagi masyarakat.¹⁰³

12. Muladi mengungkapkan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum. Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda, yakni bersifat individual dan yang bersifat umum.¹⁰⁴

b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan.¹⁰⁵

¹⁰³ Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Anggota IKAPI Yogyakarta, 1985, hal 66.

¹⁰⁴ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hal 81.

¹⁰⁵ Muladi, Ibid, hal 64.

c. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat.

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam hal ini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama dikaitkan dengan pengertian, bahwa ppidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan, atau balas dendam yang tidak resmi.¹⁰⁶

d. Tujuan ppidanaan adalah pengimbalan/pengimbangan. Bila kita melihat kembali teori retributif, merupakan teori tertua yang mendasarkan pada keyakinan bahwa penjahat harus membayar kembali akibat perbuatannya yang telah dilakukan. Teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya. Hal ini memberikan pbenaran untuk dilakukan pembalasan.¹⁰⁷

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka didalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2

Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan mengenai tujuan dan pedoman ppidanaan tidak pernah dirumuskan dalam KUHP. Diadakannya perumusan tujuan dan pedoman ppidanaan didalam konsep bertolak pada:

1. Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana dan aturan

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid, hal 86.

pidana dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana.

2. Dilihat secara fungsional dan operasional pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap formulasi oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif), kemudian tahap aplikatif oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap eksekusi oleh aparat/instansi pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif administratif). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai kesatuan sistem pidana di perlukan tujuan dan pedoman pidana.
3. Sistem pidana yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat lainnya, tanpa pedoman atau kendali/control.

Perumusan tujuan pidana, dimaksudkan sebagai fungsi/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.¹⁰⁸

Perkembangan selanjutnya dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2000, merumuskan tujuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 sebagai berikut:

Ayat 1: Pidana bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat 2: Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Adirya Bakti, Bandung, 1996, hal 152-153.

¹⁰⁹ Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI, Rancangan KUHP, Tahun 2000.

D.4. Pedoman Pidana

Pedoman pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana. Sampai saat ini belum ada pola pidana yang dapat dijadikan sebagai pedoman legislatif nasional, untuk menyusun perundang-undangan pidana. Inilah merupakan salah satu kekurangan, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penghambat upaya penyusunan dan pembaharuan perundang-undangan pidana di Indonesia. Ditambah lagi dengan belum adanya sistem pidana yang bersifat nasional. (KUHP baru belum terbentuk).

Perundang-undangan pidana sebenarnya dalam keadaan memprihatinkan. Dengan belum adanya atau belum jelasnya pola pidana dan sistem pidana yang berakibat adanya kerancuan, ketidak sesuaian, dan keaneka ragaman di dalam produk legislatif, yang mengandung sanksi pidana. Dalam praktek legislatif selama ini terlihat keaneka ragaman pola di dalam menentukan sanksi (pidana/tindakan), sistem perumusan sanksi, jumlah lamanya sanksi dan pola pemberatan peringanan sanksi. Penentuan sanksi pidana memang merupakan prerogatif badan legislatif, sehingga wajar ada perbedaan. Namun tentunya harus ada pola atau kesepakatan umum yang dapat dijadikan pegangan. Sistem pidana menurut pola KUHP/WVS yang saat ini berlaku *Civil Law System*, memang bukan satu-satunya konsep untuk memecahkan masalah hukum, salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini

menurut Barda Nawawi Arief adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, pedoman pemidanaan dalam KUHP yang sekarang berlaku tidak dirumuskan. Baru dalam Konsep KUHP tahun 1991/1992, perumusan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dirumuskan dalam Pasal 51-52.

a. Dirumuskannya tujuan dan pedoman ini bertolak pada pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan. (Anthony Allot, *the Limits of Law*, 1980:28) menyebutkan dengan istilah "*purposive system*") Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan.
2. Dilihat secara fungsional dan operasional pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan dalam tahap "formulasi" oleh pembuat undang-undang, tahap "aplikasi" oleh aparat/badan yang berwenang dan tahap "eksekusi" oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Agar keterjalinan dan keterpaduan

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 115-116.

antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan pembedanaan diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pembedanaan.

3. Sistem pembedanaan yang betolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pembedanaan yang jelas dan terarah

b. Konsep merumuskan bermacam-macam pedoman pembedanaan yaitu:

1. Pedoman yang bersifat umum untuk memberi pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
2. Pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahan kepada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
3. Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

c. Diadakannya pedoman untuk menerapkan sistem perumusan ancaman pidana, antara lain dimaksudkan untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku absolut/imperatif dari suatu sistem perumusan tunggal maupun alternatif. Dengan adanya pedoman maka dimungkinkan:

1. Suatu sistem perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif atau sistem komulatif.
 - 2.. Suatu sistem alternatif seolah-olah menjadi sistem komulatif.
- d. Diadakannya pedoman juga dimaksudkan sebagai jembatan untuk memformulasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatar belakangi disusunnya KUHP (konsep) antara lain:
1. Prinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis sanksi pidana;
 2. Ide individualisasi pidana;
 3. Ide untuk mengefektifkan jenis pidana yang bersifat non custodial atau mengefektifkan jenis alternatif pidana selain pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari/membatasi penggunaan pidana penjara/kebijakan selektif dan limitatif.
 4. Ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang lebih bersifat "pidana" dengan jenis sanksi yang lebih bersifat tindakan walaupun disadari adanya kekaburan mengenai batas-batas kedua sanksi ini.
 5. Untuk menghindari eksekusi dari pidana pendek.¹¹¹

Pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 117-119.

1. Pedoman pemidanaan yang bersifat umum

Dalam Konsep KUHP Tahun 2000 dirumuskan dalam pasal 51 sebagai berikut:

(1). Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:

- a.. kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan atau;
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan, perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹¹²

Dengan adanya daftar yang sepatutnya dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana, diharapkan agar memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana.

¹¹² Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Konsep KUHP Baru tahun 2000

Menurut penjelasan pasal tersebut kesepuluh hal yang patut dipertimbangkan itu merupakan daftar minimal yang masih dapat ditambahkan oleh hakim sendiri, jadi tidak bersifat limitatif.¹¹³

2. Pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus

Dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu tersebar dalam pasal-pasal yang mengatur jenis pidana itu masing-masing: pidana penjara dalam Pasal 66, pidana tutupan dalam Pasal 74 dan 75, pidana denda dalam Pasal 79, pidana kerja sosial dalam Pasal 79 a¹¹⁴

Sedang dalam Konsep KUHP tahun 2000, tersebar dalam pasal-pasal: pidana penjara dalam Pasal 64, pidana tutupan dalam Pasal 71, pidana pengawasan dalam Pasal 72, pidana denda dalam Pasal 75, pidana kerja sosial dalam Pasal 79, pidana mati dalam Pasal 80.¹¹⁵

3. Pedoman Penerapan Sistem Perumusan Ancaman Pidana.

a. Pedoman Penerapan Pidana Penjara Tunggal (Pasal 54).

(1). Perumusan ini baru muncul dalam Konsep 1987/1988, sebagai realisasi dari Kesimpulan Lokakarya Sanksi Pidana pada tanggal 5-6-7 Februari 1986, yang diselenggarakan oleh BPHN. Menurut Lokakarya ini perumusan pidana penjara secara tunggal yang bersifat absolut sejauh mungkin harus dihindarkan, sekiranya perumusan tunggal tidak dapat

¹¹³ Ibid, hal 156.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 155.

¹¹⁵ Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2000.

- (d) Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan erat antara banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Hal ini kurang menunjang kecenderungan saat ini di banyak negara (berdasarkan kongres-kongres internasional) untuk mengembangkan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal.
- (3) Untuk mengimbangi dan menghindari sifat yang kaku dan absolut dari sistem perumusan tunggal, Pasal 54 Konsep merumuskan suatu “pedoman” sebagai “klep/katup pengaman”. Yang dirumuskan dalam pedoman itu adalah:
- (a) Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara (yang dirumuskan secara tunggal);
 - (b). Keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana penjara; dan
 - (c) Jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana penjara yang tidak dijatuhkan itu;
- (4). Menurut Pasal 54 Konsep, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak menjatuhkan pidana tunggal ialah:
- (a) Terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal;

(b) Pengadilan berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara secara tunggal setelah mempertimbangkan :

(i) Tujuan pemidanaan (Pasal 50 Konsep);

(ii) Pedoman pemidanaan (Pasal 51 Konsep);

(iii) Pedoman menjatuhkan pidana penjara (Pasal 57 Konsep).

(5) Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda walaupun tindak pidana yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal. Jadi menurut Pasal 54 Konsep, sistem perumusan tunggal seolah-olah dapat menjadi sistem alternatif

Denda yang dapat dijatuhkan adalah maksimum denda menurut kategori 5 dengan minimum sebesar maksimum denda menurut kategori 3. Ditentukannya maksimum menurut kategori 5 (sebagai pengganti ancaman pidana tunggal), karena delik yang diancam dengan pidana penjara tunggal adalah delik-delik "sangat serius" yang bobotnya 7 tahun penjara. Karena delik yang bobotnya 7 tahun ke bawah maksimum dendanya adalah kategori 4, maka untuk delik yang bobotnya di atas 7 tahun ditentukan dendanya (sebagai pengganti pidana penjara tunggal) menurut kategori 5. Adapun minimalnya ditentukan sebesar maksimum denda kategori 3 yaitu Rp.3.000.000.00, berdasarkan pertimbangan, bahwa minimum denda untuk delik "sangat serius" diatas 7 tahun adalah maksimum denda untuk

“delik ringan” yaitu denda kategori 3. Jadi, minimumnya bukan kategori 1 “sangat ringan” yang tidak diancam dengan pidana penjara.

- (6). Selain sistem perumusan tunggal dapat menjadi sistem alternatif menurut Pasal 54 ayat (4), dapat juga menjadi sistem komulatif untuk delik-delik tertentu. Dimungkinkannya penjatuhan secara komulatif untuk delik-delik tertentu ini dimaksudkan untuk menampung sistem “komulatif alternatif”(dan/atau) yang selama ini digunakan dalam beberapa undang-undang diluar KUHP. Menurut ayat (4), denda yang dikomulasikan itu adalah denda menurut kategori 5.
- (7). Dengan adanya ketentuan Pasal 54 Konsep, maka beberapa kemungkinan yang dapat diambil oleh pengadilan dalam menghadapi perumusan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal ialah:
- (a) Menjatuhkan pidana penjara saja;
 - (b) Menjatuhkan pidana tutupan (berdasarkan Pasal 71);
 - (c) Menjatuhkan pidana denda saja (dengan maksimum menurut kategori 5 dan minimum sebesar maksimum denda menurut kategori 3);
 - (d) Menjatuhkan “pidana pengawasan” tidak dapat dijatuhkan karena menurut Konsep delik yang diancam dengan penjara secara tunggal adalah delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun

dan menurut Pasal 72 Konsep tidak dapat dikenakan pidana pengawasan.¹¹⁶

b. Pedoman Penerapan Pidana Denda Tunggal (Pasal 55)

(1) Latar belakang pemikiran diadakannya Pasal 55 adalah:

(a). Dalam Konsep Buku II delik-delik yang hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal adalah delik-delik yang pada umumnya dipandang “sangat ringan”

(b) Karena tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dipandang sangat ringan, maka dipandang perlu memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan-tindakan tertentu saja, khususnya yang bernilai uang seperti denda. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dirumuskan Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi:

“Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan”

(2) Namun untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya pidana denda bagi orang-orang tertentu (misalnya orang yang telah berkali-kali melakukan tindak pidana yang diancam dengan denda saja atau yang telah berkali-kali dijatuhi pidana denda), maka dipandang perlu pula memberi kemungkinan

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hal 142-146.

kepada hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum 1 tahun atau pidana pengawasan ditambah pidana denda. Kemungkinan ini dirumuskan dalam ayat (2) yang berbunyi:

“Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau menjatuhkan pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda”.

Ketentuan ayat (2) di atas dapat dikatakan sebagai bentuk pengaturan yang lebih khusus dan ketentuan umum mengenai “pengulangan” yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 126 Konsep .

(3) Dengan adanya Pasal 55 di atas maka beberapa kemungkinan dapat diambil oleh pengadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal ialah:

- (a) menjatuhkan pidana denda; atau
- (b) menjatuhkan pidana tambahan saja; atau
- (c) menjatuhkan tindakan-tindakan tertentu saja; atau
- (d) untuk recidivis dapat menjatuhkan:
 - pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun, atau
 - pidana pengawasan dan pidana denda.¹¹⁷

¹¹⁷ Ibid, hal 146-147.

c. Pedoman Penerapan Pidana Alternatif (Pasal 56)

(1) Perumusan alternatif antara lain mengandung arti bahwa: hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang ditawarkan/dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.

(2) Walaupun ada sanksi yang dapat dipilih, namun adalah wajar apabila undang-undang mengingatkan hakim agar dalam melakukan pilihan itu :

- selalu berorientasi pada “tujuan pemidanaan”; dan lebih mengutamakan/mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan.

(3) Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam Pasal 56 ayat (1) Konsep dinyatakan:

“Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana penjara atau pidana denda, pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hakim berpendapat bahwa hal itu telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan”

Dalam perumusan ayat (1) di atas yang mengandung unsur imperatif, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti, jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat

menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Jadi pada prinsipnya lebih mendahulukan pidana pokok yang lebih ringan dari pada yang lebih berat.

- (4) Walaupun sistem alternatif pada dasarnya bersifat memilih salah satu, namun Konsep mengembangkan pemikiran bahwa kedua-duanya dapat dipilih. Dasar pemikirannya adalah apabila misalnya pidana penjara 6 (enam) tahun ditawarkan secara alternatif dengan pidana denda Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah). Bertolak dari pemikiran demikian, maka bobot maksimum pidana penjara 6 (enam) tahun atau denda Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) itu dipandang senilai dengan jumlah komulasi dari separo maksimum pidana penjara 3 (tiga) tahun dan separo maksimum pidana denda Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Jadi, dalam perumusan alternatif sebenarnya terkandung juga ancaman pidana secara komulatif sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari (maksimum penjara + maksimum denda).

Pemberian pidana secara komulatif sebesar separo maksimum penjara dan denda itu dikecualikan terhadap delik yang memang secara tegas diancam secara komulatif-alternatif. Atas dasar pemikiran tersebut, maka dalam Pasal 56 ayat (2) Konsep dirumuskan:

“Jika pidana penjara dan denda dicantumkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan peidanaan, kedia jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara komulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut” .

- (5) Apabila garis pemikiran di atas dilanjutkan, dengan adanya Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Konsep, pidana sebesar $\frac{1}{2}$ maksimum pidana penjara diganti dengan pidana pengawasan (yang maksimumnya 3 tahun dan $\frac{1}{2}$ maksimum pidana denda Rp 3.000.000.00) bersama-sama.

Kemungkinan demikian dituangkan dalam Pasal 56 ayat (4) yang berbunyi:

“Jika dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separo dari maksimum pidana yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan”.

Dapat dijatuhkannya pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda ini didasarkan pada pokok pemikiran, bahwa dengan pidana pengawasan saja seolah-olah ada kesan terdakwa tidak dipidana. Di samping itu, didasarkan pada pokok pemikiran penggabungan jenis-jenis sanksi yang bersifat “pidana” dengan jenis sanksi yang lebih bersifat “tindakan”. Pidana pengawasan yang disebutkan di atas merupakan jenis sanksi noncustodial yang lebih “bersifat tindakan”.

- (6) Dari uraian tersebut di atas, terlihat beberapa kemungkinan yang dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang diancam pidana secara alternatif (penjara atau denda), yaitu:

merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini, tidak harus diartikan bahwa kesejahteraan anak di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan anak atau kepentingan anak itu, pada hekatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.¹¹⁹

Berkaitan dengan hal ini Sudarto sewaktu pembahasan RUU Piradilan Anak pada Lokakarya di Semarang tahun 1977, beliau berpendapat bahwa walaupun didalam RUU disebutkan Pengadilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat, namun beliau tetap berpendapat bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.¹²⁰

Penegasan bahwa kepentingan anak harus didahulukan ditegaskan juga dalam prinsip ke 2 Deklarasi PBB mengenai hak-hak anak.

Hal yang senada juga ditegaskan dalam SMR-JJ (*Beijing Rules*), Rule 5.1. Dalam *commentary* yang terdapat dibawah Rule 5.1 disebutkan bahwa Rule 5.1 menunjuk pada dua tujuan atau sasaran yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anak. Sasaran yang pertama ini merupakan fokus yang pertama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak khususnya dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana, harus lebih menekankan atau mengutamakn kesejahteraan anak.

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, Op.Cit, hal 111.
¹²⁰ Ibid.

Ditegaskan selanjutnya bahwa prinsip ini menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum.

- b. Prinsip Proporsionalitas. Sasaran dari prinsip ini untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata. Apabila dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak, maka bertolak pada UU Kesejahteraan anak (UU No.4 tahun 1979). Maka proses peradilan anak harus juga dapat menjamin perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani maupun sosial.¹²¹

Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak ini sering terungkap dalam berbagai pernyataan antara lain:

1. Pendekatan humanistik. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai seorang yang memerlukan bantuan, pengertian, kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental, penurunan semangat serta proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak yang wajar.¹²²

¹²¹ Ibid, hal, 112-113.

¹²² Ibid, hal 114-115.

Dalam masalah ini Bagir Manan mengemukakan dasar pemikiran antara lain:

1. Dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Walaupun anak pada dasarnya dan dalam batas wajar telah menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menghadapi anak nakal, masyarakat sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggung jawab dari pada anak itu sendiri.
2. Hubungan antara orang tua dengan anak dalam kehidupan manusia merupakan hubungan yang hakiki termasuk hubungan mental psikologik maupun mental spiritual. Mengingat hakikat hubungan tersebut dalam kehidupan manusia, maka dalam menangani masalah anak harus senantiasa diusahakan agar anak nakal tidak dipisahkan dari orang tuanya. Kalau terpaksa dipisahkan, tetaplah dipertimbangkan pemisahan itu harus semata-mata demi kepentingan menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak secara sehat dan wajar.
3. Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam

peradilan anak. Secara historis pernah terjadi keterlibatan pengadilan anak dalam perkara anak tidak atau kurang ditujukan pada kepentingan anak.¹²³

Sehubungan dengan masalah ini, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa: tujuan peradilan anak bukan semata –mata hanya menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa kongkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan, atau menimbulkan perkara, atau masalah baru

Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan, oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam peradilan anak ini, janganlah hendaknya dititik beratkan kepada terbukti atau tidaknya perbuatan pelanggaran yang dilakukan. si anak.

Oleh karena itu dalam peradilan anak diperlukan kebebasan hakim dan perumusan undang-undang yang umum. Kiranya kita semua sepakat bahwa anak harus mendapat perlakuan khusus sehingga peradilan anak perlu dilakukan secara khusus pula.¹²⁴

Demikian pula dalam Konsederan huruf a UU No.3 Tahun 1997 menyatakan bahwa: Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus

¹²³ Bagir Manan, Pemikiran –Pemikiran Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak, dalam Peradilan Anak di Indonesia, Penyunting Romli Atmasasmita, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 6-7.

¹²⁴ Sudikno Mertokusumo, dalam Peradilan Anak di Indonesia, Penyunting Romli Atmasasmiita, Op.Cit, hal 51.

perjuangan yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi dan simbang.

Kiranya Bagian I *General Principles Beijing Rules* tentang batas usia pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting sebagai dasar pemikiran pemidanaan anak. Pada pokoknya menyatakan bahwa: karena latar belakang sejarah dan budaya masyarakat suatu bangsa, sering sangat berpengaruh terhadap penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana, maka pendekatan modern diterapkan pertanggungjawaban pidana atas diri anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan anti sosial. Pertanggungjawaban pidana anak ini tidak ditentukan terlalu rendah apalagi tidak ditentukan sama sekali. (*Rule 4*)

Peradilan anak sebagai bagian dari upaya pewujudan kesejahteraan anak, dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap pelaku perbuatan anti sosial, artinya tanggapan dan reaksi itu tidak saja dilandaskan pada bobot perbuatan, melainkan memperhatikan pula lingkungan anak seperti status sosial, keadaan keluarga, dan factor-faktor lain yang menjadi sebab timbulnya perbuatan anak yang bersifat anti sosial itu. Esensi yang terkandung dari ketentuan ini ialah, bahwa reaksi yang diberikan

pada perbuatan anti sosial anak hendaknya cukup adil dan dilihat kasus-perkasus perbuatan dan kejahatan yang dilakukan anak atau remaja. (*Rule 4*).¹²⁵

Dari pendapat para ahli, konsideran UU No.3 Tahun 1997 maupun dalam penjelasan umum, serta beberapa kerentuan dalam Beijing Rules, nampak bahwa dasar pemikiran penjatuhan pidana anak ditekankan upaya mewujudkan kesejahteraan anak.

E.2. Penerapan Sanksi (Pidana/Tindakan) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

Seperti telah penulis uraikan diatas, bahwa yang dimaksud dengan anak pelaku tindak pidana adalah anak nakal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 UU No.3 Tahun 1997 adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tentang kapan anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak ditentukan dengan batas umur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No.3 Tahun 1997 sebagai berikut:

¹²⁵ Paulus Hadi Suprpto, Instrumen Internasional Perlindungan Hak Anak Delinkuen, dalam Peradilan Anak di Indonesia, Penyunting Romli Atmasasmita, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 106-108.

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Penjelasan pasal 4 Ayat (1) menyebutkan sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang anak nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Batas umur 8 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak, berdasarkan pertimbangan sosilogis, psikologis, dan pedagogis bahwa, anak yang belum mencapai umur 8 tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Penjelasan Pasal 5 UU No.3 Tahun 1997 menyebutkan:

Ayat (1): Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum umur 8 tahun tetap diterapkan asas praduga tak bersalah, Penyidikan terhadap anak dilakukan untuk mengetahui apakah anak melakukan tindak pidana seorang diri atau ada unsur penyertaan dengan anak yang berumur diatas 8 tahun atau dengan orang dewasa.

Terhadap anak pelaku tindak pidana, hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32.

Dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa: Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda, atau
 - d. Pidana pengawasan (Pasal 23 ayat 2).

Selain pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23 ayat 3). Penjelasan pasal tersebut menyebutkan: Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kuasa orang tua.

Terhadap anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana dalam Pasal 23 atau tindakan yang diatur dalam Pasal 24 (Pasal 25 ayat 1).

Terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak (Pasal 1 angka 2 huruf b, hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 (Pasal 25 ayat 2).

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungan. Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pidana Penjara.

Menurut Pasal 26 ayat 1, kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama 10 tahun (Pasal 26 ayat 2).

Terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat pula dijatuhi pidana bersyarat apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 29 sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun.
2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3. Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
4. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat dengan syarat umum.
6. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 tahun
7. Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
8. Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan
9. Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pidana kurungan

Anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dapat dijatuhkan hukuman kurungan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27).

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Pidana denda.

Anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana denda yang besarnya paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat 1).

Apabila pidana denda ternyata tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 28 ayat 2).

Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja, dan lamanya latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari, serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat 3).

Dalam penjelasan pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman pidana denda bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana denda terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya

Sedang penjelasan Pasal 28 ayat 2, menyebutkan bahwa wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang selakigus untuk

mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Pidana pengawasan.

Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dapat dijatuhkan pidana pengawasan, paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun (Pasal 30 ayat 1).

Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 30 ayat 2).

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 30 Ayat 3).

Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa: yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Tindakan.

Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana sementara waktu, tidak diancam

dengan hukuman mati/seumur hidup dijatuhi sanksi, akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan.

Untuk dapat diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak, anak nakal minimum telah berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun, sementara anak yang belum berumur 8 tahun walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 tahun itu belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak, dapat diberi tindakan disertai dengan syarat- syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim, misalnya kewajiban melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk menentukan apakah anak dikenakan pidana atau tindakan, haruslah dengan mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga, keadaan penghuninya dan memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 sebagai berikut:

- a. Dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh. Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua /wali/orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di

lingkungan orang tua/wali/orang tua asuh. Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

- b. Diserahkan kepada negara. Dalam hal menurut penilaian hakim anak nakal tidak dapat lagi dilakukan pembinaan dilingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada negara. Untuk itu anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal ketrampilan kepada anak, dengan memberikan ketrampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya. Selesai menjalani tindakan itu, diharapkan mampu hidup mandiri.
- c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan dan pembinaan dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti Pesantren, panti sosial dan Lembaga Sosial lainnya. Apabila anak itu diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka harus diperhatikan agama dari anak yang bersangkutan.

Disamping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997. Teguran ini berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini, agar anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Umpama seminggu sekali, sebulan sekali atau pada hari-hari tertentu¹²⁶.

•
o

¹²⁶ Darwan Prist, Op.Cit, hal 27-29.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penerapan Sanksi (Pidana/Tindakan) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

A.1. Proses Penerapan Sanksi (Pidana/Tindakan) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penuntutan, Pemeriksaan Dalam Sidang Anak)

Pembahasan masalah ini, bertolak pada UU No.3 Tahun 1997 yang merupakan peraturan khusus bagi anak yang terlibat dalam masalah tindak pidana.

Keluarnya UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di Indonesia telah terjadi babak pencerahan bagi hukum yang mengkhususkan ketentuan dasar sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana Anak yang persuasif dan kondusif. Pengkajian dalam hal asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana semakin rasional dalam sistem politik Hukum Nasional di Indonesia¹

Bertolak dari hal tersebut diatas, pembahasan masalah ini meliputi proses penyidikan sampai pada penerapan sanksinya.

Penerapan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan dari pejabat yang berwenang mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana².

¹ Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 58.

² Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 30.

Maka penerapan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana juga merupakan proses tindakan dari penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang anak. yang diatur dalam UU No.3/1997.

A.1.1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan itu meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, penggeledahan, penangkapan, melakukan penahanan dan lain sebagainya.

Penyidikan terhadap anak nakal (pelaku tindak pidana) dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian R I atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal, kecuali dalam hal tertentu belum ada penyidik anak sesuai dengan pasal 41 (2) UU No. 3 Tahun 1997 yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan apabila perlu dapat juga meminta pertimbangan atau saran dari ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (pasal 41 ayat 3). Menurut pasal 6 UU No.3/1997, diperiksa dalam suasana kekeluargaan berarti pada waktu pemeriksaan tersangka, petugas tidak memakai toga/pakean dinas dan melakukan

pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya³

Ketentuan ini sejalan dengan Rule 12.1 *Beijing rules* yang pada prinsipnya menentukan bahwa dalam upaya memenuhi peran terbaiknya petugas polisi yang kerap atau secara khusus yang menangani remaja atau bertugas dalam pencegahan atau bertugas dalam pencegahan, dilatih khusus. Di kota-kota besar satuan polisi khusus harus dibentuk untuk tujuan tersebut. Dalam menjalankan perannya, perlunya pelatihan khusus bagi seluruh petugas penegak hukum yang berperan dalam administrasi peradilan remaja, yang terpenting mereka bertindak dengan cara hati-hati.⁴

Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan, adalah hadirnya Penasehat Hukum. Dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak tadinya pada pasal 51 ayat 4, mengatakan bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan wajib untuk mendapatkan bantuan hukum dari tingkat pemeriksaan, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Sungguh sayang ketentuan ini kemudian hilang dan diganti dengan kalimat dapat didampingi penasehat hukum

Praktek yang sekarang misalnya ada kalanya seseorang tahanan tanpa alasan hukum tidak diijinkan dikunjungi keluarganya, maupun oleh penasehat hukumnya. Ini tentu akan menimbulkan kecurigaan ada apa dibalik larangan itu? Malahan ada yang tewas ketika disidik, seperti kasus Cece Tajudin. Disamping itu karena yang disidik adalah anak, maka sebenarnya sangat penting kehadiran orang tua/ wali/orang

³ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 38.

⁴ Loebby Loqman, Bahan Kuliah Pidana Anak Tahun 2000.

tua asuhnya, agar tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri anak. Akan tetapi ketentuan mengenai hal itu di tingkat penyidikan ternyata tidak ada dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Inilah yang akan menjadi masalah dalam praktek pelaksanaan undang-undang tersebut⁵

Kewajiban mendapatkan bantuan hukum mulai dari tingkat penyidikan, sesuai dengan Rule 15.1 *Beijing rules* yang menentukan bahwa pada seluruh program penanganan remaja harus mempunyai hak direpresentasikan oleh seorang penasehat hukum bebas biaya bila terdapat ketentuan untuk bantuan demikian itu di negara yang bersangkutan⁶

Demikian pula dikatakan oleh Paulus Hadi Suprpto, bahwa anak dalam proses penyidikan dan penuntutan harus dihindarkan dari hal-hal yang merugikan anak. Kontak awal antara anak dan polisi, harus dihindarkan dari penanganan yang berupa gertakan, kekerasan, fisik dan sebagainya. Deversi (pengalihan) yang berupa mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini di semua tingkatan pemeriksaan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyidikan anak oleh polisi merupakan pangkal tolak pribadi anak ini dapat menjadi baik atau sebaliknya. Oleh karena itu diperlukan

⁵ Darwan Prinst, Op.Cit, hal. 39.

⁶ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal.120.

adanya satu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam menangani anak (Rule 10-13)⁷.

A.1.2. Penangkapan

Penangkapan, adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan adalah sebagai berikut:

a. Syarat Formal:

1. Dilakukan oleh penyidik POLRI atau oleh penyelidik atas perintah penyidik.
2. Dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari penyidik.
3. Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

b. Syarat Material:

1. Ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Bukti permulaan itu harus mengacu pada ketentuan pasal 184 KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk atau Keterangan Terdakwa. Sementara hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi.
2. Penangkapan hanya bisa dilakukan untuk paling lama satu kali 24 jam, oleh karena itu apabila tenggang waktu itu sudah terlewati 24 jam, maka penangkapan itu berubah menjadi penahanan. Agar tenggang waktu itu dapat ditaati, maka sesuai dengan ketentuan pasal 122 KUHAP dalam waktu satu

⁷ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal, 111.

kali 24 jam sejak ditangkap, tersangka wajib diperiksa oleh penyidik untuk menentukan apakah ada alasan untuk melakukan penahanan atas diri tersangka atau tidak. Penangkapan yang tidak memenuhi syarat formal dan material tidak sah, dan karenanya dapat diajukan ke praperadilan untuk menyatakan ketidaksahannya dan sekaligus memintakan ganti kerugian atas penangkapan itu⁸

3. Menurut Maulana Hassan Wadong, tugas penangkapan berbatasan dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak asasi anak, yang dapat menjadi tuntutan keadilan hukum terhadap petugas penegakan hukum dan pemerintah (lembaga kepolisian). Batas-batas toleransi terhadap tindakan-tindakan nuansa penangkapan anak yang melakukan tindak pidana menjadi subyektifitas hukum terhadap Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Ketentuan dasar hukum perlindungan anak harus dapat mengetengahkan bentuk-bentuk tindakan dan upaya rasional dan berdasarkan rasa keadilan hukum terhadap anak, masyarakat maupun bangsa dan negara.

Tindakan yang layak dari proses penangkapan anak telah dirumuskan oleh Lembaga Pra Yuwana, diisyaratkan agar penyidik yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan anak adalah POLWAN yang telah memenuhi syarat perundang-undangan. Alasan Pra Yuwana bahwa untuk memahami persoalan anak dalam kehidupan sosial dan psikologis sudah menjadi budaya, yaitu akan lebih dinamis anak-anak diurus oleh seorang ibu atau wanita. Ibu atau wanita itu dipandang sebagai subyek yang langsung secara kodrati lebih memahami masalah anak secara

⁸ Darwan Prinst, Op.cit, hal 39-41.

komprehensif. Dalam masalah psikologis saintis seperti temperamental, emosionalitas dan lingkungan sosial maupun masalah anak, dalam psikologis kontemporer seperti watak, bakat, budaya, hoby dan lain-lainnya yang menjadi eksistensi anak dalam lingkungan sosial⁹

Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak, menurut pasal 43 UU No.3/1997 menentukan bahwa, kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981). Penangkapan guna kepentingan pemeriksaan paling lama 1 (satu) hari. Wewenang penangkapan harus memperhatikan asas hukum pidana, yaitu asas praduga tak bersalah untuk dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai kelompok yang tidak mampu atau belum mengetahui tentang masalah hukum yang terjadi pada diri anak tersebut.

Hal ini sesuai dengan Rule 7.1 *Beijing rules* yang menentukan bahwa untuk penanganan remaja, pengaman prosedural seperti praduga tak bersalah, hak memberi tahu tindakan, hak diam, hak berpenasehat hukum, hak menghadirkan orang tua/wali, hak-hak meneliti saksi, dan hak banding kepewenang yang lebih tinggi, kesemuannya dijamin pada semua tahap proses peradilan¹⁰

Persoalan hukum yang timbul dari proses penangkapan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan sebagai penuntut umum dalam menggunakan upaya paksa dilakukan semata-mata harus memperhatikan pasal 16,17,18,19 KUHP, diantaranya menyebutkan:

Wewenang penangkapan.

⁹ Ibid, hal, 61-62.

¹⁰ Loebby Loqman, Bahan Kuliah Pidana Anak UNDIP Tahun 2000 .

- a. Untuk dapat menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dipersyaratkan harus ada bukti permulaan (pendahuluan) yang cukup untuk menduga orang tersebut sebagai pelaku kejahatan.
- b. Jangka waktu hanya terbatas 1 (satu) hari.

(1) Perintah penangkapan.

- a. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- b. Jangka waktunya terbatas satu hari¹¹

Bentuk dasar penahanan KUHAP tersebut diatas diperuntukkan bagi semua subyek yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum.

Jika penangkapan terhadap seorang anak, maka timbul hak-hak anak yang dilindungi. Pertimbangan yang prinsip bagi seorang penyidik dan penuntut umum sebagai upaya untuk membatasi tindakan upaya paksa, karena hukum melindungi status anak belum dewasa, sebagai unsur *ex officio* dari penyidik dan penuntut umum. Hal ini diatur dalam pasal 5 UU No.3/1997 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal anak belum mencapai 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, orang tua asuhnya.

¹¹ Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal, 42-43.

- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan¹²

Dari uraian diatas nampak adanya asas keleluasaan wewenang penyidik untuk bertindak sesuai dengan pasal 5 UU No.3/1997 khusus bagi anak yang belum mencapai umur 8 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Keleluasaan wewenang penyidik dalam pasal 5 UU No.3/1997 tidak dapat dipergunakan terhadap seorang anak yang berumur diatas 8 tahun.

Keleluasaan wewenang, menjadi asas dasar penyidik dalam hukum acara pidana: Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus, yaitu untuk mengesampingkan upaya paksa dari proses pemeriksaan penyidik terhadap anak sebagai berikut:

1. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka untuk wajib diberitahukan terlebih dahulu, baik melalui surat/maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata sebagai upaya paksa atau wewenang paksa.
3. Tersangka anak wajib mendapat bantuan hukum dengan segera dengan cuma-cuma. Dalam penangkapan penyidik dan penuntut umum harus mengikut sertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut.

¹² Maulana Hassan Wadong, Op.Cit, Hal 64-65.

4. Tersangka anak atau orang yang belum dewasa harus segera mendapat proses pemeriksaan.
5. Hak untuk mendapatkan atau menuntut ganti rugi, sebagai akibat dari kesalahan penangkapan, penahanan dan hal-hal lain yang menghilangkan penderitaan fisik dan moral anak tersebut¹³.

Ketentuan hukum acara pidana yang lain seperti penangkapan, yaitu upaya tindakan melumpuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tidak dianjurkan menggunakan alat yang terkategori sebagai pelumpuh atau alat pemaksa yang digunakan oleh rasio UU militer untuk dijadikan senjata api atau teknologi militer lainnya. Ketentuan tersebut juga dalam hal penyidik melakukan operasi disaat seorang anak tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana¹⁴

Penerapan ketentuan UU No.3/1997 dalam masalah penangkapan, nampak sejalan dengan ketentuan dalam SMR-JJ, yaitu instrumen internasional yang mengisyaratkan bahwa negara-negara anggota harus mengimplementasikan ketentuan-ketentuan SMR-JJ dalam Pengadilan Anak. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Internasional tersebut (*Beijing rules*) tentu harus melaksanakan ketentuan tersebut antara lain: Dalam hal penangkapan atau penahanan anak, orang tua atau walinya harus segera diberitahukan dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah penangkapan atau penahanan dilakukan (Rule 10.1), dan hakim atau pejabat/badan lain yang berwenang tanpa menunda-nunda waktu harus mempertimbangkan masalah pengeluaran anak dari penangkapan/penahanan (Rule 10.2). Dalam Rule 10.3 yang

¹³ Maulana Hssan Wadong, Op.Cit, hal 65-66.

¹⁴ Ibid.

terkait dengan masalah penangkapan ditegaskan bahwa, kontak antara aparat penegak hukum dengan pelanggar anak harus dilakukan dengan cara:

1. menghormati kedudukan hukum si anak.
2. memajukan kesejahteraan anak.
3. menghindari hal-hal yang merugikan (merusak) membahayakan anak..

Dalam commentary dijelaskan bahwa, hal-hal yang merugikan, merusak dan membahayakan anak merupakan kata-kata yang fleksibel dan mencakup berbagai interaksi yang mungkin terjadi misalnya menggunakan kata-kata keras (bentakan-bentakan), atau tindakan-tindakan kekerasan fisik. Hal ini dipandang sangat penting karena kontak pertama ini sangat mempengaruhi sikap anak dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya¹⁵

Dalam menangani masalah anak ditingkat awal ini SMR-JJ memandang penting adanya jaminan bagi aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain: menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. (Rule 11.1 dan 11.2 SMR-JJ). Tindakan-tindakan seperti itu diperlukan untuk menghalang-halangi akibat negatif dari proses selanjutnya antara lain, menghindari stigma dari pemidanaan. Dalam praktek tindakan-tindakan deversi itu biasanya dilakukan terhadap pelanggaran yang tidak serius. Namun dalam

¹⁵ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal, 116-117.

commentary dikatakan bahwa tindakan deversi itu tidak perlu dibatasi pada kasus-kasus ringan¹⁶

Penulis sependapat tentang pentingnya aturan yang memberikan wewenang kepada aparat yang berwenang dalam perkara pidana anak, untuk mengambil tindakan deversi tidak hanya perkara-perkara yang tidak serius saja. Hal tersebut dapat mencegah stigmatisasi dari pemidanaan yang berakibat negatif dan merugikan diri anak. Sangat disayangkan ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci dalam UU No.3/1997.

A.1.3 Penahanan

Penahanan, adalah penempatan terdakwa/tersangka di tempat tertentu (Rumah Tahanan Negara) oleh penyidik, atau penuntut umum atau oleh hakim. Untuk itu harus ada Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Penuntut Umum atau Penetapan Penahanan dari Hakim, yang ketika melaksanakan penahanan itu diserahkan kepada terdakwa/tersangka dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya¹⁷

Hal ini sesuai dengan Rule 10.1 SMR-JJ yang menentukan bahwa dalam hal dilakukan penahanan terhadap anak, orangtua/walinya harus segera diberitahukan dalam waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan atau penahanan dilakukan dan hakim atau pejabat/badan yang berwenang, tanpa menunda-nunda waktu harus mempertimbangkan masalah pengeluaran anak itu dari penangkapan/penahanan (Rule 11)¹⁸

¹⁶ Ibid, hal, 117-118.

¹⁷ Darwan Prinst, Op.Cit, hal, 41.

¹⁸ Barda Nawawi Arif, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal, 41.

Dalam hal penahanan, menurut SMR-JJ diperlakukan sama seperti halnya dalam penangkapan, yang telah penulis uraikan diatas.

Menurut pasal 44 ayat 6 UU No.3/1997, penahanan anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara atau cabang Rumah Tahanan Negara atau ditempat tertentu. Penahanan itu hanya dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak atau masyarakat. Penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Alasan penahanan demikian harus dinyatakan secara tegas dalam Surat Perintah Penahanan. Demikian pula tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa. Selama ditahan kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial anak harus tetap terpenuhi¹⁹.

Sehubungan dengan pemisahan tahanan anak dengan tahanan dewasa, Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa, apabila dalam lingkungan anak dewasa seperti sekarang ini, anak tersebut dapat mengalami perlakuan tidak wajar dari sesama tahanan orang dewasa. Apabila anak masih mempunyai perasaan sebagai anak, maka anak tersebut tidak dapat menghindarkan diri misalnya perintah-perintah orang dewasa seperti melayani kebutuhan orang dewasa tadi. Tetapi apabila anak tersebut sudah mempunyai perasaan dewasa, akan mendapat tempat dan bergaul dengan orang dewasa tadi dan tidak dapat diragukan lagi, sebagai akibat dari pergaulan tersebut akan terjadi learning proses²⁰

¹⁹ Darwan Prinst, Op.Cit, hal, 43.

²⁰ Komariah Emong Supardjaja, dalam Romli Atmasasmita, Penyunting, Ibid, hal 127-128.

Mengenai tempat khusus untuk tahanan anak, penjelasan pasal 44 ayat 6, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat khusus ialah tempat penahanan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak, yang terpisah dari orang dewasa. Apabila dalam satu daerah belum terdapat Rumah Tahanan Negara atau Cabang rumah Tahanan Negara, atau apabila di kedua tempat tahanan diatas sudah penuh, maka penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan di tempat tertentu lainnya, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemeriksaan perkara anak.

Penahanan dapat berupa:

- a. Ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dapat meliputi:
 1. Lembaga Pemasyarakatan atau;
 2. Kantor Polisi;
 3. Kantor Kejaksaan;
 4. Dan lain-lain;
- b. Tahanan Rumah.
- c. Tahanan Kota²¹

Suatu penahanan haruslah memenuhi syarat formal dan syarat material. Syarat formal untuk melakukan penahanan adalah: dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum atau hakim, Dan untuk itu dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim.

Syarat material untuk melakukan penahanan sesuai dengan pasal 21 KUHP adalah: tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

²¹ Darwan Prinst, Op.Cit, hal, 41.

permulaan yang cukup, terdakwa/tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, atau mengulangi melakukan tindak pidana yang disangkakan/didakwakan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau karena melakukan tindak pidana tertentu.. Bukti permulaan yang cukup, haruslah mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP²².

Tentang jangka waktu penahanan oleh Penyidik diatur dalam pasal 44 sebagai berikut:

- a. Penahanan oleh Penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari.
- b. Apabila jangka waktu 20 hari guna kepentingan pemeriksaan belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang paling lama 10 hari.
- c. Dalam jangka waktu 30 hari penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum Anak.
- d. Apabila dalam jangka waktu 30 hari berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum²³

Untuk mendapat gambaran yang jelas proses penyidikan, penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana, berikut penulis paparkan hasil penelitian di Poltabes Semarang.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik anak, dalam hal ini Polwan dapat difahami bahwa pada dasarnya ketentuan penyidikan menurut UU N0.3/1997, yaitu dalam pasal 41 sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

²² Ibid, hal, 41-42.

²³ Ibid, hal, 43.

Penyidikan terhadap anak nakal (pelaku tindak pidana) di Poltabes Semarang yang berjumlah 4 orang Penyidik POLWAN, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI, dan memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Disamping itu, penyidik POLWAN di Poltabes Semarang kesemuanya telah berkeluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh Pra Yuwana.

Penyidik, dalam memeriksa tersangka anak dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Penyidik tidak memakai pakaian dinas, pemeriksaan dilakukan dalam situasi yang kondusif tanpa dilakukan gertakan-gertakan., tidak ada pemaksaan baik fisik maupun psihis, apalagi sampai tindakan penganiayaan.

Penahanan anak pelaku tindak pidana oleh penyidik anak sampai berkas perkara pidana anak dilimpahkan ke kejaksaan, oleh kepolisian khususnya tahun 2002, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 44 UU No.3/1997.

Selama dalam tahanan penyidik, belum dibina secara intensif hanya sesekali dilakukan ceramah oleh pembimbing kemasyarakatan di rumah tahanan Poltabes.

Perkara-perkara anak yang ditangani oleh Poltabes Semarang selama pemeriksaan pendahuluan, tidak ada yang didampingi penasehat hukum. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian kerana pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan ini terdakwa mulai saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan didampingi penasehat hukum hak-hak tersangka lebih terjamin. Dalam wawancara penulis dengan salah seorang penyidik, untuk didampingi penasehat hukum bagi tersangka, orang tua tersangka mencari sendiri penasehat hukum, dengan biaya dari orang tua tersangka.. Sehingga orang

tua tersangka memilih tidak didampingi penasehat hukum, karena terbentur masalah biaya.

Rumah tahanan Poltabes Semarang belum ada pemisahan tahanan anak dan tahanan dewasa, hanya kamarnya saja yang dipisahkan. Hal ini yang perlu sekali mendapat perhatian karena selain pemisahan tahanan anak dan tahanan dewasa adalah ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak maupun ketentuan instrumen Internasional, akibat negatif yang perlu diperhatikan bila tahanan anak tidak dipisahkan dengan tahanan orang dewasa.

Dalam penangkapan anak oleh penyidik, prosedurnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penangkapan guna kepentingan pemeriksaan paling lama 1 hari (24 jam), Dari wawancara penulis dengan penyidik POLWAN di Poltabes Semarang, perkara pidana anak dapat diupayakan penyelesaiannya tanpa sampai proses persidangan di pengadilan.. Hal ini dapat dilakukan dalam hal tertentu, misalnya terdakwa masih sekolah, perkaranya dapat diselesaikan melalui proses sebagai berikut: Bila pelaku tindak pidana ditangkap dan diserahkan pada kepolisian, pihak orang tua terdakwa segera dihubungi oleh pihak kepolisian, agar pihak orang tua bermusyawarah dengan pihak yang dirugikan. Bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dan orang tua terdakwa sanggup mengganti semua kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan anak, pihak yang dirugikan menyatakan dalam perjanjian tidak akan mengadakan tuntutan apapun, setelah diberikan ganti kerugian. Pelaku tindak pidana juga membuat pernyataan tidak akan mengulangi melakukan perbuatan lagi. Waktu menyelesaikan perkaranya harus sesegera mungkin untuk selesai dalam waktu 1 hari

(24 jam). Jadi perkara itu diselesaikan masih dalam jangka waktu pemeriksaan penangkapan. Dengan selesainya perkara tersebut akan dikeluarkan Surat dari Ka Poltabes yang menerangkan bahwa perkaranya selesai, dengan ketentuan anak pelaku tindak pidana diwajibkan lapor ke Poltabes 1 minggu 2 kali, dilaksanakan sampai 10 kali.

Menurut penulis walaupun secara yuridis penyelesaian demikian ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun demi melindungi kepentingan anak penyelesaian semacam ini tepat dan tidak bertentangan dengan hukum, karena penyidik mempunyai kewenangan untuk meneliti perkara anak, untuk dilanjutkan atau sebaliknya dihentikan. Bila dikaitkan dengan aturan dalam *Beijing rules*, proses ini senada dengan masalah deversi yaitu pengalihan proses perkara pidana dengan proses non formal, dalam rangka melindungi anak. Karena dengan melalui proses sidang pengadilan, anak sudah mengalami stigmatisasi

Dalam melakukan penangkapan dilakukan oleh petugas lapangan, tidak dilakukan dengan kekerasan juga tidak digunakan senjata pelumpuh.

Dengan selesainya pemeriksaan setelah penangkapan selama 24 jam, sedang proses pemeriksaan belum selesai, maka perkara anak akan dilanjutkan dengan dilakukan penahanan. Tempat penahanan anak pelaku tindak pidana di Poltabes Semarang belum dapat ditempatkan ditempat tahanan khusus untuk anak. Tahanan anak di Poltabes belum dipisahkan dengan tahanan dewasa. Hal ini yang perlu sekali mendapat perhatian selain hal ini adalah ketentuan UU No.3/1997, ketentuan dalam Instrumen Internasional juga mengharuskan dipisahkannya tahanan anak dengan tahanan dewasa.

4. Semua anak yang ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi.

Dari ketentuan Pasal 45 tersebut diatas, menurut wawancara penulis dengan salah satu penyidik POLWAN, tempat penahanan anak belum dapat terlaksana untuk dipisahkan dengan tahanan dewasa

Tentang jangka waktu penahanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 44 UU No.3/1997 yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 hari
4. Dalam jangka waktu 30 hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.

Dari wawancara penulis dengan salah satu Penyidik POLWAN di Poltabes Semarang, semua perkara anak yang ditangani Poltabes Semarang, jangka waktu penahanan oleh Penyidik sampai sampai berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan, semua perkara pidana anak khususnya tahun 2002 selesai dalam jangka waktu penahanan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dari hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Namun masih ada yang belum terlaksana sepenuhnya yaitu:

1. Belum ada rumah tahanan khusus untuk anak, sehingga tahanan anak tidak dipisahkan dengan tahanan dewasa.
2. Pemberian bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana, mulai dari saat ditangkap, ditahan, sampai sidang pengadilan belum terealisasi, pemberian bantuan hukum hanya bagi terdakwa anak yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun. keatas. Itupun tergantung pada orang tuanya menginginkan didampingi penasehat hukum atau tidak Apabila orang tua terdakwa menolak, karena berkaitan dengan pembayaran biaya untuk penasehat hukum, bantuan hukum kepada terdakwa anak tidak diberikan. Dengan demikian, perlindungan anak dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, belum sepenuhnya menceminkan perlindungan anak.

A.1.4 Penuntutan

Dalam UU No.3/1997, kedudukan jaksa dalam penuntutan anak, hanya dilakukan terhadap anak nakal, dengan pengertian ditujukan kepada pengelompokan tiap-tiap anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran).

Pasal 53 UU No.3/1997 menyebutkan syarat-syarat seorang jaksa yang layak untuk menangani anak pelaku tindak pidana sebagai berikut:

1. Penuntut umum ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung;
2. Penuntut umum yang telah berpengalaman dalam menangani masalah penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

3. Penuntut umum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
4. Dalam hal-hal tertentu dapat ditugaskan kepada penuntut umum yang telah melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa²⁵.

Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum menjalankan tugasnya dalam perkara anak wajib dalam waktu secepatnya membuat Surat Dakwaan, melakukan penahanan terhadap anak sebagai penahanan lanjutan selama 10 hari, dan dapat diperpanjang 15 hari. Dalam waktu 25 hari dakwaan penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran, harus sudah dilimpahkan ke pengadilan anak. Apabila dalam waktu 25 hari pemeriksaan belum selesai, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Jaksa penuntut umum dianjurkan mengenal dasar psikologis anak pada berbagai usia atau jenjang umur dari batas bawah 0 tahun sampai batas atas 18 tahun, dimana dalam usia anak yang dikategorikan anak belum dewasa perlu mendapat ketetapan hukum yang dapat melindungi hak anak yang berhubungan dengan penuntutan.

Hak-hak anak yang perlu mendapat perhatian dalam proses penuntutan meliputi hak-hak sebagai berikut:

1. menetapkan masa tahanan anak hanya pada sudut urgensi pemeriksaan.
2. secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan negeri.

²⁵ Maulana Hssan Wadong, Op.Cit, hal, 70.

3. melaksanakan penetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi²⁶

Tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai terdakwa dilakukan oleh jaksa berdasarkan pertimbangan Surat Edaran Mahkamah agung No.3 Tahun 1959, tentang bagaimana memperlakukan sistem peradilan anak yang sebenarnya. Dalam hal jaksa melakukan tugas penuntutan yang sesuai dengan Pasal 1 Ayat 7 KUHAP, yang menyatakan bahwa: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.

²⁶ Ibid, hal, 70-71.

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 110 ayat 3: Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Pasal 138 ayat 1: Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Sebagai pedoman penuntutan dan prapenuntutan juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1959, khususnya yang mengatur sikap jaksa dalam melakukan tugas penuntutan terhadap seorang anak yang menjadi terdakwa.

Penuntut umum diwajibkan untuk mengikuti anjuran sebagai berikut:

1. Jaksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pembacaan dalam persidangan tidak boleh menggunakan toga atau pakaian-pakaian dinas masing-masing.

2. Surat dakwaan harus dibuat sederhana mungkin agar tidak menyulitkan anak untuk memahami dan mengikuti tujuan persidangan²⁷

Perlindungan tersebut diatas menimbulkan hak-hak anak pada saat pemeriksaan di kejaksaan dan pembacaan surat dakwaan di depan pengadilan. Hak-hak yang dilindungi hukum sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapat keringanan dari masa/waktu penahanan kejaksaan.
2. Hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah, atau tahanan Kota.
3. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman penganiayaan, pemerasan, dari pihak yang beracara.
4. Hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka waktu pemeriksaan dan penuntutan.
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum²⁸.

Hal tersebut diatas perlu dipaparkan secara rinci, karena dalam UU Pengadilan Anak nampaknya tidak diatur secara rinci. Dalam hal jaksa melakukan tugas penuntutan, KUHAP sebagai pedoman penuntutan dan pra penuntutan, juga harus memperhatikan ketentuan penuntutan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1959.

Ketentuan penuntutan anak yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya sejalan dengan ketentuan *Beijing Rules* antara lain ditegaskan bahwa, kontak antara aparat penegak hukum dengan pelanggar hukum dengan pelanggar anak harus dilakukan dengan cara:

1. menghormati kedudukan hukum si anak.

²⁷ Ibid, hal 71-72.

²⁸ Ibid, hal 72.

2. memajukan kesejahteraan anak.
3. menghindari hal-hal yang merugikan/merusak/membahayakan anak, misalnya menggunakan kata-kata keras (bentakan-bentakan) atau tindakan kekerasan secara fisik (Rule 10.3)²⁹

Tindakan deviasi (pengalihan) suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.³⁰

Dalam masalah penuntutan seperti halnya penahanan sementara menunggu proses pemeriksaan sidang pengadilan, SMR-JJ menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Rule 13.1 Penahanan sementara harus digunakan sebagai tindakan terakhir dan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Rule 13.2. Sejauh mungkin harus diganti dengan tindakan-tindakan alternatif lainnya, seperti pengawasan yang ketat, perlakuan/pemeliharaan yang intensif, penempatan pada keluarga, atau dalam lingkungan pendidikan atau di rumah.

Rule 13.3. Selama penahanan memperoleh semua hak dan jaminan menurut SMR-JJ

Rule 13.4. Penahanan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa dan didalam lembaga yang terpisah dari lembaga yang digunakan untuk orang dewasa.

²⁹ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 117.

³⁰ Paulus Hadi Suprpto, Op. Cit, hal 111.

Rule 13.5 Selama dalam tahanan tetap menerima asuhan, perlindungan dan bantuan individual yang diperlukan sesuai dengan jenis kelaminnya dan kepribadiannya.³¹

Dari hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, yang berkisar masalah penyidikan, penangkapan penahanan, penuntutan perhadap anak pelaku tindak pidana menurut UU No.3/1997, pada dasarnya ketentuan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik, sampai pada proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Disisi lain ketentuan-ketentuan dalam UU No. 3/1997 sejalan dengan instrument Internasional khususnya ketentuan-ketentuan dalam *Beijing rules*. Namun demikian menurut hemat penulis, masalah bantuan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 51 UU No.3/1997 yang menyebutkan bahwa, setiap anak sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum.masih kurang menjamin perlindungan anak, karena tidak ada kewajiban dari penegak hukum memberikan bantuan hukum kepada anak pelaku tindak pidana, tergantung terdakwa mau didampingi penasehat kukum atau tidak, karena hal ini menyangkut jasa penasehat hukum.

Bantuan hukum diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Untuk itu pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib memberitaukan kepada tersangka, orang tuanya, walinya, orang tua asuhnya

³¹ Darwan Prinst, Op.Cit, hal 53.

mengenai hak memperoleh bantuan hukum, Hal ini menunjukkan penghormatan harkat dan martabat tersangka.

Namun disayangkan ketentuan dalam UU No.3/1997, anak berhak mendapat bantuan hukum tidak diatur. Jadi tidak otomatis diberi bantuan hukum oleh fihak aparat penegak hukum, sehingga memungkinkan anak tidak mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu, karena mungkin tidak dapat membayar penasehat hukum, sehingga tidak didampingi penasehat hukum. Lain halnya apabila ketentuan undang-undang menyebutkan wajib diberi bantuan hukum, anak yang berperkara otomatis didampingi penasehat hukum, bahkan mereka yang tidak mampu dapat mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Untuk itu seyogyanya ketentuan wajib diberi bantuan hukum bagi anak serta pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi anak yang tidak mampu dirumuskan secara tegas dalam undang- undang, supaya lebih kuat dasar hukumnya, Disisi lain pemberian bantuan hukum terhadap anak merupakan cerminan jaminan perlindungan hukum bagi anak dalam proses pidana.

Menurut Darwan Prinst penasehat hukum bagi anak, sebaiknya juga yang mempunyai minat dan perhatian terhadap anak seperti halnya penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.

Dalam pelaksanaannya penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Semua perkara anak yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Namun demikian masih terdapat hak anak yang belum dilaksanakan yaitu:

1 Tahanan anak tidak dipisahkan dengan tahanan dewasa.

2. Bantuan hukum tidak diberikan pada anak pelaku tidak pidana.

Dengan demikian, belum sepenuhnya tahap pemeriksaan oleh penuntut umum mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

A.1.5 Pemeriksaan dalam sidang anak

Sesuai pasal 55 UU. No.3/1997. dalam perkara anak nakal penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua , wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Akan tetapi oleh karena terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.³²

Perlindungan hak-hak anak dalam proses persidangan dimulai dari penentuan hakim yang ditetapkan untuk menangani peradilan anak.

Pasal 9 UU.No.3/1997 menyebutkan bahwa hakim anak ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim anak adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak (pasal 10) UU No.3/1997.

Dalam penjelasan Pasal 10 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak adalah memahami:

³² Darwan Prinst, Op.Cit , hal, 53.i

1. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik.
2. Pertumbuhan dan perkembangan anak.
3. Memahami tata nilai yang hidup didalam masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, akan dimiliki oleh hakim anak yang sekurang-kurangnya sudah berkeluarga. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak harus lengkap dan jelas, karena menjadi pegangan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk mengusulkan hakim anak kepada Mahkamah Agung.³³

Dalam hal persyaratan hakim pada Pasal 10 huruf a. Sudigno Mertokusumo berpendapat bahwa: Tidak cukup hanya ditetapkan telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum saja tanpa ditentukan lamanya pengalaman sebagai hakim. Lima tahun kiranya sudah cukup untuk menguasai hukum acara dan hukum materiil serta menguasai variasi jenis perkara yang ditangani untuk lebih membuat percaya diri sendiri³⁴

Persyaratan bagi hakim tersebut diatas, berlaku juga bagi pejabat lain, yaitu persyaratan mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun di bidangnya, serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, Untuk itu semuanya maka yang sudah berkeluarga akan lebih memenuhi syarat.³⁵

³³ Sudigno Mertokusumo, dalam Romli Atmasasmita, Penyunting, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 52.

³⁴ Ibid, hal, 52.

³⁵ Ibid.

Dalam perkara anak, hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal, kecuali dipandang perlu untuk diperiksa oleh hakim majelis (Pasal 11 UU, No.3/19970.).

Asas hakim tunggal dalam perkara anak lebih tepat dari pada hakim majelis, karena hakim majelis memberi kesan seakan-akan mau mengeroyok si anak. Karena peradilan anak itu melibatkan kepentingan anak, maka hakim anak selalu harus didampingi psikolog anak.³⁶

Dalam hal ini, penulis sependapat selain diperiksa dengan hakim tunggal, perlunya psikolog anak mendampingi hakim dalam memeriksa perkara anak, dengan demikian hakim akan memeriksa sesuai dengan tingkat perkembangan kejiwaan anak, karena anak memang mempunyai karakter yang khusus. Namun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis (Pasal 11 ayat 2). Yang dimaksud dengan hal tertentu dalam penjelasan Pasal 11 ayat 1, adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 tahun dan sulit pembuktiannya.

Keutamaan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dalam hal perkara anak sebelum sidang dibuka atau dimulai, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak, Petugas pembimbing kemasyarakatan ditentukan oleh Departemen kehakiman, yang bertugas mulai dari penyidikan sampai pada penuntutan, persidangan dan pemasyarakatan anak, atau berdampingan dengan penyidik, penuntut umum, hakim

³⁶ Ibid.

dan lembaga pemasyarakatan anak dimana pada setiap tingkatan pemeriksaan, pembimbing kemasyarakatan harus melaporkan hasil penelitiannya terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran. Dari hasil penelitian tersebut maka pada tiap-tiap tingkatan pemeriksaan, tindak pidana dan pelanggaran yang dilakukan anak, dapat dihentikan atau sebaliknya pemeriksaan diteruskan

Masa penahanan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran dibatasi 15 hari, dapat diperpanjang 30 hari, apabila dalam waktu 45 hari pemeriksaan sidang perkara anak belum selesai maka anak tersebut harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Urgensi tindakan pembatasan waktu pemeriksaan tersebut mengingat bahwa anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum pada saat pemeriksaan.

Hak-hak tersebut ialah:

- a. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapat penasehat hukum.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah, dan lain-lainnya).
- d. Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang probation, sosial worker.
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian terhadap perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan/penahanan/penuntutan/pemeriksaan tanpa putusan perkara pra peradilan.

f. Hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatan terhadap kasus yang melibatkan dirinya.

g. Hak untuk mendapat proses persidangan tertutup.³⁷

Dibandingkan dengan ketentuan perlindungan anak yang tercantum dalam KUHP, ketentuan perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam UU No.3/1997 lebih baik. UU No.3/1997 mengenal asas/prinsip sidang anak yaitu:

- a. Adanya pembatasan usia anak dibedakan atas kelompok 8 tahun kebawah, usia 8 tahun sampai 12 tahun, dan usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun.
- b. Adanya pembatasan masalah anak yang dapat disidangkan dalam sidang anak, hanyalah anak nakal. Yakni yang berusia 8 tahun sampai dengan 18 tahun yang melakukan tindak pidana.
- c. Ditangani oleh pejabat/aparat /penegak hukum yang khusus.
- d. Dilibatkannya pembimbing kemasyarakatan.
- e. Dilibatkannya organisasi sosial kemasyarakatan.
- f. Suasana kekeluargaan dalam sidang anak.
- g. Adanya keharusan pemisahan (*splitsing*) dalam hal terjadi perbuatan pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau militer.
- h. Sidang anak diperiksa dalam sidang tertutup.
- i. Sidang anak diperiksa dengan hakim tunggal.
- j. Masa penahanan lebih singkat.
- k. Ancaman hukuman lebih ringan.
- l. Tidak dibolehkan hukuman mati atau seumur hidup bagi anak nakal.

³⁷ Maulana Hassan Wadong, Op.Cit, hal 75-76.

- m. Sanksi bagi anak nakal bisa berupa pidana atau tindakan
- n. Wajib mendengarkan pihak tertentu.
- o. Dikenal adanya petugas kemasyarakatan.³⁸

Ketentuan dalam UU No.3/1997 khususnya yang mengatur proses pemeriksaan pengadilan sebagaimana telah diuraikan diatas nampaknya sejalan dengan ketentuan SMR-JJ antara lain:

Dalam proses adjudikasi dan disposisi, karakteristik yang berorientasi pada perlindungan anak adalah penentuan dengan tegas pihak-pihak yang berwenang, misalnya pemberian kesempatan kehadiran orang tua, wali atau penasehat hukum. Di dalam proses adjudikasi dan disposisi, mempertimbangkan sebaik-baiknya laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak beserta jenis-jenisnya. (Rule 14-18).³⁹

Dalam masalah ini, hal lain yang diatur dalam SMR-JJ menegaskan pula bahwa, dalam kasus anak tidak dilakukan deviasi berdasarkan ketentuan Rule 11, maka anak harus ditangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (Rule 14.1).

Hal lain ditegaskan pula bahwa, proses pemeriksaan harus bersifat kondusif bagi kepentingan anak yang terbesar dan dilakukan dalam suasana pengertian, sehingga anak dapat berpartisipasi dan memberikan pernyataan secara bebas (Rule 14.2).

³⁸ LAAI, Newsletter Advokasi No.11/1997, dalam Muhammad Joni, Zulchaena Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak anak, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 94-95.

³⁹ Paulus Hadi Suprpto, Op.Cit, hal 112.

Kemudian mengenai bantuan hukum dan kedudukan orang tua/wali, SMR-JJ menegaskan:

1. Selama proses persidangan anak berhak menggunakan/meminta bantuan hukum secara gratis apabila ada ketentuan demikian di negaranya (Rule 15.1). Penasehat hukum dan bantuan hukum dengan cuma-cuma diperlukan untuk menjamin bantuan hukum bagi anak. Sedang hak orang tua/wali untuk berpartisipasi dalam proses persidangan harus dilihat sebagai bantuan psikologis dan emosional bagi anak.
2. Orang tua atau wali berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemeriksaan dan dapat diwajibkan untuk hadir oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan anak, sebaliknya merekapun dapat ditolak untuk berpartisipasi apabila ada alasan demi kepentingan anak (Rule 15.2).

Lebih lanjut, sebelum mengambil keputusan akhir untuk pemidanan SMR-JJ menegaskan perlunya diteliti secara tepat laporan penelitian sosial mengenai latar belakang kehidupan dan keadaan-keadaan dimana anak tinggal atau keadaan yang menyebabkan tindak pidana dilakukan (Rule 16.1).

Dari uraian diatas nampak bahwa perlindungan anak dalam proses pemeriksaan pengadilan sejalan dengan ketentuan dalam SMR-JJ. Hanya dalam beberapa hal tidak diatur secara tegas dalam UU No.3/1997, misalnya hak didampingi penasehat hukum dalam UU No.3/1997 tidak diatur secara jelas. Dalam UU No.3/1997 tidak mengatur secara jelas hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, hal mana sangat penting bagi tersangka yang tidak

mampu. SMR-JJ mengatur secara jelas hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdawa anak.

Demikian pula masalah deversi (pengalihan) yaitu proses pengalihan dari proses pidana menuju proses pelayanan sosial tidak nampak dalam UU No.3/1997. Hal ini penting untuk menghindari anak terlibat dalam proses peradilan.

Membahas hak anak dalam proses peradilan selain terkait dengan *Beijing rules*, berkaitan erat pula dengan dengan instrument Internasional yang tertuang dalam Resolusi PBB 45/113 (*United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*). Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa resolusi ini merupakan:

- a. Resolusi pemantapan standar minimum bagi perlindungan anak dari semua bentuk perampasan kemerdekaan, yang dilandasi pada hak-hak asasi manusia dan menghindarkan anak dari semua bentuk penahanan demi tercapainya pengintegrasian anak kedalam masyarakat. Resolusi ini diterapkan secara utuh tanpa adanya diskriminasi dan tetap menghormati moral yang dimiliki anak. Resolusi ini direncanakan sebagai acuan baku para profesional yang terlibat dalam penyelesaian sistem peradilan anak, kaidahnya dibuat siap pakai dimasukkan dalam sistem perundang-undangan negara-negara anggota.
- b. Pengimplementasian resolusi ini hendaknya tetap mengacu pada ketentuan *Beijing rules*. Maka perampasan kemerdekaan anak hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam waktu minimal dan untuk kasus-kasus tertentu saja. Anak menurut resolusi ini, ialah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, batas usia minimal untuk seseorang dapat dijatuhi pidana

perampasan kemerdekaan ditentukan oleh undang-undang. Perampasan kemerdekaan berarti setiap bentuk penahanan atau penempatan anak dalam Lembaga Koreksi, di mana anak tidak boleh meninggalkan tempat itu atas kehendak sendiri, atas dasar perintah Lembaga Pengadilan, Administratif atau lembaga publik lainnya.

- c. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hendaknya tetap memperhatikan penghormatan hak asasi anak, pemberian kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan *self respect* anak serta mendukung usaha pengintegrasian kembali ke masyarakat.
- d. Anak yang ditahan menunggu persidangan hendaknya tetap dianggap tak bersalah. Penahanan jenis ini hendaknya dihindarkan dan dibatasi untuk kasus tertentu. Bilamana penahanan tetap dikenakan, maka pengadilan anak dan badan-badan penyelidikan harus memberikan prioritas utama pemrosesan kasusnya. Anak dalam status ini harus dipisahkan dengan anak-anak yang berstatus pelaku kejahatan, dan didampingi penasehat hukum secara gratis yang dapat berkomunikasi secara teratur dan dijamin privacynya.
- e. Rekaman (*record*) yang berisi laporan tentang diri anak harus dibuat dan ditempatkan dalam arsip perorangan yang dirahasiakan.
- f. Catatan tentang latar belakang kejiwaan anak dan sosial anak yang berpengaruh pada perilaku anak harus segera dilakukan dalam rangka penahanan, jenis dan tingkat perlakuan serta penyusunan program yang sesuai dengan kondisi anak.
- g. Perampasan kemerdekaan anak harus dilandaskan pada pertimbangan yang masak setelah memperhatikan status, umur, personalitas, jenis kelamin, tipe

pelanggaran, kondisi fisik, dan kejiwaan anak. Penempatan anak dalam tahanan harus dipisahkan dengan orang dewasa.

- h. Anak berhak untuk diuji kesehatannya oleh dokter dalam rangka untuk memperoleh rekaman kebutuhan pelayanan kesehatan yang diperlukan,
- i. Penggunaan alat-alat paksaan fisik untuk tujuan apapun dilarang. Petugas dilarang menggunakan senjata, kecuali apabila semua gagal penggunaan alat-alat paksaan fisik harus tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perlu diingat bahwa penggunaan alat-alat paksa fisik itu tidak boleh berakibat terhinanya anak, dibatasi untuk waktu tertentu saja⁴⁰.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas proses pemeriksaan sidang pengadilan anak, akan penulis paparkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

Dari wawancara penulis dengan 4 orang hakim anak di Pengadilan Negeri Semarang, dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan di Sidang Anak P.N. Semarang dapat dikatakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak walaupun belum sepenuhnya.

Proses persidangan dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Dalam sidang perkara anak nakal, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/wali/orang tua asuhnya, wajib hadir di sidang anak. Dari hasil wawancara penulis, dengan hakim anak, kehadiran orang tua terdakwa mempunyai peran yang sangat penting, karena orang tua yang paling memahami tentang anak, untuk ditanya oleh hakim mengapa anak sampai

⁴⁰ Paulus Hadi Suprpto, Op.Cit, hal 115-121.

melakukan kejahatan, dan bagaimana mendidik anak Penulis sependapat perlunya anak didampingi oleh orang tuanya dalam pemeriksaan sidang. Hal ini dikatakan juga oleh Barda Nawawi Arief bahwa selama masih berstatus anak dalam segala hal yang orang tua lah yang paling bertanggung jawab.⁴¹ Sedang dalam SMR –JJ Rule 15.2. hak orang tua/wali untuk mendampingi anak, harus dilihat sebagai bantuan psikologis dan emosional bagi anak.

Aparat penegak hukum tidak memakai toga/pakaian dinas. Karena yang di periksa adalah anak dengan diperiksa oleh aparat yang tidak memakai toga/pakaian dinas, anak tidak merasa takut, sehingga anak dapat menjawab pertanyaan dengan bebas

2. Hakim anak yang menyidangkan perkara anak kesemuanya adalah hakim anak yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Hakim anak di Pengadilan Negeri Semarang yang menyidangkan perkara anak yang berjumlah 4 orang, semua telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung, dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang .

⁴¹ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 120.

3. Sebelum sidang dibuka, Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak yang bersangkutan. Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka, agar hakim cukup waktu untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. Namun menurut penulis, hasil penelitian Bapas hanya sebatas pertimbangan saja, dari kasus yang telah diputus oleh PN Semarang yang penulis teliti, nampaknya dari pihak BAPAS sendiri ada yang tidak memberikan saran penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hanya dari keyakinan hakim sendiri. Kiranya akan lebih tercapai sasaran perlindungan anak, apabila ada pedoman pemidanaan yang dirumuskan dalam UU No.3/1997. Hal ini disetujui oleh 3 orang hakim atas pertanyaan penulis tentang perlunya pedoman pemidanaan bagi anak dirumuskan dalam undang-undang, supaya ada kekuatan mengikat. Berbeda sifatnya dengan pertimbangan BAPAS yang tidak bersifat mengikat.
4. Sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali/orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan. Sidang dilakukan tertutup untuk melindungi kepentingan anak. Sidang tertutup akan memungkinkan pemberitaan tentang perkaranya terbatas. Secara psikologis pemberitaan yang meluas, akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Tentang bantuan hukum, di PN. Semarang khususnya dalam tahun 2002, sidang perkara anak tidak ada yang didampingi penasehat hukum. Hal ini disebabkan pemberian bantuan hukum harus diusahakan sendiri oleh orang tua terdakwa.

Menurut informasi dari hakim, tidak didampinginya penasehat hukum karena harus membayar biaya penasehat hukum. Bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman pidana selama 5 tahun keatas, ditanya akan didampingi penasehat hukum atau tidak. Kalaupun pihak orang tua menolak didampingi penasehat hukum juga tidak didampingi penasehat hukum, Penasehat hukum dengan cuma-cuma jarang sekali diberikan kepada terdakwa anak. Menurut hemat penulis masalah bantuan hukum ini perlu sekali mendapat perhatian. Tidak hanya bagi tersangka yang diancam pidana 5 tahun keatas, seyogyanya bantuan hukum diberikan pula pada anak walaupun ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Keharusan anak didampingi penasehat hukum, Paulus Hadi Suprpto antara lain menyatakan bahwa, menurut Pasal 40 Konvensi hak anak, antara lain demi kepastian hukum dan mencegah terjadinya penundaan penanganan oleh lembaga yang berkompetensi, bebas tak memihak atau lembaga yudisial dalam kerangka pemeriksaan yang fair sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴²

5. Sidang perkara anak disidangkan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal perkara yang sulit pembuktiannya dapat ditetapkan untuk disidangkan dengan hakim majelis. Dalam hal ini, penulis sependapat bahwa perkara anak disidangkan dengan hakim tunggal, hal ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Komariah Emong Supardjaja bahwa sidang anak dengan hakim majelis seolah-olah anak dikeroyok. Sedang dalam hal-hal tertentu dapat ditetapkan dengan hakim majelis. Dalam hal-hal tertentu sebagai contoh dalam hal-hal perkara yang sulit pembuktiannya, menurut hemat penulis perlu hakim

⁴² Paulus Hadi Suprpto, Op.Cit, hal 95.

majelis, untuk memberikan pertimbangan bersama-sama dalam upaya memberikan keputusan yang paling tepat bagi anak yang mencerminkan perlindungan anak, sesuai dengan tujuan peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

6. Jangka waktu penahanan untuk menunggu persidangan anak, di PN Semarang semua perkara pidana anak dapat diselesaikan tepat waktunya. Penahanan selama 15 hari, apabila belum dapat diputus diperpanjang 30 hari. Jadi dalam waktu 45 hari semua perkara anak yang disidangkan di Pengadilan negeri khususnya dalam tahun 2002, dapat diputuskan sanksi yang dikenakan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Sehubungan dengan batasan waktu penahanan selama 45 hari untuk pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan pengertian dalam waktu 45 hari harus ada keputusan pengadilan. Apabila dalam waktu 45 hari belum ada keputusan, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dari hasil wawancara penulis dengan 4 orang hakim anak, terdapat perbedaan pendapat. Seorang hakim anak mengatakan dalam waktu 45 hari dirasa tidak cukup untuk memberikan putusan yang benar-benar mencerminkan keputusan yang seadil-adilnya. Sangat terburu-buru untuk dapat memutuskan perkara dalam waktu 45 hari, khususnya dalam perkara yang sulit pembuktiannya. Namun dalam prakteknya hakim tersebut tetap dapat menyelesaikan perkara tepat pada waktunya. Sedang 3 orang hakim anak yang lain berpendapat batasan waktu yang ditetapkan selama 45 hari menurut undang-undang sudah cukup. Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, khususnya perkara anak yang diputus tahun 2002 semua dapat selesai dalam waktu kurang dari 45 hari.

Menurut hemat penulis, batasan waktu menurut undang-undang selama 45 hari untuk menyelesaikan perkara di pengadilan sampai pada putusan hakim sudah memadai. Hal ini, sebagai upaya merealisasi asas peradilan cepat, tepat dan biaya ringan.

Dari uraian diatas, menurut hemat penulis proses persidangan anak di PN Semarang pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun masih terdapat hal-hal yang belum terlaksana yaitu:

1. Tahanan anak dalam menunggu sidang tidak dipisahkan dengan tahanan dewasa
2. Dalam pemeriksaan sidang anak tidak diberi bantuan hukum.

Dengan demikian perlindungan anak dalam proses pemeriksaan sidang, belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Setelah diuraikan proses peradilan mulai dari pemeriksaan oleh penyidik sampai pemeriksaan di sidang anak, yang terungkap bahwa pada dasarnya dalam proses peradilan, belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut penulis paparkan penerapan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas penerapan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana, akan dipaparkan putusan PN. Semarang tentang perkara pidana anak khususnya tahun 2002. yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap..

Dari hasil studi dokumentasi yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang, seluruh perkara pidana anak yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sejumlah 23 perkara pidana anak yang telah diputus oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Semarang, 22 perkara anak dijatuhi putusan pidana penjara, 1 perkara diputus dengan dijatuhi putusan diserahkan kepada Negara menjadi Anak Negara. Berkaitan dengan hal ini, dalam Harian Kompas 18 September 2003 antara lain dimuat bahwa: Di Indonesia khusus mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum karena kejahatan atau kriminal ringan seperti pencurian, perkelaian, dan narkoba, data Direktorat Jendral Pemasyarakatan Depkeh dan HAM Tahun 2002 menunjukkan jumlah yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah 3.722 anak. Mereka tersebar di 13 LP yang ada di seluruh Indonesia⁴³. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman penjara masih menjadi pilihan utama bagi hakim anak dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia. .

. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas putusan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang akan penulis paparkan Putusan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2002 sebagai berikut:

⁴³ VIN, Segera Benahi Sstem Pengadilan Anak, Harian Kompas, 18 September 2003.

DAFTAR KEPUTUSAN PN. SEMARANG
TENTANG PIDANA/TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
TAHUN 2002

NO	NOMOR PERKARA	DASAR HUKUM PEMIDANAAN	PUTUSAN HAKIM
1	2	3	4
1.	34/Pid B 2002/PN Smg. Umur 16 Tahun	Psl. 363 (1) ke 3, 4, 5, KUHP; Pencurian dengan pemberatan	Tanggal 14-2-2002. Pidana penjara 4 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
2.	80/Pid B/2002/PN Smg. Umur 14 tahun	Pasal 2 (1) UU Drt No.12/1951; Membawa senjata tanpa ijin.	Tanggal 13-2-2002; Pidana penjara 2 bulan 15 hari. dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
3.	81/Pid B/2002/PN Smg Umur 15 tahun	Pasal 2 (1) UU No.12/Drt/1951; Membawa senjata tajam tanpa ijin.	Tanggal 28-1-2002 Pidana penjara 2 bulan 15 hari dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
4	82/Pid B/2002/PN Smg. Umur 15 tahun.	Pasal 2 (1) UU Drt No.12/1951; Membawa senjata tajam tanpa ijin	Tanggal 28-1-2002 Pidana penjara 3 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
5	155/Pid B/2002/PN Smg Umur 16 tahun	Pasal 368 (1). 2 KUHP Tidak pidana pemerasan	Tanggal 1-4-2002 Pidana penjara 6 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
6	165/Pid B/2002/PN Smg Umur 16 tahun	Pasal 170 (1).2.3 KUHP Kekerasan yang mengakibatkan kematian orang lain.	Tanggal 4-4-2002 Pidana penjara 10 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
7	202/Pid B/2002/PN Smg Umur 17 tahun	Pasal 170 (2).3 KUHP atau Pasal 351 (3) KUHP jo Pasal 51 (1) ke 1 KUHP Dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan menyebabkan matinya orang lain.	Tanggal 13-5-2002 Pidana penjara 8 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.

8	205/Pid B/2002/PN Smg Umur 15 tahun	Pasal 363 (1) ke 3, ke 5 KUHP pencurian dengan pemberatan	Tanggal 22-4-2002 Diserahkan kepada negara, untuk menjadi anak negara
9	219 /Pid B/2002/PN Smg Umur 16 tahun	Pasal 365 (1) ke 1,2,3 KUHP Pencurian berlanjut dengan ancaman kekerasan.	Tanggal 12-4-2002 Pidana penjara 2 tahun dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
10	225/Pid B/2002/PN SMG. Umur 16 tahun	Pasal 363 (1) Ke 4 dan.5. jo Pasal 64 (1) KUHP.	Tanggal 7-5-2002. Pidana penjara 3 bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan
11	233/Pid B/2002/PN Smg Umur 16 tahun	Pasal 362 KUHP Kejahatan pencurian	Tanggal 21-5-2002 Pidana penjara 2 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan, memerintakan supaya barang bukti uang tunai 91 ribu rupiah dirampas untuk negara.
12	238/Pid B/2002/PN Smg Umur 14 tahun	Pasal 363 (1) ke 4 KUHP Pencurian dalam keadaan memberatkan.	Tanggal 25 – 7- 2002 Masing-masing pidana penjara 4 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
13	239/Pid B/2002/PN Smg Umur 17 tahun.	Pasal 303 (1) ke 1 KUHP; Subsidier Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Dengan sengaja tanpa hak, tanpa ijin menawarkan kupon judi	Tanggal 21-5-2002 Pidana penjara 4 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan. Memerintakan barang bukti berupa uang tunai Rp.91.000 10 bendel kupon dirampas untuk dimusnahkan.
14	336/Pid B/2002/PN Smg Umur 17 tahun	Pasal 78 (1) UU No.22/1997 Tanpa melawan hukum menguasai narkoba gol I. Pasal 62 UU No,5/1997 Tanpa hak melawan hukum membawa psikotropika	Tanggal 23-7-2002, Pidana penjara 4 bulan 15 hari dipotong selama masa terdakwa dalam tahanan. Pidana denda Rp.2000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 1

			bulan. Memerintahkan barang bukti untuk dimusnahkan.
15	343/Pid B/2002/PN Smg Umur 15 tahun	Pasal 289 KUHP subsidier Pasal 290 ke 2 KUHP Melakukan perbuatan cabul.	Tanggal 9-8-2002. Pidana penjara 1 tahun dengan perintah tidak dijalankan, kecuali ditentukan lewat masa percobaan 2 tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
16	358/Pid B/2002/PN Smg Umur 15 tahun	Pasal 290 (2) KUHP 70 Pasal 64 (1) KUHP Pencabulan berlanjut	Tanggal Pidana penjara 6 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
17	499/Pid B/2002/PN Smg Umur 16 tahun	Pasal 351 (1) KUHP. Tindak Pidana penganiayaan	Tanggal 27-10-2002. Pidana penjara 4 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
18	512/Pid B/2002/PN Smg Umur : 16 tahun	Pasal 362 KUHP; Pencurian	Tanggal ; 3-10-2002 Pidana penjara 3 bulan, dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
19	568/Pid B/2002/PN Smg Terdakwa I Umur : 17 tahun. Terdakwa II Umur : 16 tahun	Pasal 363 (1) ke 1.2. 4 KUHP. Pencurian khewan	Tanggal ;21-11-2002 Masing-masing ,Pidana penjara 4 bulan dipotong selama waktu terdakwa dalam tahanan.
20	569/Pid B/2002/PN Smg Umur: 18 tahanan	Pasal 363 (1) ke 2, ke 4 KUHP; Pencurian khewan	Tanggal ; 29-11-2002. Pidana penjara 4 bulan dipotong selama masa terdakwa dalam tahanan
21	570/Pid B/2002/PN Smg Umur : 17 tahun	Pasal 289 Subsidier Pasal 290 ke 2 KUHP; Perbuatan cabul.	Tangga 29-11-2002 Pidana penjara 4 bulan dipotong selama masa terdakwa dalam tahanan
22	571/Pid /2002/PN Smg Terdakwa I	Pasal 289 KUHP, Subsidier Pasal 290 KUHP.	Tanggal 20-12.2002 Masing-masing di pidana

	Umur : 17 tahun Terdakwa II Umur : 16 tahun		penjara 6 bulan dipotong selama masa terdakwa dalam tahanan
23	610/Pid B/2002/PN Sng Terdakwa I. Umur 17 tahun. Terdakwa II Umur : 16 tahun	Pasal: 170 (2) ke 1 KUHP.	Tanggal 24-11-2002 Terdakwa I dipidana penjara 2 bulan dan Terdakwa II dipidana penjara 1 bulan 15 hari dipotong selama terdakwa dalam tahanan.

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan, sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah.

Hal ini nampak dari putusan hakim anak di Pengadilan Negari Semarang, walaupun terhadap anak pelaku tindak pidana sudah ada peraturan khusus bagi anak dalam proses peradilan (UU No.3/1997), pidana penjara masih menjadi jenis pidana yang utama bagi anak pelaku tindak pidana. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Surya Candra dalam Seminar Implementasi UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Jakarta 17 September 2003, terungkap berbagai problem yang muncul dalam penanganan anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum, antara lain: Maksud UU Pengadilan Anak adalah melindungi dan membina anak secara layak agar mereka tumbuh secara wajar dan nantinya menjadi orang yang baik serta berguna bagi masyarakat. "Memang ada kata pengadilan yang berkonotasi adanya kesalahan yang dilakukan anak, namun UU ini berangkat dari konsep bahwa kenakalan anak yang kadang sampai menjurus pada perbuatan kriminal haruslah

diadili sesuai dengan prinsip pendidikan dan pembinaan anak⁴⁴ Dari ungkapan yang dikemukakan Surya Cadra, menurut penulis problem yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum, dalam penanganannya pengadilan berkonotasi adanya kesalahan, sehingga putusan hakim akan mengarah dikenakan pidana penjara, yang kurang sesuai dengan tujuan UU No.3 Tahun 1997.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan, akan penulis angkat beberapa putusan Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana serta dasar pertimbangannya sebagai berikut:

1. Putusan PN No.81/Pid./B/2002/PN.Smg

Dalam Putusan ini terdakwa Eko Adrianto Bin Much Human; Umur 15 tahun. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam (Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/Drt/1951).

Terdakwa berada dalam tahanan sejak 23 Februari 2002. Pengadilan Negari tersebut:

- Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan.
- Telah memperhatikan pelimpahan perkara dari jaksa PU 28 Januari 2002;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengarkan tuntutan jaksa PU yang pada pokoknya membuat tuntutan agar supaya Pengadilan memutuskan sebagai berikut:
 - Kepada terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan.
- Barang bukti berupa sebuah benda dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan terdakwa ongkos perkara sebesar Rp.500.

⁴⁴ Ibid.

Telah mendengar duplik atau pembelaan dari terdakwa atau permohonan dirinya agar dibebaskan atau dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut (lihat surat dakwaan) yang intinya tidak ditulis dalam putusan namun dianggap sudah termuat didalamnya.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya jaksa PU telah mengajukan barang bukti berupa sebuah sangkur (bendo).

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti tersebut diatas telah pula didengar saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, atau dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Warun Bin Yosodirejo,
2. Sugiyanto;
3. Risqi Arianto.

Ketiganya keterangan dibacakan dipersidangan,
Irwan Subekti.

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan kenal baik dengan terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu 22 Desember 2001 sekitar pukul 22.30 WIB, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terbukti membawa senjata tajam dengan terdakwa dan satu teman lagi bernama Fajar Purwanto, lalu diperiksa di Poltabes Semarang.

Bahwa benar senjata tajam diberi dari Eko Adriyanto untuk menakut-nakuti orang yang telah memukul temannya.

Fajar Purwanto.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2001 sekitar pukul 22.30 WIB kami bertiga telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam dari Eko Adrianyanto untuk menakut-nakuti orang yang telah memukul temannya. Pokoknya keterangan saksi selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang, namun selengkapnya dianggap termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya terdakwa memberi keterangan sebagai berikut: bahwa terdakwa mengakui semua dakwaan dan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa terdakwa selama dipersidangan bersikap sopan dan berterus terang, dan selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang akan tetapi selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan dipersidangan dan ternyata saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur diatas, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh sebab itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka harus pula dibebani membayar ongkos perkara.

Namun sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa masih usia muda untuk diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.

Memberatkan:

- Perbuatannya meresahkan masyarakat;
- Mengingat ketentuan hukum dan Undang-Undang terutama Pasal 2 ayat (1) UU No.12/1951.

Mengadili;

- Menyatakan terdakwa Eko Adriyanto Bin Much Human, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam.
- Menghukum oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 bulan 15 hari;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara Rp 500.

Selanjutnya hakim memberikan kepada terdakwa segala sesuatu yang menjadi haknya, yaitu untuk menerima atau menolak putusan. Banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 7 hari.

Untuk mengkaji apakah putusan Hakim ini sudah menceminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana, perlu kiranya penulis ungkapkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Semarang, karena hasil penelitian ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi.

Laporan Penelitian BAPAS.

I. Identitas :

Nama : Eko Adriyanto.

Umur : 15 tahun.

Agama : Islam.

Pendidikan : Pelajar SMP kelas III.

Masalahnya.

Klien telah melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) UU No.12 /1951 yaitu membawa senjata tajam tanpa ijin.

II. Kronologisnya.

Pada tanggal 22 Desember 2001 lebih kurang jam 23.30. malam, klien bersama 2 orang temannya sepulangnya dari Simpang Lima, tiba-tiba timbul niat untuk menodong di daerah Bergoto, masing-masing membawa senjata tajam (berupa bendo) yang dibawa dari rumah, tujuannya untuk menakut-nakuti korban..

Menurut pengakuan klien bendo tersebut ditemukan disekitar pasar Jati Ngaleh kemudian dibagikan kepada temannya (Irfan Subekti). Waktu itu yang menjadi sasaran adalah seorang perempuan yang sedang berjalan-jalan dengan pasangannya di daerah Bergota. Tetapi niat itu gagal karena salah seorang korban

lapor ke Satpam RS Karyadi. Tidak berapa lama klien bertiga ditangkap dan diserahkan pada Poltabes Semarang.

1. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya:

- a. Dirinya ditahan oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibatnya tidak bisa berkumpul dengan keluarganya.
- b. Orang tua: Pihak orang tua sangat kaget dan ibunya jatuh sakit setelah mendengar anaknya ditahan oleh yang berwajib.
- c. Pihak masyarakat: Masyarakat dimana nenak bertempat tinggal tidak terpengaruh perbuatan klien, karena dilingkungan setempat klien sebagai pendatang baru yang beradat istiadat baik.

2. Latar belakang perbuatannya.

Perbuatan klien dilakukan karena pengaruh pergaulan dan untuk mendapatkan uang dengan jalan pintas untuk bersenang-senang, tanpa memikirkan akibatnya.

III. Riwayat hidup klien.

Klien anak pertama pasangan Bapak Human dan Ibu Siti Komariah. Ia dilahirkan normal dengan pertolongan seorang bidan. Hingga saat ini klien masih diasuh oleh kedua orang tuanya. Klien sekolah secara wajar dari SD, SMP, ikut ibu di Temanggung. Semenjak kelas III SMP klien malas masuk sekolah. Klien lebih sering berada di Semarang (ikut ayah yang menumpang di rumah nenek). Di Semarang hidup klien tidak teratur. Menurut klien sering ngamen di Bis Kota dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Berawal dari ngamen klien kenal

dengan anak jalanan, sehingga klien terpengaruh. Klien baru kali ini berurusan dengan yang berwajib.

IV. Pandangan hari depan.

Setelah masalahnya selesai nanti, klien ingin pulang ke rumah orang tuanya di Temanggung dan ingin melanjutkan sekolah lagi.

V. Keadaan keluarga .

a. Riwayat perkawinan.

Sejak tahun 1986 perkawinan bapak dan ibunya dilakukan atas dasar mencintai, dan dikaruniai 4 orang anak. Sejak inilah hidupnya rukun.

b. Hubungan sosial keluarga.

Hubungan antara suami dan isteri kurang harmonis. Ayah tinggal di Semarang dan ibu di Temanggung. Seminggu sekali ayah pulang. Pengawasan anak diserahkan kepada ibu.

c. Hubungan sosial keluarga dengan lingkungan.

Hubungan antara nenek, ayah dan lingkungan dapat berjalan dengan wajar. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan.

d. Keadaan rumah.

Rumah milik sendiri kakek dan neneknya sejak tahun 1976 berukuran 9 x 16m, dinding dari tembok dan kayu, lantai plester, penerangan listrik.

e. Keadaan ekonomi keluarga.

Keadaan ekonomi keluarga tergolong sedang saja, Kakek bekerja sebagai reparasi barang elektronik. Nenek tidak bekerja, dibantu oleh anak tertuanya.

f. Lingkungan masyarakat.

Lingkungan masyarakat yang ditempati keluarga nenek perkampungannya sangat padat penduduknya.

VI. Tanggapan .

Klien

Menyesali perbuatannya, klien berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan akan sekolah lagi.

Keluarga.

Nenek sangat terkejut mendengar cucunya ditahan yang berwajib. Nenek tidak tahu kalau cucunya ngamen. Untuk itu nenek klien berharap agar klien mendapat hukuman yang ringan. Nenek berjanji untuk masa yang akan datang lebih ditingkatkan pengawasannya .

Pamong setempat

Pamong sangat menyayangkan dan tidak mengira klien berurusan dengan pihak yang berwajib karena membawa senjata tajam Menurut pengamatannya klien di Semarang dalam rangka liburan bermain di rumah nenek. Pamong mengharapkan agar klien mendapat keringanan hukuman dan akan membantu membinanya. .

VII.Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan.

- Klien masih berumur 15 tahun;
- Klien menyesali perbuatannya;
- Kurangnya pengawasan orang tua karena ayah dan ibu klien tidak serumah;
- Pihak keluarga menyesalkan perbuatannya;

- Klien baru sekali berurusan dengan yang berwajib
- Pamong setempat bersedia membimbing dan membinanya.

Saran.

Dengan hasil penelitian seperti data diatas dengan mengingat latar belakang dan masa depan klien, maka Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang memberikan saran pertimbangan agar klien diputus pidana selama masa tahanan yang telah dijalani.

Mencermati putusan hakim dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan mengamati laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, penulis berpendapat bahwa putusan hakim kurang tepat, kurang mencerminkan perlindungan anak. Menurut penulis hakim lebih menitik beratkan faktor yuridis formal, yaitu semata –mata melihat terbuktinya keadaan kongkrit perbuatan yang dilakukan oleh anak. Hakim hanya mendasarkan terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan, dengan dasar dakwaan jaksa yang disertai dengan bukti-bukti, saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, yang satu sama lain berkaitan, maka dinyatakan sah dan menyakinkan dan patut dihukum Hakim akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar

Menurut penulis hakim kurang memperhatikan kekhususan peradilan anak, yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran dewasa.

Laporan penelitian BAPAS kurang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keutamaan dari proses peradilan anak, dalam menjatuhkan putusan, hendaknya hakim mempertimbangkan laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga mengetahui latar belakang dan motivasi

anak melakukan kejahatan, Yang sangat perlu diperhatikan bahwa tujuan pemidanaan anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga putusan hakim sejauh mungkin menghindari penjatuhan putusan pidana penjara. Dengan putusan pidana penjara berakibat stigmatisasi terhadap anak, yang mempunyai pengaruh psikologis terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.

Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap diberbagai pernyataan antara lain, dikemukakan Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

1. Pendekatan humanistik: Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai seorang yang memerlukan bantuan pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis; Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis), yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental, penurunan semangat serta proses stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan, kematangan dan kemandirian anak yang wajar.

Demikian pula dikatakan oleh Bagir Manan antara lain:

1. Bahwa hubungan antara orang tua dan anak dalam kehidupan manusia merupakan hubungan yang hakiki, termasuk hubungan mental psikologik, maupun mental spiritual. Mengingat hakikat hubungan tersebut dalam kehidupan manusia maka dalam menangani masalah anak harus senantiasa diusahakan agar anak nakal tidak dipisahkan dari orang tuanya. Kalau terpaksa dipisahkan,

tetaplah dipertimbangan pemisahan ini harus semata-mata demi kepentingan menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak secara sehat dan wajar.

2. Peradilan anak meliputi aktifitas pemeriksaan, dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak.

Sehubungan dengan hal ini, Sudigno Mertokusumo berpendapat bahwa: Tujuan peradilan anak bukan semata –mata hanya menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa kongkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan ini menuntaskan perkara. Mengingat anak harus mendapat perlindungan, oleh karena itu perlu mendapat perlindungan khusus pula, maka dalam peradilan anak ini janganlah hendaknya dititik beratkan kepada terbukti atau tidaknya perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh si anak.

Mencermati pendapat para ahli, seyogyanya dalam perkara Eko Adriyanto, agar putusan hakim mencerminkan perlindungan anak, putusan pidana penjara harus dihindarkan. Perlu kiranya hakim memilih alternatif-alternatif sanksi yang lebih tepat yang tercantum dalam Undang-Undang No.3/1997, agar putusan hakim mencerminkan perlindungan anak, walaupun perbuatan Eko Adriyanto sah dan meyakinkan memenuhi unsur –unsur Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, anak masih dapat dibina tanpa dijatuhi hukuman pidana. Mengingat perbuatan anak tidak terus menerus-menerus melakukan tindak pidana serius, bukan residivis, anak baru pertama kali berurusan dengan yang berwajib. Dari hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, perbuatan dilakukan kerana pengaruh pergaulan, kerana kurangnya pengawasan orang tua, anak menyesali perbuatannya dan anak ingin sekolah lagi,

orang tuanya dan keluarganya sanggup membina dan mengawasi lebih ketat dan pamong setempatpun bersedia membantu membinanya .

Hal lain yang perlu diperhatikan, perkara anak yang ditangani oleh pengadilan anak PN Semarang, termasuk perkara EkoAdrianto tidak didampingi pembela. Salah satu ciri pemeriksaan secara kekeluargaan adalah terdakwa didampingi pembela pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan didampingi pembela anak akan dibela kepentingannya, sesuai dengan hak anak yang diatur oleh undang-undang yang mengatur perlindungan anak

2. Putusan Pengadilan Negari Semarang No.82/Pid B/2002/PN Smg.

.Dalam Putusan ini terdakwa Irfan Bin Lasimin dijatuhi hukuman pidana penjara karena melanggar Pasal 2 (1) UU No.12 Drt/1951.

Laporan Penelitian BAPAS Kelas I Semarang

I. Identitas.

Nama : Irfan Subekti Bin Lasimin.
Tempat tanggal Lahir : Semarang, 25 April 1987.
Agama : Islam.
Pendidikan : Pelajar SMP Kelas II

II. Masalah

Klien telah melakukan pelanggaran Pasal dalam UU Darurat No.12 Tahun 1951: Yaitu membawa senjata tajam tanpa ijin.

III. Kronologisnya.

Pada tanggal 22-12- 2001, jam 23.30 malam klien bersama 2 orang temannya sepulang dari Simpang Lima, tiba-tiba timbul niat untuk menodong didaerah

Bergota. Masing –masing membawa senjata tajam berupa bendo, yang dibawa dari rumah, tujuannya untuk menakut-nakuti koban.

Menurut pengakuan klien bendo tersebut dari Eko Ariyanto salah satu tersangka . Yang menjadi sasaran adalah seorang perempuan yang sedang berjalan bersama pasangannya di sekitar Bergota Semarang.

Klien ditahan sejak tanggal 22-12-2001, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

IV. Latar belakang perbuatan klien.

Perbuatan klien dilakukan karena pengaruh pergaulan dan untuk mendapatkan uang dengan jalan pintas, untuk bersenang-senang tanpa memikirkan akibatnya.

V. Riwayat hidup klien.

Menurut pengakuan klien bahwa:

- Klien adalah anak kedua dari empat bersaudara.
- Klien masih berstatus sebagai pelajar SMP Kelas II Kalirejo, Salaman Magelang.
- Klien mengaku menggelandang di Semarang sejak bulan Agustus 2001 dengan alasan dirumah sering dimarahi oleh ayahnya, dan disekolah punya musuh, sehingga malas masuk sekolah.
- Kemudian timbul niat untuk pergi ke Semarang. Di Semarang klien menggelandang dan tidur diemperan sekitar Rumah Sakit Karyadi.

- Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari klien ikut menjadi calo kendaraan, ikut membantu menjual Koran didepan UGD Karyadi Semarang. Oleh penjual koran tersebut, klien sering diberi makan.
- Klien baru satu kali berurusan dengan yang berwajib.

VI. Pandangan masa depan.

Setelah masalahnya selesai nanti, klien ingin pulang ke rumah orang tuanya di Temanggung dan ingin melanjutkan sekolah lagi.

VII. Tanggapan klien terhadap masalah yang dihadapi.

Klien mengaku dan menyesali kejadian ini hingga dirinya dalam tahanan pihak yang berwajib dan merasakan hidup dalam tahanan. Ia berjanji ingin menjadi anak yang baik dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Putusannya.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PN Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Irfan Subekti Bin Lasimin.

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 23 Desember 2001 – sekarang.

Pengadilan Negari tersebut:

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi.
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan.
- Telah mendengar keterangan terdakwa.
- Telah memperhatikan Surat pelimpahan jaksa PU tanggal 28 Januari 2002.

- Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan.
- Telah mendengar pula tuntutan jaksa PU yang pada pokoknya memuat tuntutan agar supaya Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:
- Kepada terdakwa dijatuhkan hukuman 5 bulan penjara potong tahanan, serta barang bukti sebelah benda dirampas untuk dimusnahkan.
- Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara Rp.500.
- Telah mendengar pembelaan dari terdakwa atau permohonan darinya agar dibebaskan atau hukuman yang ringan-ringannya .

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut (lihat dakwaan). Intinya telah ditulis pada keputusan ini, namun dianggap sudah termuat didalamnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, jaksa telah mengajukan barang bukti berupa sebuah benda.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti diatas telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya ataupun yang dibaca dipersidangan sebagai berikut:

1. Warman Bin Yosodirejo.
2. Supriyanto.
3. Risqi Arfianto.
4. Fajar Purwanto.
5. Eko Adriyanto.

Pada pokoknya keterangan saksi cukup menunjuk pada berita acara sidang, namun selengkapya dianggap sudah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu 22 Desember 2001 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan RS Karyadi saya bersama Fajar Purwanto dan Eko Adriyanto ditangkap polisi karena kedapatan telah membawa senjata tajam berupa bendo tanpa disertai dengan ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan bukti-bukti di persidangan saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) UU No. 12 /1951.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka harus pula membayar ongkos perkara.

Namun sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih usia muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan terutama Pasal 2 ayat (1) UU No.12/1951.

Mengadili.

1. Menyatakan terdakwa Irfan Subekti Bin Lasimin terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan kejahatan membawa senjata tajam tanpa ijin
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 3 bulan.
3. Menentukan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi selama waktu terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan,
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.500,
6. Memerintahkan supaya barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini, berupa sebuah benda dirampas untuk dimusnahkan..

Mencermati Putusan Pengadilan Negari No. 82/Pid B/2002/PN Sng, yang menjatuhkan hukuman 3 bulan potong tahanan kepada terdakwa Irfan Subekti, penulis berpendapat putusan tersebut kurang tepat, kurang mencerminkan perlindungan anak. Dalam hal ini hakim dalam memutuskan perkara semata-mata mempertimbangkan faktor yuridis formal, yaitu menitik beratkan terbuhtinya perbuatan yang dilakukan anak dengan bukti- bukti yang diatur oleh undang-undang. Apabila perbuatannya terbukti sesuai dengan alat-alat bukti menurut undang-undang yaitu: saksi-saksi, barang-bukti, keterangan terdakwa yang satu sama lain berkaitan sehingga memenuhi pasal-pasal pidana yang dilanggar, dalam hal ini Irfan Subekti memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1951, maka terdakwa akan dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pasalnya.

Dalam menangani perkara anak, hakim kurang memperhatikan kekhususan peradilan anak yang disebabkan oleh sifat dan karakteristik anak yang sangat berbeda dengan pelanggar dewasa.

Dalam kaitannya masalah ini beberapa ahli berpendapat antara lain:

Barda Nawawi Arief mengatakan: Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak ini, sering terungkap dalam berbagai pernyataan antara lain:

1. Pendekatan humanistik; Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, kasih sayang..
2. Pendekatan yuridis; Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologik), yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang bersifat menghukum, bersifat degradasi mental, penurunan semangat serta proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak yang wajar.

Dalam masalah ini Bagir Manan mengemukakan antara lain:

1. Dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Walaupun anak pada dasarnya dan dalam batas yang wajar telah menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menanggulangi anak nakal, masyarakat

sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggung jawab dari pada anak itu sendiri.

2. Hubungan orang tua dengan anak dalam kehidupan manusia merupakan hubungan yang hakiki termasuk hubungan mental psikologik maupun mental spiritual. Mengingat hakikat hubungan tersebut dalam kehidupan manusia, maka dalam menangani anak harus senantiasa diusahakan agar anak nakal tidak dipisahkan dari orang tuanya. Kalau terpaksa dipisahkan, tetaplah dipertimbangkan pemisahan itu harus semata-mata demi kepentingan dan pertumbuhan anak secara wajar.
3. Peradilan anak meliputi aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak.

Demikian pula Sudigno Mertokusmo berpendapat bahwa: Tujuan peradilan anak bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa kongkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan perkara, atau masalah baru.

Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan, oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam peradilan anak ini, janganlah hendaknya dititik beratkan kepada terbukti atau tidaknya perbuatan/pelanggaran si anak.

Pendapat para ahli yang telah penulis paparkan diatas, seyogyanya menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, agar putusan hakim

mencerminkan perlindungan anak Selain itu, bila penulis cermati perkara pidana Irfan Subekti, peran Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS kurang optimal, Masih lebih jelas perannya dalam perkara Eko Adriyanto yang telah diuraikan diatas . Keduanya terlibat dalam perkara yang sama Salah satu keutamaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Semarang, yang disertai saran untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara Irfan Subekti, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS hanya mengadakan penelitian tanpa memberi saran/pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Disisi lain perkara-perkara pidana anak di PN Semarang tidak ada yang didampingi penasehat hukum. Dalam penyelesaian perkara secara kekeluargaan, pembela sangat penting untuk membela kepentingan terdakwa agar perlindungan anak menurut undang-undang dapat terlaksana. Di PN Semarang, khususnya perkara-perkara yang telah diputus tahun 2002, tidak ada yang didampingi pembela. Menurut informasi dari beberapa hakim anak, untuk didampingi pembela tergantung pada orang tua terdakwa akan didampingi pembela atau tidak, orang tuanya mencari pembela sendiri, karena menyangkut biaya untuk membayar pembela.

Selain itu, dalam perkara ini terdakwa tidak terus- menerus melakukan tindak pidana yang serius, bukan residivis, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan belum menimbulkan kerugian/korban..

Bila dicermati penelitian Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS terlihat hal-hal sebagai berikut:

- Klien melakukan perbuatan karena pengaruh pergaulan.

- Klien masih berstatus pelajar SMP kelas II.
- Klien di Semarang karena dirumah sering dimarahi ayahnya, dan di sekolah punya musuh.
- Klien menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak anak mengulangi perbuatannya.
- Setelah masalahnya selesai klien ingin kembali kepada orang tuanya dan ingin sekolah lagi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, seyogyanya hakim mengupayakan alternatif-alternatif lain yang diatur dalam perundang-undangan, dalam menjatuhkan putusan dengan menghindari putusan pidana penjara, dengan memperhatikan kebutuhan anak, agar keputusan pengadilan mencerminkan perlindungan anak.

Penulis mengangkat perkara Irwan Subekti dan Eko Adriyanto, kedua perkara ini dilakukan bersama- sama, disidangkan terpisah, dalam hal ini nampak peran pembimbing Kemasyarakatan berbeda, ada yang sudah mamahami perannya ada yang kurang memahami perannya, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan keprofesionalan dari pejabat yang terkait dengan masalah penanganan anak nakal .Saran pembimbing kemasyarakatan merupakan faktor yang sangat penting bagi hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi. Disamping itu, kedua terdakwa terlibat dalam perkara yang sama, namun dijatuhi hukuman yang beratnya berbeda. Sehingga nampaknya putusan hakim kurang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan

3. Putusan PN. Semarang, No.205/Pid/B/2002/PN Smg.

Selanjutnya akan penulis paparkan Putusan No 205/Pid/B/2002/PN Smg. Yang menjatuhkan putusan pada terdakwa Adi Kurniawan yang telah terbukti melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan; Pasal 363 (1) ke 3, ke 5 KUHP. dengan putusan diserahkan kepada negara menjadi Anak Negara.

Adapun laporan hasil penelitian BAPAS Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:

I. Identitas :

Nama : Adi Kurniawan Bin Ruslan.
Umur : 15 tahun.
Alamat : Jln Puspogiwang Gang I No.11 Kelurahan Gisikdrono Semarang
Pendidikan : SD Tamat.

II. Masalahnya.

Klien telah dituduh melakukan pelanggaran Pasal 363 KUHP.

III. Kronologisnya:

Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2002 sejak sore hari klien pergi berjalan-jalan ke Simpang Lima bersama-sama temannya hingga pukul 24 .00 WIB. Klien baru pulang kerumahnya Jln Puspogiwang Gang I No.11 Semarang Barat, klien langsung tidur. Hari Minggu tanggal 3 Maret 2002 keadaan rumah klien sepi, Ibu klien sedang pergi bezuk ke Rumah Sakit, Klien dirumah sendirian, lalu mengambil barang milik ibunya yang ada didalam kamar ibu klien. Pada waktu itu kamar dalam keadaan terkunci, kemudian klien merusak ventilasi yang ada diatas kamar, klien masuk didalam kamar tersebut lewat ventilasi yang sudah dirusak dan mengambil

UPT-PUSTAK-UNDIP

barang-barang berupa satu buah VCD dan Harmonika/Pianika/melodi. Lalu barang-barang tersebut dibawa keluar oleh klien lewat pintu jendela kamar yang dibuka klien dari dalam kamar. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu klien membawanya ke Jl Kokrosono Semarang, barang-barang tersebut dijual kepada mbak Sri, semuanya laku Rp85.000. Uang hasil penjualan barang tersebut sudah habis dipergunakan klien untuk beli minuman keras dll.

Perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh klien sendirian atas kemauan klien sendiri. Setelah melakukan pencurian klien tidak pulang kerumah selama dua hari, sampai pada hari selasa tanggal 5 Maret 2002 klien baru pulang terus langsung tidur. Sampai malam hari sekitar pukul 24.30 WIB di rumah klien Jl. Puspogiwang Gang I No.11 Semarang, klien ditangkap oleh petugas sewaktu sedang tidur, selanjutnya klien dibawa ke Poltabes Semarang dan ditahan.

IV. Akibat yang ditimbulkan.

a. Dirinya,

Klien merasa takut dalam tahanan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada pihak yang berwajib.

b. Keluarga

Orang tua dan keluarga klien terpukul atas perbuatan klien, terutama ibu klien merasa tidak aman, segan dan malu bila berkumpul dengan keluarga dan tetangganya, karena sudah berulang kali perbuatan tersebut dilakukan oleh klien

V. Riwayat Hidup Klien.

- Klien merupakan anak bungsu, anak tunggal tepatnya anak angkat dari Bapak Ruslan dan Ibu Marinem.
- Klien diambil anak angkat dari gereja Bongsari sejak umur 7 bulan, oleh Bapak Ruslan dan Ibu Marinem sudah dianggap sebagai anak sendiri karena sampai sekarang belum mempunyai anak.
- Klien dilahirkan dalam keadaan normal hingga saat ini belum pernah sakit yang mengganggu perkembangannya.
- Klien sekolah di SD sampai kelas II SMP putus sekolah, telah dikeluarkan karena sering berkelahi dan tidak masuk sekolah.
- Setelah keluar dari sekolah klien bertambah nakal dan sering pulang larut malam bahkan jarang pulang ke rumah.

VI. Pandangan Masa Depan.

Setelah bebas dari masalahnya, klien tidak ingin sekolah lagi rencananya ingin bekerja ikut neneknya di Solo.

VII. Tanggapan Klien Terhadap Masalah Yang Dihadapi.

Klien menyesali perbuatannya, karena klien telah mencuri milik ibu angkatnya sendiri tanpa ijin, klien berjanji tidak akan mengulangi lagi pebuatannya. Klien terpaksa mencuri karena kehabisan uang.

VIII. Keadaan Keluarga.

a. Susunan keluarga.

No	!	Nama.	!	Umur.	!	Status	!	Keterangan.
1.	!	Ruslan	!	-	!	Ayah klien	!	Almarhum.
2.	!	Marinem	!	49 th	!	Ibu klien	!	Ibu Angkat
3.	!	Adi kurniawan	!	16 th	!	Klien	!	Anak angkat.

b. Riwayat Perkawinan orang tuanya.

Bapak Ruslan menikah dengan ibu Marinem selama pernikahannya belum dikaruniai anak, lalu mereka mengambil klien sebagai anak angkat sejak umur 7 bulan diasuh dan diperlakukan seperti anak sendiri sampai sekarang berusia 16 tahun. Sejak menikah mereka rukun- rukun saja, kemudian Bapak Ruslan meninggal dunia lebih kurang satu tahun yang lalu.

c. Hubungan sosial dalam keluarganya.

Antar anggota keluarga cukup harmonis, mereka saling memperhatikan, karena klien anak tunggal dalam keluarganya sangat dimanjakannya segala keinginannya selalu dituruti saudara- saudaranya (Bu De dan keponakannya) yang tinggal sebelah rumah klien juga sangat memperhatikannya sejak kecil. Tetapi setelah besar terutama sejak tidak sekolah lagi klien menjadi anak nakal. Bahkan berani melawan orang tua/ibu dan saudara –saudaranya.

d. Hubungan keluarga dengan lingkungan

Keluarga klien dilingkungan setempat dapat menyesuaikan diri dan selalu mengikuti kegiatan yang diadakan dilingkungannya, hubungan dengan warga setempat juga baik.

e. Keadaan Rumah.

Rumah yang ditempati keluarga klien adalah rumah sendiri, letak rumah diperkampungan sebuah gang besar, rumah ukuran 12x8 m2 terbuat dari tembok, lantai tegel, penerangan listrik, air dari sumur, peralatan rumah tangga cukup, ada meja kursi, TV. Radio, dan pesawat tilpon, beberapa kamar tidur dan tempat tidur, sebagian besar kamar dipergunakan untuk tempat kost anak mahasiswa.

f. Keadaan ekonomi keluarga.

Ibu klien tidak bekerja, selama ini penghasilan diperoleh dari hasil menerima kost dirumahnya, hingga sekarang beberapa kamar ditempati anak kost mahasiswa.

IX. Keadaan lingkungan masyarakat.

Lingkungan yang ditempati keluarga klien adalah lingkungan perkampungan/gang besar yang rumahnya berhadapan. Masyarakatnya rata-rata berpenghasilan cukup, bekerja swasta, mayoritas beragama Islam.

X. Beberapa Tanggapan.

a. Dari klien.

Klien menyesali dan menyadari perbuatannya salah dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Dari orang tuanya.

Orang tua /ibu klien sangat malu dan terpukul atas kejadian yang menimpa anak angkatnya, ibu dan keluarga terdekatnya sudah tidak sanggup lagi mendidik klien yang dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan keluarga dan masyarakat setempat, bahkan ibu klien sudah tidak mau menerima klien lagi bila sudah pulang nanti. Mereka menyerahkan masalah klien untuk dibina oleh Negara, dengan harapan agar klien dapat berubah menjadi anak yang baik

c. Dari pamong setempat .

Menurut keterangan dari pamong setempat terutama ketua RT, yang sering memergoki klien bergaul dengan anak-anak diluar lingkungan setempat dan melakukan kegiatan yang negatif (minum-minuman keras/mabuk-mabukan)

bahkan membawa senjata tajam. Pamong setempat sangat menyesalkan perbuatan klien, karena selama ini keluarga klien termasuk warga yang baik, klien juga sebelumnya adalah anak yang baik, tetapi setelah besar sering berbuat merugikan lingkungan.

X. Kesimpulan Dan Saran.

a. Kesimpulan.

1. Klien didakwa melakukan pelanggaran Pasal 363 KUHP, yaitu mencuri barang-barang di rumah ibu angkatnya sendiri.
2. Klien ditahan sejak tanggal 5 Maret 2002 di Poltabes Semarang hingga sekarang.
3. Sebelumnya klien pernah berurusan dengan Polisi dan sudah pernah menjalani hukuman penjara selama 10 bulan di LP Kedungpane Semarang karena melakukan perbuatan pencurian (residevis).
4. Klien saat ini berumur 16 tahun (5 juli 1986).
5. Klien tamat SD, putus sekolah SLTP kelas II, dikeluarkan dari sekolah karena sering berkelahi dan sering tidak masuk sekolah.
6. Setelah putus sekolah klien menjadi pengangguran, tidak bekerja.
7. Klien adalah anak angkat yang diambil dari Gereja Bongsari sejak umur 7 bulan, ayah angkat sudah meninggal, ibu angkat tidak bekerja (penghasilan diperoleh dari hasil menerima kost dirumahnya), sedangkan ayah dan ibu kandung klien tidak diketahui hingga sekarang.

8. Klien sangat dimanjakan oleh ibu dan saudara-saudaranya, karena tidak mempunyai anak kandung.
9. Perilaku klien nampak berubah nakal sejak tidak sekolah dan bergaul dengan teman diluar lingkungan setempat. Klien sering mencuri, minum pil dan minuman keras, bahkan sampai berani mengancam ibunya, hal ini dibenarkan oleh pamong setempat yang sering memergoki.
10. Ibu dan keluarga berharap agar klien diserahkan untuk dibina oleh Negara, karena sudah tidak sanggup mendidiknya,

b. Saran.

Berdasarkan data tersebut diatas, maka Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang memberikan saran pertimbangan agar klien diserahkan sebagai anak Negara untuk mendapatkan pembinaan rohani dan kedisiplinan kerja, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah.

Mohon Extra Vonis dapat dikirimkan ke Bapas Kelas I Semarang guna laporan selanjutnya.

Demikian Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini sebagai bahan pertimbangan.

Putusan Pengadilan yang memutuskan terdakwa Adi Kurniawan Bin Ruslan dengan No.205/Pid/B/2002/PN Smg.

- Terdakwa berada dalam tahanan sejak Tanggal 3 Maret 2002.
- Pengadilan Negeri tersebut:
- Telah membaca berita acara pemeriksaan yang bersangkutan:

- Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari Jaksa PU tertanggal 5 April 2002.
- Telah mendengar keterangan aksi-saksi;
- Telah mendengarkan keterangan para terdakwa;
- Telah mendengar pula tuntutan jaksa PU, yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan Negeri Semarang memutuskan sebagai berikut:
 - Kepada terdakwa dijatuhi hukuman: 12 (dua belas) bulan penjara potong tahanan.
 - Menyatakan barang bukti berupa: Satu unit VCD Player merk Osaki dan Vianika merk Angle Melihora, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Marinem Bin Reksodiharjo.
 - Membebankan ongkos perkara Rp.500 kepada terdakwa.
- Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dibebaskan

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut (lihat Surat Dakwaan), yang pada intinya tidak ditulis dalam putusan ini, namun dianggap telah termuat didalamnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa PU telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- Satu unit VCD Player merk Osaki.
- Satu unit Pianika merk Angle Melihora.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya ataupun yang dibacakan dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke 1 Marimen Bin Resodiharjo:

- bahwa saksi adalah sebagai ibu angkat dari terdakwa.
- bahwa pada tanggal 3 Maret 2002 sekitar jam 18.30, saksi tidak berada di rumah saksi sedang bezuk di rumah Sakit Elisabeth Semarang.
- Setelah saksi pulang dari rumah sakit diberitahu oleh keponakannya yang mengatakan bahwa VCD dan Pianika dibawa keluar oleh terdakwa;
- bahwa barang tersebut dia ambil dari kamar aksi dengan mencogkel ventilasi kamar.

Saksi ke 2 Suwarti Bin Ngadimin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu terdakwa mengambil barang-barang dari kamar saksi I yang berupa VCD dan Pianika, yang diambil dari kamar saksi I
- bahwa barang tersebut katanya digadaikan seharga Rp.85.000, dan uangnya habis untuk bersenang-senang;
- bahwa setelah uangnya habis dan pulang kerumah, terdakwa langsung ditangkap oleh saudaranya dan diserahkan pada polisi.

Yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut selengkapnya ditunjukkan pada berita acara persidangan, namun selengkapnya sebagai telah termuat disini selengkapnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa mengakui seluruhnya atas dakwaan jaksa PU.
- bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 bulan karena perkara pencurian.
- bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik ibu angkatnya.
- bahwa benar barang-barang tersebut digadaikan dan uangnya habis untuk membeli minuman keras dengan teman-temannya.
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

Yang pada pokoknya selengkapnya ditunjuk pada beita acara persidangan, selengkapnya sebagai telah termuat disini selengkapnya.

Memimbang, bahwa dari keseluruhan pemeriksaan yang terjadi dalam persidangan ternyata satu sama lain berkaitan dan berhubungan sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepadanya harus pula dibebani dengan ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dilakukan kepada ibu angkat sendiri;
- Terdakwa pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan, terutama Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP .

Mengadili.

1. Menyatakan terdakwa: Adi Kurniawan Bin Ruslan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Menghukum kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara diserahkan kepada Negara untuk menjadi anak Negara (Pasal 363 (1) ke-3, ke-5.)
Jo Pasal 45 KUHP: dengan ketentuan bahwa pidana tersebut dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara sebelum putusan berkekuatan tetap.
3. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap dalam tahanan.
4. Memerintahkan pula agar barang-barang bukti berupa:
 - Satu unit VCD Player merk Osaki dan satu Unit Pianika merk Melodihora dikembalikan kepada saksi Marinem bin Resoharjo.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.500.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari: Senin, tanggal 22 April yang terdiri dari: Ny Hj. Sukarmini Handritomo, SH sebagai hakim.

Mencermati Putusan hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa Adi Kurniawan Bin Ruslan, Umur 16 tahun yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan hukuman diserahkan kepada Negara, untuk menjadi Anak Negara (Pasal 363 (1) ke-3, ke-5, jo Pasal 45 KUHP). menurut hemat penulis, putusan terhadap terdakwa Edi kurniawan menjadi anak negara sudah tepat dan bijaksana, hakim tidak semata –mata menitik beratkan terbuktinya kejahatan yang dilakukan..Dalam perkara ini, terdakwa adalah residivis, nampaknya saran pembimbing kemasyarakatan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Saran pembimbing kemasyaraktan, agar terdakwa diputus untuk diserahkan kepada negara menjadi anak negara. Disamping itu, mencermati penelitian pembimbing kemasyarakatan, dari tanggapan Ibu klien terungkap bahwa, Ibu klen tidak sanggup lagi mendidik anaknya, malahan tidak mau menerima klien lagi bila sudah pulang nanti. Ibu klien menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada negara dengan harapan agar klien dapat berubah menjadi anak yang baik.

Bertolak dari tanggapan ibu klien, putusan hakim terhadap terdakwa Edi Kurniawan lebih tepat menjadi anak negara, Putusan ini lebih memberikan manfaat bagi terdakwa, dengan berstatus anak negara, terdakwa diserahkan pendidikannya di LAPAS anak. Pendidikan di LAPAS akan digolongkan sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan lamanya pembinaan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan anak meliputi pembinaan jasmani, rohani, ketrampilan. Pembinaan anak Negara di LAPAS anak dapat berlangsung sampai umur 18 tahun. Dengan pembinaan dalam waktu yang memadai,

diharapkan bila kembali dalam lingkungan keluarga/masyarakat sudah menjadi orang yang baik, hidup mandiri karena telah mendapat bekal ketrampilan selama masa pembinaan.

Kalau dibandingkan dengan putusan dua perkara yang telah diauraikan diatas, putusan ini lebih tepat, lebih mengarah pada tujuan pemidanaan. Dalam penanganan perkara inipun pembimbing kemasyarakatan lebih jelas perannya, dengan memberikan saran sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Masalah bantuan hukum terhadap anak khususnya perkara yang ditangani dalam tahun 2002 tidak ada yang didampingi penasehat hukum

. Membahas putusan hakim terhadap terdakwa Edi Kurniawan dilihat dari segi tujuan pemidanaan sudah memadai.

Mamun dilihat dari dasar hukum penerapan pasal yang mengaturnya, putusan hakim yang menunjuk Pasal 45 KUHP, menurut penulis terjadi kekeliruan. Dengan keluarnya UU No.3/1997, tentang Pengadilan Anak, dalam BAB VIII Ketentuan Penutup, Pasal 67 menyatakan bahwa: Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut penulis dengan kekeliruan penerapan dasar hukum pemidanaan dalam perkara pidana Edi Kurniawan, putusan tersebut cacat hukum. Dalam perkara Edi Kurniawan memang tidak ada pihak yang berkeberatan. Dalam penelitian penulis, ter hukum tidak mengajukan banding. Masalah ini menunjukkan kurang terjaminnya kepastian hukum dalam peradilan yang didambakan oleh para pencari keadilan. Disamping itu, menyangkut masalah hak asasi pencari keadilan, dasar

hukum yang keliru, sangat merugikan pihak yang bersangkutan. Hal ini mungkin merupakan kelemahan putusan hakim tunggal, sehingga tidak ada yang mengoreksi kalau ada kekeliruannya.

A.2. Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana (UU No. 3/1997, UU No.23/2002, UU No.4/ 1979).

A.2.1. Perlindungan anak dalam UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.3/1997, merupakan peraturan yang mengatur perlindungan anak dalam proses peradilan. Perlindungan dalam undang-undang tersebut menyangkut baik hukum acaranya maupun hukum materiilnya.

Perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam hukum acaranya telah penulis uraikan diatas pada dasarnya belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak.

Dalam bahasan ini penulis akan menganalisa ketentuan dalam Undang-undang No.3/1997, yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, apakah masih perlu penyempurnaan muatan undang-undangnya atau sudah lengkap, sehingga atas dasar undang-undang tersebut, penerapan sanksi sudah mencerminkan perlindungan anak.pelaku tindak pidana.

Pembahasan terhadap UU No.3/1997 berkisar masalah:

1. Batas umur minimal pertanggungjawaban pidana anak;
2. Tujuan pemidanaan;
3. Pedoman Pemidanaan;
4. Jenis-jenis sanksi (pidana/tindakan).

Ad 1. Batas umur minimal pertanggungjawaban pidana anak

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.3/1997, batas umur minimal anak nakal dapat diajukan ke sidang anak adalah 8 tahun. Ini berarti bahwa anak berumur 8 tahun dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana, walaupun untuk anak yang berumur 8 tahun sampai dengan 12 tahun hanya dikenakan tindakan. Pengenaan pertanggung jawaban pidana mulai anak berusia 8 tahun atau kurang dari 12 tahun menurut hemat penulis kurang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana. Hal ini dikatakan oleh Loebby Loqman bahwa anak yang belum berusia 12 tahun belum dapat menyadari akibat dari perbuatannya.

Dalam *SMR-JJ Rule 4.1* menegaskan bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban pidana janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat kematangan emosional, mental dan intelektual⁴⁵.

Penentuan batas umur pertanggung jawaban pidana anak sejalan dengan ketentuan *Beijing rules*, walaupun diberbagai negara berbeda dalam penentuan batas umur pertanggung jawaban pidana anak. Pada dasarnya *Beijing Rules* menyebutkan bahwa: Karena budaya dan latar belakang sejarah dan budaya masyarakat suatu bangsa, sering sangat berpengaruh terhadap penentuan batas usia pertanggung jawaban pidana, maka pendekatan modern ditetapkan pertanggung jawaban pidana atas diri anak, diukur dari kesesuaian moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan anti sosial anak. Yang penting batas usia pertanggungjawaban pidana anak tidak ditentukan terlalu rendah apalagi tidak ditentukan sama sekali (Rule 4)⁴⁶

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arif, Op.Cit, hal 128.

⁴⁶ Paulus Hadi Suprpto, dalam Romli Atmasasmita, Penyunting, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 107-108.

Dengan demikian menurut penulis penetapan batas umur minimal anak pelaku tindak pidana diajukan ke di sidang anak 8 tahun sebagaimana diatur dlam UU No.3/1997, kurang mencerminkan perlindungan anak.pelaku tindak pidana.

Dalam Konsep KUHP Tahun 2000 Pasal 106 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini mengandung pengertian bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun belum dapat diajukan ke sidang anak Menurut Konsep KUHP tindakan atau pidana hanya dapat dikenakan terhadap anak pelaku tindak pidana yang sudah berumur 12 tahun Dalam masalah batas umur minimal pertanggung jawaban pidana anak, penulis lebih condong ketentuan dalam Konsep KUHP Tahun 2000 yaitu 12 tahun.

Setelah diuraikan batas umur pertanggung jawaban pidana anak, selanjutnya akan diuraikan sistem pertanggungjawaban pidana anak termasuk tindakan. .

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana anak, sama dengan sistem pertanggung jawaban pidana orang dewasa, yaitu berorientasi pada si pelaku secara individual. Jadi mengenal sistem pertanggungjawaban individual/personal.

Dalam hal ini Barda Nawawi Arief, mengemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yaitu hanya dikenakan kepada si pelaku itu sendiri dan hanya dikenakan kepada yang bersalah (asas culpabilitas), merupakan prinsip umum yang wajar .
- b. Penerapan prinsip umum ppidanaan individual terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya

dipandang sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya yang dilakukan.

Namun penerapan prinsip umum ini kepada “anak” patut dikaji karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh. Oleh karena itu penerapan prinsip umum harus dilakukan sangat hati-hati dan selektif dengan mengingat adanya sifat “independensi” ketergantungan anak, maka penerapan prinsip umum seyogyanya diimbangi dengan kemungkinan adanya “pertanggung jawaban pengganti” yang ditujukan pada orang lain.

Dalam hal ini Barda Nawawi Arief menyarankan ada baiknya dikembangkan gagasan untuk mengimbangi sistem pertanggungjawaban individual itu dengan pertanggung jawaban struktural/fungsional.

Salah satu kelemahan/keterbatasan sistem pemidanaan individual dalam upaya menanggulangi kejahatan, adalah sifatnya yang fragmenter, yaitu melihat upaya pencegahan kejahatan/penanggulangan kejahatan dari sudut individu si pelaku saja. Sasaran utamanya lebih ditujukan pada pencegahan individu agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi kurang menekankan pada upaya penanggulangan kejahatan struktural/fungsional. Strategi demikian dipermasalahkan dalam menghadapi masalah kejahatan/tindak pidana anak.

Masalahnya adalah, apakah cukup kejahatan anak ditanggulangi dengan memidana/mendidik si anak, padahal masalah anak lebih merupakan masalah struktural.

Terlebih karena sifat kurang mandirian ketergantungan si anak, maka anak yang melakukan kejahatan adalah “korban struktural” atau korban lingkungan. Oleh

karena itu sudah sepantasnya dikembangkan gagasan/strategi “pertanggung jawaban struktural/fungsional”. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan/tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Misalnya Hukum Adat pemidanaan/pertanggungjawaban dapat dikenakan pada “Ketua Adat”, pertanggungjawaban dapat juga dikenakan pada orang tua.⁴⁷

Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana perlu pendekatan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bossiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut ialah:

1. memelihara tertib masyarakat.
2. perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan orang lain.
3. memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum.
4. memelihara atau mempertahankan integrasi pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu .

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, dalam Romli Atmasasmita, Penyunting, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 79-81.

diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan ini, dan nilai yang diwujudkannya. Atas dasar pandangan yang demikian, menurut Bossiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis, juga suatu disiplin yang berdasarkan dan berorientasi pada nilai.⁴⁸

Dalam hal ini Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa antara pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan dilihat sebagai suatu "dichotomy", karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya yang dipertimbangkan faktor nilai.⁴⁹

Lebih lanjut dikatakan Barda Nawawi Arief bahwa, kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih lagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila akan digunakan sebagai sarana tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga pada hakikatnya pidana itu mengandung unsur-unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti pidana yang dikenakan pada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal, 30-41.

⁴⁹ *Ibid*, hal 41.

pelanggar tentang nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Berkaitan dengan hal ini kiranya perlu dikemukakan konsepsi kebijakan dari aliran *social defence* menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi. Istilah perlindungan masyarakat atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia dan Simposium Pembaharuan Hukum Nasional pada tahun 1980 di Semarang.

Menurut Marc Ancel pertanggung jawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial. Diakui olehnya bahwa determinisme dan indeterminisme merupakan program filosofis yang berada diluar lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi ditegaskan bahwa pidana modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama setiap perlakuan readaptasi-sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri, Marc Ancel melihat kejahatan sebagai suatu manifestasi kepribadian pelaku, konsekwensi pertanggungjawaban pribadi menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada individu. Oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain, dan juga mendorong untuk menyadari moralitas sosial.⁵⁰

⁵⁰ Ibid, hal 42-43.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pendekatan nilai humanistik menuntut diperhatikannya ide individualisasi pidana dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana mengandung beberapa karakteristik antara lain:

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (perorangan).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas kulpabilitas)
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku (fleksibilitas) bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi), dan harus ada kemungkinan individualisasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁵¹

Tentang pendekatan humanistik dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana, Sudarto pernah menyatakan “Kalau membicarakan pidana maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan..... Jadi pembaharuan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai kemanusiaan ialah kasih sayang terhadap manusia.”⁵²

Dari uraian diatas pertanggung jawaban pidana dengan sistem individual sebagai konsekwensi pendekatan khusus bagi tindak pidana anak yaitu pendekatan humanistik dan proporsional sejalan dengan konsep social defence dari Marc Ancel serta ide individualisasi pidana dalam pembaharuan hukum pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam UU No.3/1997 yang bersifat individual secara yuridis (asas tiada pidana tanpa kesalahan) memang wajar, namun perlu dikaji ulang perlunya untuk dikembangkan menuju pertanggungjawaban struktural, karena kejahatan anak bukan semata-mata kesalahan pribadi, namun

⁵¹ Ibid, hal 43.

⁵² Ibid, hal 44.

merupakan korban dari lingkungan, seyogyanya pertanggung jawaban pidana juga dikenakan pada pihak lain yang berpotensi dan memberikan kontribusi besar untuk terjadinya tindak pidana. Disamping itu sistem pemidanaan anak hendaknya tetap memperhatikan karakteristik dan kondisi pelaku. Dalam hal ini memperhatikan anak yang mempunyai karakteristik khusus serta memberikan kelonggaran/fleksibilitas kepada hakim untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan karakteristik anak yang harus dilindungi. Demi menjamin kesejahteraan anak. Harus diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang anak, motivasi perbuatan yang dilakukan, prinsip ini menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum.

Selain prinsip memajukan kesejahteraan anak peradilan anak menganut prinsip proporsionalitas yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas dendam.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak harus memperhatikan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No.3/1997 yang menyebutkan bahwa, sesuai dengan asas praduga tak bersalah maka seseorang anak nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Batas umur 8 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur 8 tahun dianggap belum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.. Pada umur 12 tahun anak dianggap sudah mengerti akan akibat dari perbuatannya.

Hal ini sejalan dengan azas umum *Beijing rules*, antara lain menyebutkan bahwa karena latar belakang sejarah dan budaya masyarakat suatu bangsa sering

sangat berpengaruh terhadap penentuan batas usia pertanggung jawaban pidana. Maka pendekatan modern ditetapkan pertanggung jawaban pidana atas diri anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan anti sosial, yang penting batas usia pertanggungjawaban pidana anak ini tidak ditentukan terlalu rendah apalagi tidak ditentukan sama sekali.⁵³

Penulis sangat sependapat dengan Barda Nawawi Arief, bahwa pertanggung jawaban pidana individualisasi perlu direalisasikan dengan gagasan pengembangan pertanggung jawaban pidana struktural, mengingat perbuatan si anak secara penuh penyebabnya bukan dari pribadi si anak sendiri, tetapi faktor lingkungan yang ikut mendorong perbuatan pelanggaran/kejahatan anak

Ad 2.Tujuan pembedaan anak

Undang-Undang No.3/1997 tidak mencantumkan secara jelas dalam ketentuan pasalnya tentang tujuan Peradilan Anak. Namun demikian, dalam konsideran b UU No.3/1997 menyatakan bahwa, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaannya maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak, perlu dilakukan secara khusus.

Dari konsideran b UU No.3/1997 terkandung tujuan peradilan anak. Hal ini dikemukakan oleh Agung Wahjono dan Siti Rahayu bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka perlu anak diadili oleh satu badan peradilan tersendiri. Demikian filsafat yang menjadi dasar dari proses peradilan anak. Hal ini tercantum

⁵³ Paulus Hadi Suprpto, Op.Cit, hal, 108.

dalam RUU Peradilan Anak yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Pengadilan Anak.

Lebih lanjut disimpulkan bahwa segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, seyogyanya apakah itu dilakukan oleh Polisi, Jaksa atau Hakim atau pejabat lainnya harus berdasarkan pada prinsip demi kesejahteraan anak.

Untuk ini apakah hakim akan menjatuhkan pidana atau upaya hukum lain, dimaksudkan untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan wibawa hukum.

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak di Indonesia adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat.⁵⁴

Menegakkan keadilan terhadap pelanggar-pelanggar anak merupakan usaha membina anak-anak sekaligus melindungi bangsa Indonesia.

Kesejahteraan anak itu penting karena:

- a. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang, secara ajar.
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, ekonomi.
- d. Anak belum mampu untuk memelihara dirinya sendiri.
- e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin⁵⁵

⁵⁴ Agung Wahjono, Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal 38.

⁵⁶ Ibid, hal. 39-40

Mengingat mengadili sebagai tugas pokok badan peradilan yang dibebankan oleh undang-undang, maka mengadili tidak mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak

Tujuan peradilan anak, dikemukakan juga oleh Sudigno Mertokusumo dalam Seminar yang bertemakan “Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam upaya menyongsong dan melindungi Anak Indonesia antara lain dikatakan; Tujuan peradilan anak bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa kongkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara, Putusan itu harus memutuskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapatkan perlindungan, oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka peradilan anak ini janganlah hendaknya dititik beratkan terbukti atau tidaknya perbuatan itu, tetapi harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab dan motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan anak, dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi hari depan.⁵⁶

Tujuan pemidanaan dalam UU No.3/1997 tidak diatur secara jelas dan rinci. Berbeda dengan Konsep KUHP Tahun 2000 mengatur secara jelas dan rinci tujuan pemidanaan dalam pasalnya. Penulis lebih sependapat tujuan pemidanaan diumuskan dalam pasalnya, karena tujuan pemidanaan akan sangat menentukan keputusan hakim.

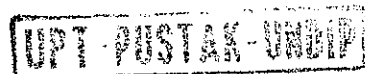
⁵⁶ Sudigno Mertokusumo, dalam Romli Atmasasmita, Op.Cit, hal. 51.

Dalam Konsep KUHP Tahun 2000 Pasal 50 menyebutkan:

1. Pidana bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak nampak sejalan dengan ketentuan *Beijing rules*. Dalam *commentary* dibawah Rule 5.1 disebutkan bahwa Rule 5.1 menunjuk dua sasaran yang sangat penting yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anak. Sasaran ini merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak- anak, khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana, harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Ditegaskan selanjutnya bahwa prinsip ini berarti menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau yang semata-mata bersifat menghukum.



- b. Prinsip proporsionalitas, yaitu suatu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas sematamata.⁵⁷

Tujuan pidana juga dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

Moeljatno mengemukakan bahwa, tujuan pidana adalah kompleks yang dengan singkat dapat disimpulkan bahwa: Bukan saja harus dipandang untuk mendidik terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya, tetapi untuk memberi ketenangan bagi masyarakat.⁵⁸

Tujuan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno juga tersimpul tujuan perlindungan masyarakat dalam arti rehabilitasi si pembuat dan keseimbangan, keselarasan hidup dalam masyarakat.

Muladi mengungkapkan antara lain:

- a. Tujuan pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang lain, yang mempunyai maksud melakukan kejahatan semacam, dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda, yakni bersifat individual dan umum.⁵⁹
- b. Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat, sebagai tujuan pidana mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pidana.⁶⁰

Dari pendapat Muladi tersebut, tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat, termasuk juga tujuan peradilan anak.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 113.

⁵⁸ Ibid..

⁵⁹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hal 81.

⁶⁰ Ibid. hal 64.

Perumusan tujuan pidana, dimaksudkan sebagai fungsi/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah⁶¹

Menurut penulis, tujuan pidana seyogyanya dirumuskan secara rinci dan jelas dalam perumusan pasalnya. Tujuan pidana sangat berpengaruh terhadap penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan adanya tujuan pidana yang jelas hakim dapat lebih mudah menjatuhkan putusan yang paling tepat, khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana yang harus mendapat perlindungan. Menurut Muladi, perumusan tujuan pidana, dimaksudkan sebagai fungsi/control dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motifasi pidana yang jelas dan terarah.

Ad.3. Pedoman pidana.

Dalam UU No.3/1997 pedoman pidana tidak diatur secara rinci dalam perumusan pasalnya. Demikian pula dalam KUHP yang sekarang berlaku juga tidak diatur, Namun demikian bila dicermati dengan seksama dalam pasalnya maupun penjelasannya, tersimpul pedoman pidana anak. Misalnya dalam penjelasan umum antara lain disebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dilimpahkan oleh Pembimbing Masyarakat mengenai data pribadi maupun keluarga dari si anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 153.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak, menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang baik yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara.

Demikian pula penjelasan Pasal 25 UU No.3/1997, juga terkandung maksud adanya pedoman pemidanaan anak yaitu: Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya atau kenakalan yang dilakukan anak yang bersangkutan. Disamping itu hakim wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua, wali, orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Disamping itu, perlu pula memperhatikan beberapa pendapat ahli yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain:

Pendekatan yang khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak yang sering terungkap dalam berbagai pernyataan ialah:

1. Pendekatan humanistik; Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan pengertian, kasih sayang⁶² Dengan demikian agar hakim dalam menjatuhkan sanksi yang mencerminkan perlindungan anak, seyogyanya mempergunakan pendekatan humanistik.

⁶² Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 114 -115.

2. Pendekatan yuridis terhadap anak, hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis), yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental, penurunan semangat serta proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak yang wajar⁶³

Dasar pemikiran pemidanaan anak yang dikemukakan oleh Bagir Manan antara lain:

1. Dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sekali-kali tak boleh melupakan kedudukan anak dalam segala karakternya yang khusus. Walaupun pada dasarnya dan dalam batas wajar telah menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menghadapi anak nakal, masyarakat sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggungjawab.
2. Dari dasar pemikiran ini, sudah sewajarnya hakim harus mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak, bukan semata-mata kesalahan anak, namun lebih disebabkan pengaruh lingkungan, terutama orang tuanya. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan semata-mata pada pelaku tindak pidana dalam hal ini anak. Hendaknya orang tua ikut bertanggung jawab. Untuk itu sudah sewajarnya Barda Nawawi Arief mengajukan gagasan

⁶³ Ibid.

mengembangkan pertanggungjawaban individual bagi anak pelaku tindak pidana menjadi pertanggungjawaban struktural.

3. Dalam menjatuhkan sanksi hendaknya hakim mempertimbangkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua adalah merupakan hubungan yang hakiki, termasuk hubungan mental psikologik maupun mental spiritual. Mengingat hakikat hubungan tersebut dalam kehidupan manusia, maka dalam menangani masalah anak harus senantiasa diusahakan agar anak nakal tidak dipisahkan dari orang tuanya.

Dari pokok pikiran ini, seyogyanya hakim dalam menjatuhkan putusan sejauh mungkin menghindari hukuman penjara.

4. Dalam memutuskan perkara anak hendaknya hakim memusatkan perhatiannya terhadap kepentingan anak dalam peradilan anak.

Dengan dasar pemikiran ini, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan kepentingan anak yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.

Dasar pemikiran pembedaan anak yang dikemukakan oleh Sudigno Mertokusumo antara lain: bahwa tujuan peradilan anak bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti atau tidaknya kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara, jangan sampai putusan tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapatkan perlindungan, janganlah hendaknya dititik beratkan terbukti atau tidaknya perbuatan/pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi

perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh si anak, dan kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak dan hari depan anak..Oleh karena itu dalam peradilan anak diperlukan kebebasan hakim dan perumusan undang-undang yang umum⁶⁴.

Dengan dasar pemikiran ini, dalam peradilan anak diperlukan kebebasan hakim, dengan harapan hakim akan memberikan putusan yang sesuai dengan tujuan peradilan anak, janganlah menitik beratkan terbukti atau tidaknya perbuatan yang dilakukan anak yaitu aspek yuridis formal, namun harus mempertimbangkan faktor sosiologis dan filosofis.

Walaupun hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/tindakan) telah mempertimbangkan faktor yuridis, sosiologis, filosofis, untuk memberi putusan yang adil, penulis sependapat perlunya pedoman pembedaan dirumuskan secara rinci dalam pasalnya..

Hal ini untuk mengurangi kemungkinan disparitas pidana, dalam arti penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas⁶⁵

Disparitas pidana berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan *correction administration* . Terpidana setelah memperbandingkan pidana, merasa menjadi korban *the judicial caprice*, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum padahal penghargaan terhadap hukum merupakan target didalam tujuan pembedaan.

Hal ini merupakan suatu indikator dan manifestasi pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus

⁶⁴ Sudigno Mertokusumo, Seminar Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Peradilan Anak dalam Upaya Mengayomi dan Melindungi Anak Indonesia, dalam Romli Atmasasmita, Penyunting, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal, 51.

⁶⁵ Ibid, hal 52-53.

akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana⁶⁶.

Dalam hal ini Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, dalam RUU Pengadilan Anak yang sekarang sudah disahkan menjadi UU No.3/1997, dalam Bab III yang memuat ketentuan mengenai sanksi (pidana/tindakan) dan lamanya pidana. Sangat disayangkan dalam Bab ini tidak ada, pedoman mengenai prinsip-prinsip yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/tindakan) kepada anak dalam menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Pedoman atau prinsip-prinsip penjatuhan pidana terhadap anak inilah yang sangat penting dikemukakan dalam ketentuan mengenai peradilan anak, karena masalah inilah yang menjadi pusat perhatian dari dokumen-dokumen Internasional⁶⁷

Misalnya:

Di dalam SMR-JJ dinyatakan antara lain:

Rule 17.1: Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang termasuk hakim harus berpedoman pada prinsip:

- a. Reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana) selalu harus diseimbangkan, tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot/keseriusan tindak pidana tetapi juga dengan keadaan dan kebutuhan si anak dan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- b. Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.

⁶⁶ Ibid, hal, 54.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, dalam Romli Atmasasmita, Op.Cit, hal 75-76.

- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali telah ada bentuk respons/sanksi lain yang lebih cepat.
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Rule 17.4: Pejabat yang berwenang/hakim mempunyai kekuasaan untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan. Berdasarkan Rule 17.4 tersebut hakim dapat saja menghentikan proses peradilan, dengan kata lain bisa saja hakim tidak menjatuhkan sanksi apapun (pidana/tindakan).

Rule 19.1: Penempatan seorang anak dalam lembaga harus selalu ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan.

Di dalam Resolusi PBB 45/113.tentang *UN Rules for the Protection of juveniles Deprived of their Liberty* antara lain dinyatakan:

Rule 1.1. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.

Rule 1.2. Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan untuk kasus-kasus luar biasa/eksepsional.⁶⁸

Dalam Konsep KUHP Tahun 2000, pedoman pemidanaan dirumuskan secara jelas dan rinci. Dalam Konsep KUHP tahun 2000 dirumuskan pedoman pemidanaan yang bersifat umum dan pedoman pemidanaan yang bersifat lebih khusus.

⁶⁸ Ibid, hal 77-78.

Pedoman pemidanaan yang bersifat umum: diatur dalam Pasal 51 sebagai berikut:

(1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. cara melakukan tindak pidana.
- d. sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan atau
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Sedang dalam pengadilan anak, ketentuan yang tersimpul dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 25 sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut hemat penulis masih perlu penambahan berbagai faktor yang belum tercakup, namun perlu untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Mengingat tujuan utama peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak, putusan hakim harus

mencerminkan perlindungan anak memberikan perlindungan anak baik jasmani, rohani maupun sosial, agar anak dapat tumbuh, berkembang secara wajar.

Berdasarkan hal ini seyogyanya pedoman pemidanaan anak perlu dirumuskan dalam pasalnya, sebagai dasar yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, supaya putusan dapat dijatuhkan seadil-adilnya sejalan dengan asas persamaan dalam mendapatkan keadilan.

Walaupun peran Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaporkan hasil penelitian mengenai anak, yang meliputi data pribadi anak, keadaan orang tua, keluarga, lingkungan dan lain-lainnya sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, menurut hemat penulis, hasil penelitian kemasyarakatan tidak mengikat. Berbeda dengan pedoman pemidanaan yang dirumuskan dalam undang-undang, hakim wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang.. Selain itu, dalam Konsep KUHP Tahun 2000, diatur pula pedoman pemidanaan yang tidak diatur dalam UU No.3/1997. yaitu:

Pedoman penerapan pidana penjara tunggal (Pasal 54)

Purumusan pidana penjara tunggal yang bersifat absolut sejauh mungkin dihindarkan, sekiranya perumusan tunggal tidak dapat dihindarkan, maka agar tidak terlalu kaku dan absolut perumusan pidana tunggal harus diimbangi dengan suatu pedoman.

Latar belakang menghindarkan sistem perumusan pidana tunggal adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan utama sistem perumusan pidana tunggal sifatnya yang kaku, absolut, imperatif. Sistem ini tidak memberi kesempatan pada hakim untuk menentukan

pidana apa yang dianggap paling sesuai untuk terdakwa. Jadi kurang memberi kesempatan pada hakim untuk melakukan individualisasi pemidanaan yang berorientasi pada orangnya khususnya dalam melakukan tindak pidana.

- b. Sistem perumusan tunggal merupakan pengaruh yang sangat menyolok aliran klasik yang ingin mengobyektifkan hukum pidana. Oleh karena itu sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana. Perumusan tunggal merupakan definite sentesce yang merupakan ciri dari aliran klasik.
- c. Ide dasar yang melatar belakangi sistem pemidanaan tunggal di atas tidak sesuai dengan dasar yang melatar belakangi menetapkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan dianutnya sistem perumusan tunggal yang kaku dan absolut akan dirasakan adanya kontradiksi ide, karena rehabilitasi, resosialisasi, dan individualisasi.
- d. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan erat antara banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Hal ini kurang menunjang kecenderungan saat ini di banyak negara (berdasarkan kongres-kongres internasional) untuk mengembangkan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana sebagai salah satu politik kriminal.

Untuk mengimbangi dan menghindari sifat yang kaku, absolut dari sistem pemidanaan tunggal, Konsep KUHP Pasal 54 merumuskan suatu pedoman sebagai klep/katub pengaman yang dirumuskan dalam pedoman ini:

- (a) Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara (yang dirumuskan secara tunggal).
- (b) Keadaan dan syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana penjara; dan
- (c) Jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana penjara yang tidak dijatuhkan itu.

Menurut Pasal 54 Konsep syarat –syarat yang harus dipenuhi pidana tunggal ialah:

- a. Terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam pidana tunggal.
- b. Pengadilan berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan :
 - (I) Tujuan pemidanaan (Pasal 50 Konsep).
 - (II) Pedoman pemidanaan (Pasal 51 Konsep).
 - (III) Pedoman menjatuhkan pidana penjara (Pasal 57 Konsep).

Apabila syarat-syarat diatas dipenuhi, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda walaupun tindak pidana yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal. Jadi menurut Pasal 54 Konsep perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif.

Denda yang dapat dijatuhkan adalah maksimum denda kategori 5, dengan minimum denda kategori 3 (sebagai pengganti ancaman pidana tunggal), karena delik yang diancam pidana tunggal adalah delik yang sangat serius yang bobotnya 7 tahun penjara. Karena delik yang bobotnya 7 tahun kebawah maksimum dendanya adalah kategori 4, maka untuk delik yang bobotnya diatas 7 tahun ditentukan dendanya (sebagai pengganti pidana penjara tunggal menurut kategori 5). Adapun

minimalnya ditentukan berdasar maksimum denda kategori 3 yaitu sebanyak Rp.3000 000,- berdasarkan pertimbangan bahwa minimum denda untuk delik “sangat serius” diatas 7 tahun, adalah maksimum denda untuk “delik ringan” yaitu denda kategori 3. Jadi minimalnya bukan kategori 1 “sangat ringan”, yang tidak diancam dengan pidana penjara.

Selain sistem perumusan tunggal dapat menjadi sistem alternatif menurut Pasal 54 ayat (4) dapat juga menjadi sistem komulatif untuk delik-delik tertentu. Dimungkinkannya penjatuhan pidana secara komulatif untuk delik-delik tertentu ini dimungkinkan dalam beberapa undang-undang diluar KUHP. Menurut Pasal 54 ayat (4), denda yang dikomulasikan adalah denda menurut kategori 5.

Dengan adanya ketentuan Pasal 54 Konsep, maka kemungkinan yang dapat diambil oleh pengadilan dalam menghadapi perumusan tindak pidana yang hanya diancam pidana penjara tunggal ialah:

- a Menjatuhkan pidana penjara saja.
- b Menjatuhkan pidana denda saja (dengan maksimum menurut kategori 5 dan minimum sebesar maksimum denda menurut kategori 3).
- c Menjatuhkan pidana penjara dan denda secara komulatif untuk delik-delik tertentu (dengan maksimum denda menurut kategori 5).

Pidana pengawasan tidak dapat dijatuhkan, karena menurut konsep delik yang diancam dengan pidana penjara secara tunggal adalah delik-delik yang diancam

dengan pidana penjara di atas 7 tahun. Jadi menurut Pasal 72 tidak dapat dikenakan pidana pengawasan.⁶⁹

Bertolak dari pedoman penerapan pidana tunggal dalam Konsep KUHP Tahun 2000 Pasal 54, apabila ketentuan tersebut diakomodir dalam UU No.3/1997, kiranya lebih memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana tunggal, karena menurut konsep Pasal 54, dapat saja hakim menjatuhkan pidana denda. Dengan demikian, putusan hakim lebih mencerminkan perlindungan anak. Dalam upaya melindungi anak pelaku tindak pidana, diupayakan sejauh mungkin menghindari pengenaan pidana penjara.

Pedoman Penerapan Pidana Denda Tunggal (Pasal 55 Konsep)

Latar belakang pemikiran diadakannya Pasal 55 adalah bahwa delik-delik yang hanya diancam dengan pidana denda tunggal adalah delik-delik yang pada umumnya dipandang sangat “ringan”.

Karena tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dipandang sangat ringan, maka dipandang perlu memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan-tindakan tertentu saja, khususnya yang bernilai uang seperti denda. Berdasarkan hal tersebut kemudian dirumuskan Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan”

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan kedua, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 142-146.

Namun untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya pidana bagi orang tertentu (misalnya orang yang berkali-kali melakukan tindak pidana yang diancam dengan denda saja, atau yang telah berkali-kali dijatuhi pidana denda), maka dipandang perlu pula memberi kemungkinan kepada hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum 1 tahun atau pidana pengawasan ditambah pidana denda.

Kemungkinan ini dirumuskan dalam ayat (2) yang berbunyi:

“Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama satu tahun atau menjatuhkan pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda”.

Ketentuan ayat (2) diatas dikatakan sebagai bentuk pengaturan yang lebih khusus dan ketentuan umum mengenai “pengulangan” Pasal 77 dan Pasal 126 Konsep.

Berdasarkan Pasal 55 diatas beberapa kemungkinan dapat diambil oleh pengadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana dengan pidana denda secara tunggal ialah:

- a. menjatuhkan pidana denda; atau
- b. menjatuhkan pidana tambahan saja, atau menjatuhkan tindakan.
- c. menjatuhkan tindakan tertentu saja; atau
- d. untuk residivis dapat menjatuhkan;
 - pidana penjara maksimum 1 tahun; atau
 - pidana pengawasan dan pidana denda.⁷⁰

⁷⁰ Ibid, hal 146-147.

Pada hakikatnya penggunaan denda terhadap anak pelaku tindak pidana, sama dengan ketentuan denda bagi pelaku tindak pidana dewasa. Hanya denda bagi anak, besarnya denda adalah $\frac{1}{2}$ dari denda bagi orang dewasa. Oleh karena itu, penjatuhan denda bagi anak menurut UU No 3/1997, kiranya perlu mengakomodir peraturan denda dalam Konsep KUHP. Baru 2000. Hanya karena peraturan yang mengatur peradilan anak mempunyai sifat khusus, seyogyanya ketentuan tentang residivis bagi anak pelaku tindak pidana yang djatuhi pidana denda, ada pengecualian sehingga memungkinkan dihindarkan penjatuhan pidana penjara, mengingat perlindungan anak dalam peradilan, bertujuan sejauh mungkin menghindari pengenaan pidana penjara.

Pedoman penerapan pidana alternatif (Pasal 56 Konsep)

Perumusan alternatif antara lain mengandung arti bahwa: hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang ditawarkan/dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.

Walaupun ada sanksi yang dapat dipilih, namun adalah wajar apabila undang-undang mengingatkan kepada hakim agar dalam melakukan pilihan itu selalu berorientasi pada "tujuan pemidanaan" dan lebih mengutamakan/mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan, sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam Pasal 56 ayat (1) Konsep dinyatakan:

“Jika pidana penjara dan denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan kedua jenis pidana tersebut dapat dijatuhkan secara komulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut”

Dalam perumusan ayat (1) diatas mengandung unsur imperatif hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana, hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti, jenis sanksi pidana yang lebih berat, baru digunakan apabila jenis sanksi pidana yang lebih ringan tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Jadi pada prinsipnya lebih mendahulukan pidana pokok yang lebih ringan dari pada yang lebih berat.

Walaupun sistem alternatif pada dasarnya bersifat memilih salah satu, namun konsep mengembangkan pemikiran bahwa keduanya dapat dipilih. Dasar pemikirannya adalah apabila misalnya pidana penjara 6 tahun ditawarkan secara alternatif dengan pidana denda Rp.6.000.000,00. Bertolak dari pemikiran demikian, maka bobot maksimum 6 tahun pidana penjara itu dipandang senilai dengan jumlah komulasi dari separo maksimum pidana penjara 3 tahun dan separo pidana denda Rp. 3000.000,00. Jadi dalam perumusan alternatif sebenarnya terkandung juga ancaman pidana secara komulatif sebesar $\frac{1}{2}$ dari maksimum penjara + maksimum denda.

Pemberian pidana secara komulatif sebesar separo maksimum penjara dan separo denda dikecualikan terhadap delik yang memang secara tegas diancam secara komulatif-alternatif. Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka dalam Konsep KUHP Pasal 56 ayat (2) Konsep dirumuskan:

“Jika dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) maka tetap dapat dijatuhkan. pidana denda paling banyak separo dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan”

Apabila garis pemikiran di atas dilanjutkan dengan adanya Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Konsep, pidana sebesar $\frac{1}{2}$ maksimum pidana penjara diganti dengan pidana pengawasan (yang maksimumnya 3 tahun dan setengah maksimum pidana denda Rp.3000.000.00) bersama-sama.

Kemungkinan demikian dituangkan dalam ayat (3) yang berbunyi:

“Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) dan (2) .hakim tetap dapat menjatuhkan pidana denda paling banyak separo dari maksimum pidana denda yang diancamkan itu bersama-sama dengan pidana pengawasan”

Dari uraian tersebut diatas terlihat beberapa kemungkinan yang dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku tidak pidana yang diancam pidana secara alternatif (penjara atau denda) yaitu:

- a. Menjatuhkan pidana penjara saja; (yang dapat diganti dengan pidana pengawasan), dan
- b. Menjatuhkan denda saja; dan
- c. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (dengan batas separo dari jumlah maksimum masing-masing); dan
- d. Pidana pengawasan 3 tahun dan denda (separo dari maksimum) bersama-sama.⁷¹

⁷¹ Ibid, hal, 147- 150.

Pedoman penerapan pidana alternatif dalam Konsep KUHP Baru, kiranya dapat diakomodir sebagai pedoman pengenaan pidana anak pelaku tindak pidana. Dalam UU No.3/1997, tidak diatur pedoman pengenaan pidana secara rinci. Berbeda dengan pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru, mengatur berbagai kemungkinan (alternatif) sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Hakim dengan leluasa untuk memilih pidana yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Menurut penulis, akan lebih menunjang tercapainya tujuan peradilan anak apabila penerapan pidana alternatif dipergunakan sebagai pedoman penerapan pidana anak. Pedoman penerapan pidana alternatif menawarkan beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu, pidana denda atau dengan jenis sanksi pidana yang lebih bersifat tindakan, yaitu pidana pengawasan. Jenis pidana pengawasan merupakan jenis sanksi nonkustodial, yang lebih bersifat tindakan yang diancam pidana secara alternatif. (penjara atau denda).

Dalam rangka melindungi anak pelaku tindak pidana, sesuai dengan tujuan peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, pengenaan pidana penjara terhadap anak sejauh mungkin dihindarkan. Seyogyanya hakim anak menjatuhkan jenis-jenis sanksi yang lebih bersifat tindakan, yaitu pidana pengawasan yang merupakan jenis sanksi nonkustodial, atau denda, atau pidana pengawasan dan denda bersama –sama.

Dari uraian diatas, penerapan sanksi (pidana/tindakan) berdasarkan UU No.3/1997 belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak

pidana.. Menurut penulis salah satu penyebabnya, tidak adanya pedoman pemidanaan yang termatum dalam pasalnya secara jelas dan rinci sehingga putusan kurang menjamin perlindungan anak dan rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Ad 4. Sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana

Menurut Pasal 22 UU No.3/1997 terhadap anak pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda atau
 - d. pidana pengawasan,
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat juga diberikan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Ad.a. Pidana penjara.

Pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Dapat dikatakan bahwa dewasa ini pidana merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia. Yang dikenal adalah pidana pembuangan, pidana badan atau dicambuk, pidana mati, dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati, atau seumur hidup, atau pidana penjara dua puluh tahun). Jadi umumnya pidana penjara maksimum 15 tahun⁷²

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal diatur dalam Pasal 26 UU No.3/1997 sebagai berikut:

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
- (2) Apabila anak melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada anak nakal tersebut paling lama 10 tahun.
- (3) Apabila anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 tahun yang diancam dengan hukuman mati, atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

⁷² Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal 36-37.

24 ayat (1) huruf b, yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

- (4) Apabila anak yang melakukan tindak pidana yang belum mencapai umur 12 tahun, yang tidak diancam dengan hukuman mati atau dengan pidana seumur hidup, anak itu dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Selain pidana penjara, dalam Pasal 29 UU No.3/1997, ditentukan hukuman bersyarat dengan syarat –syarat sebagai berikut:

- (1) Hukuman pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat – syarat umum dan syarat-syarat khusus.
- (3) Syarat umum adalah bahwa anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa hukuman bersyarat.
- (4) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa hukuman bersyarat dengan syarat khusus lebih pendek dari pada masa hukuman bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa hukuman bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 tahun.

- (7) Dalam hal dijatuhkan pidana bersyarat, selama masa hukuman bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak yang menjalani hukuman bersyarat dibimbing di BAPAS dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.
- (9) Selama anak berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan formal.

Ad.b. Pidana kurungan.

Pasal 27 UU No.3/1997 menyebutkan ancaman pidana kurungan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a) paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum kurungan bagi orang dewasa.

Ketentuan pidana kurungan bagi orang dewasa diatur dalam Pasal 18 KUHP sebagai berikut:

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 1 tahun.
- (2) Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambah karena ada gabungan kejahatan karena berulang atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP.
- (3) Pidana kurungan itu tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Dalam penjelasan Pasal 18 KUHP menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan hukuman kurungan ialah hukuman yang dijalankan di dalam penjara, sama halnya dengan hukuman penjara. Perbedaannya ialah:

- Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara di daerah mana saja. Sedangkan hukuman kurungan dijalankan di daerah mana si terdakwa bertempat tinggal waktu hukuman dijatuhkan. Tetapi tidak semua hukuman kurungan yang tidak dapat dijalankan di luar daerah.
- Orang yang dipidana hukuman kurungan, pekerjaannya lebih ringan dari pada orang yang dipidana hukuman penjara.
- Orang yang dipidana dengan hukuman kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri (hak pistole), sedang orang yang dipidana dengan hukuman penjara tidak mempunyai hak itu. Masa terpendek secara umum bagi hukuman kurungan adalah satu hari dan selama-lamanya (maksimum umum) adalah satu tahun. Masa satu tahun ini dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal:
 - gabungan tindak pidana;
 - berulang kali melakukan tindak pidana;
 - ketentuan pasal 52 KUHP.

Menurut Vos yang dikutip oleh Andi Hamzah, hukuman kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan:

Pertama ialah *custodia honesta*., untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus seperti: perkelaian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP) .

Kedua sebagai *custodia simplex* suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, pidana kurungan menjadi pidana pokok. Pada delik dolus, tidak ada pidana kurungan kecuali diatur tentang unsur sengaja dan culpa seperti Pasal 483 KUHP dan Pasal 484 KUHP.

Sebaliknya ada pidana penjara pada delik culpa, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan culpa, contoh Pasal 293 KUHP.

Menurut Vos, ada pidana pada delik culpa karena sulitnya menarik garis antara sengaja dan culpa.

Berdasarkan Pasal 27 UU No.3/1997 hukuman kurungan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana, berlaku ketentuan hukuman kurungan bagi orang dewasa sebagaimana telah diuraikan diatas, dan lamanya $\frac{1}{2}$ dari pidana kurungan bagi orang dewasa.

Contoh yang tepat adanya pidana kurungan pada delik culpa yaitu Pasal 359 KUHP.

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibandingkan dengan pidana penjara dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP bahwa, berat ringannya pidana ditentukan urut-urutannya dalam Pasal 10 KUHP⁷³

Ad c. Pidana denda.

Pidana denda yang dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 28 UU No.3/1997 sebagai berikut:

⁷³ Andi Hamzah, Op.Cit, hal 48-49.

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) ternyata tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja lama latihan kerja tidak boleh lebih dari 4 jam sehari, serta tidak dilakukan pada malam hari.

Dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No.3/1997, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana denda terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

Penjelasan Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda, sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya. Besarnya ancaman pidana denda bagi orang dewasa diatur dalam Pasal 30 KUHP sebagai berikut:

- (1) Besarnya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Bilamana dijatuhkan denda dan dendanya tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang – kurangnya satu hari, dan selama – lamanya enam bulan. .
- (4) Lamanya itu dalam putusan hakim, ditentukan sebagai berikut: Jika denda itu lebih dari setengah rupiah atau kurang, gantinya satu hari, dan jika lebih dari itu,

tiap- tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari. Demikian juga bagi sisanya yang tak cukup setengah rupiah lagi.

(5) Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama lamanya delapan bulan, hal maksimum denda dapat ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena berulang membuat kejahatan, karena ketentuan Pasal 52 KUHP.

(6) Lamanya pidana kurungan sekali-kali tidak lebih dari delapan bulan.

Dalam penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa, ketentuan minimum umum bagi denda adalah 25 sen, sedang ketentuan maksimumnya tidak ada. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.18 Tahun 1960, ditentukan bahwa mulai 14 April 1960 tiap-tiap jumlah hukuman denda dilipatkan 15 kali.

Menurut Andi Hamzah lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara khusus dengan putusan hakim, minimum umum 1 hari, dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat 3) KUHP. Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal terjadi gabungan, residive, dan delik jabatan (Pasal 51 dan 52) bis (Pasal 30 ayat 5) KUHP.

Jangka waktu pembayaran denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dapat diperpanjang menjadi dua tahun.

Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara

Menurut Jonkers, ada kecenderungan bahwa hukum pidana modern memandang lebih baik dan lebih cepat mencapai tujuan pidana, jika denda dijatuhkan terhadap terpidana, dari pada pidana hilang kemerdekaan yang singkat. Di negara Belanda dengan Stbld 1925 hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan

pidana denda secara umum terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan, baik bagi delik yang diancam dengan pidana denda maupun yang tidak ada ancaman dendanya. Maksimum umumnya 10.000 gulden. atau 2000 gulden bagi delik yang diancam pidana penjara tidak lebih dari tiga bulan penjara atau pidana kurungan, 20.000 gulden atau 4000 gulden bagi delik yang diancam lebih dari 3 bulan penjara. Bagi delik-delik yang dipandang berat dipandang dari kepentingan umum, dimana diancam pidana penjara, maka ketentuan ini tidak berlaku.

Ketentuan tentang kemungkinan penjatuhan pidana denda sebagai pengganti kurungan di negari Belanda sudah berkali-kali diperbaharui terakhir Tahun 1954.⁷⁴

Jonkers yang dikutip oleh Andi Hamzah sangat menyayangkan ketentuan semacam ini tidak ditiru oleh pembuat undang-undang di Indonesia. Sedangkan keadaan di Indonesia sesuai dengan ketentuan tersebut. Begitu pula ketentuan yang menyatakan bahwa denda diambil dari harta kekayaan terpidana juga tidak ditiru di Indonesia.

Pengaturan denda dalam KUHP Belanda telah diubah menjadi sistem kategori, artinya tidak lagi disebut jumlah maksimum denda secara nominal di dalam setiap pasal tetapi hanya disebut kategorinya.

Di dalam buku I diadakan daftar kategori denda. Ada enam kategori denda yaitu:

Kategori I, maksimum lima ratus gulden

Kategori II, maksimum lima ribu gulden.

⁷⁴ Andi Hamzah, Op.Cit, hal, 55-56.

Kategori III, maksimum sepuluh ribu gulden.

Kategori IV, maksimum dua puluh lima ribu gulden.

Kategori V, maksimum lima ratus ribu gulden.

Kategori VI, maksimum satu juta gulden.⁷⁵

Kalau sistem kategori ini diterapkan juga di Indonesia maka ada baiknya, terutama dalam hal inflasi uang. Jadi jika dirasa pada suatu saat denda sudah terlalu rendah karena merosotnya nilai uang, maka cukup satu pasal saja yang dirubah, yaitu pasal yang memuat daftar kategori.

Penulis sependapat dengan gagasan tersebut. Dalam perkembangannya telah mengacu pada sistem kategori denda.

Dalam Konsep KUHP Baru Tahun 2000 yang mengatur pidana denda telah tercantum sistem kategori. Pidana Denda diatur dalam Pasal 75 sebagai berikut:

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, maka denda paling sedikit Rp.15.000,-
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 - a. kategori I Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. kategori II. Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. kategori III Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - d. kategori IV Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. kategori V Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - f. kategori VI Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

⁷⁵ Andi Hamzah, Op.Cit, hal 56-57.

- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
- a. pidana penjara paling lama 7 tahun sampai dengan 15 tahun adalah denda kategori V.
 - b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun adalah kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 adalah kategori IV.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ad d. Pidana pengawasan

Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Penjelasan Pasal 30 UU No.3/1997).

Ketentuan Pidana Pengawasan diatur dalam Pasal 30 UU No.3/1997, sebagai berikut:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.
- (2) Apabila terhadap anak yang melakukan tindak pidana dijatuhkan pidana pengawasan maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan.

- (2) Apabila terhadap anak yang melakukan tindak pidana dijatuhkan pidana pengawasan maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana pengawasan merupakan pidana pokok yang baru. Dalam KUHP tidak ada. Pidana pokok ini baru ada dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Bila dicermati penjelasan Pasal 30 tersebut diatas, nampak ada kemiripan dengan pidana bersyarat dalam Pasal 29 ayat (7) yang menyebutkan :Selama menjalani pidana bersyarat jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan.agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan. Jadi disini belum jelas keterkaitan antara pidana bersyarat (Pasal 29) dengan pidana pengawasan (Pasal 30).

Menurut Konsep KUHP Baru Tahun 2000, pidana pengawasan pada hakikatnya adalah pidana yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu ketentuan mengenai pidana bersyarat di dalam Konsep KUHP ditiadakan.

Masalah lain adalah, tidak adanya pedoman penjatuhan pidana pengawasan dalam UU No.3/1997. Untuk pidana bersyarat ada pedoman di dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun. Jadi jelas pidana bersyarat dikaitkan dengan pidana pokok penjara.

Ketentuan demikian tidak ada dalam Pasal 30, sehingga dapat dipermasalahkan apakah pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap semua tindak pidana yang dilakukan anak, atau hanya untuk tindak pidana tertentu?

Dalam Konsep KUHP menentukan bahwa pidana pengawasan (yang dapat dijatuhkan terhadap anak maupun orang dewasa) hanya dapat dikenakan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau kurang⁷⁶

Dalam masalah ini Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa: sebagai pidana pokok untuk anak, seyogyanya pidana pengawasan dapat dijatuhkan untuk semua jenis tindak pidana apapun yang dilakukan anak.⁷⁷

Penulis sependapat dengan Barda Nawawi Arief, bahwa pidana pengawasan seyogyanya dijatuhkan pada semua jenis tindak pidana, mengingat tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anak, apabila dijatuhi pidana pengawasan si terhukum tidak ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan, melainkan di tempat kediaman anak. Dengan demikian pengawasan dapat dilakukan jaksa ditempat kediaman si terhukum dan pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan pembinaan juga ditempat tinggal si terhukum, tanpa memandang si terhukum melakukan tindak pidana tertentu.

Selain hukuman pokok, anak pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: perampasan barang-barang tertentu, dan atau ganti rugi (Pasal 23 ayat 3)

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) ditentukan bahwa, pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan, merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua .

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, dalam Romli Atmasasmita, Penyunting, Op.Cit, hal, 78-79.

⁷⁷ Ibid.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal diatur dalam Pasal 24 UU No.3/1997 sebagai berikut:

- a. Dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh. Anak nakal dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina dilingkungan orang tua/wali/orang tua asuh (pasal 24 ayat 1 huruf a).
- b. Diserahkan kepada Negara. Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan dilingkungan keluarga (pasal 24 ayat 1 huruf b), maka anak itu diserahkan kepada negara dan disebut sebagai Anak Negara. Untuk itu anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak. Dengan memberikan ketrampilan perbengkelan, tata rias dan sebagainya. Setelah selesai menjalani tindakan, anak itu diharapkan mampu hidup mandiri.
- c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya (pasal 24 ayat 1 huruf c).

Apabila anak diserahkan pada organisasi sosial kemasyarakatan, maka harus diperhatikan agama dari anak yang bersangkutan .

Disamping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, dapat juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UU No.3/1997. Teguran berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini agar anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan dijatuhi tindakan. Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban anak untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan, umpama: seminggu sekali, sebulan sekali, atau pada hari-hari tertentu.⁷⁸

Jangka waktu anak nakal yang diserahkan pada negara (anak negara) untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 tahun (Pasal 1 ayat 8 huruf b. UU No.12/1995).

Mencermati ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 UU No.3/1997, hal mana pidana penjara dicantumkan pada urutan pertama, nampaknya pidana penjara masih menjadi menjadi pilihan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini terungkap dalam hasil penelitian penulis di PN Semarang khususnya tahun 2002, dari 23 perkara pidana anak yang ditangani hakim anak di PN Semarang 22 perkara pidana anak dijatuhi hukuman pidana penjara, 1 perkara pidana anak dijatuhi hukuman menjadi anak negara. Hal ini dapat juga terjadi karena jenis pidana dalam UU No.3/1997 tidak banyak memberikan alternatif hukuman. Menurut penulis

⁷⁸ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 28-29,

penjatuhan pidana yang nampak mencerminkan perlindungan anak adalah pidana pengawasan. Dalam pidana pengawasan anak tidak dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan anak. Jadi anak tidak dipisahkan dari orang tuanya. Pembinaan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS, dan pengawasan terhadap perilaku sehari-hari anak di tempat tinggal anak dilakukan oleh Jaksa. Dalam penerapannya pidana jenis ini, dalam penelitian penulis di PN Semarang tidak nampak diterapkan.

Dari ketentuan UU No.3/1997 yang telah penulis uraikan diatas yang berkisar tentang masalah batas umur pertanggung jawaban pidana anak; masalah tujuan pemidanan; masalah pedoman pemidanan; masalah sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana, menurut penulis dari segi undang-undangnya masih terdapat hal-hal yang kurang mencerminkan perlindungan anak. Agar dalam penerapannya saksi sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak, perlu penyempurnaan/penambahan ketentuan UU No.3/1997 terutama masalah-masalah yang terkait dengan penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana telah penulis uraikan diatas.

A.2.2. Pelindungan anak pelaku tindak pidana dalam UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam UU No.23/2002 diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Bila dikaitkan dengan UU No3/1997, yaitu undang-undang yang mengatur perlindungan anak dalam proses peradilan, undang-undang No.23/2002 sangat menunjang perlindungan anak dalam proses peradilan, yaitu mewujudkan kesejahteraan anak. Dalam menjatuhkan sanksi harus melindungi anak baik fisik mental ataupun sosial.

Pasal 16 ayat (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Ketentuan ini bila dikaitkan dengan UU No.3/1997 menunjang perlindungan anak dalam proses peradilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan antara lain: Hubungan orang tua dengan anak dalam kehidupan manusia merupakan hubungan yang hakiki. Maka dalam menangani masalah anak harus senantiasa diusahakan agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya. Kalau terpaksa harus dipisahkan tetaplah dipertimbangkan pemisahan itu semata-mata demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara sehat dan wajar. Namun perlu diingat bahwa putusan pengadilan anak sangat tergantung pada peran hakim.

Dari hasil penelitian penulis di PN Semarang khususnya tahun 2002, dari perkara pidana anak sejumlah 23 perkara, 22 perkara pidana diputus oleh hakim dengan pidana penjara, 1 perkara diputus menjadi anak negara. Nampaknya pidana penjara masih menjadi pilihan utama dari putusan hakim. Dari fakta tersebut, menurut penulis dengan UU No.23/2002 yang menunjang UU N.3/1997, dalam penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Pasal 17 ayat (1).menyatakan: Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan sidang pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Ketentuan ini menunjang perlindungan anak dalam setiap tahap pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU No.3/1997. Dalam pelaksanaannya beberapa ketentuan dalam UU No.23/2002 belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini terungkap dari hasil penelitian penulis di POLTABES Semarang maupun di PN Semarang. yaitu :

1. Penahanan anak tidak dipisahkan dengan tahanan dewasa.
2. Dalam setiap tahap pemeriksaan anak pelaku tindak pidana tidak diberi bantuan hukum.

Sehubungan belum terlaksana sepenuhnya ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23/2002) dalam proses peradilan, maka kebijakan penerapan saksi belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Pasal 64 ayat (2) mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi;

Dari beberapa ketentuan pelaksanaan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam pasal 64 ayat (2) tersebut diatas, dalam proses peradilan anak, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan Hal ini terungkap dari hasil penelitian penulis di POLTABES Semarang dan PN. Semarang antara lain:

- 1.. Di Semarang belum ada rumah tahanan khusus untuk anak pelaku tindak pidana.
- 2. Tahanan anak tidak dipisahkan dari tahanan dewasa;
- 3. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapat bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan.
- 4. Dalam menjatuhkan putusan, hakim lebih menitik beratkan faktor yuridis formal. Kurang mempertimbangkan karakteristik khusus dari anak. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, harus diupayakan sejauh mungkin meghindarkan putusan pidana penjara. Numun hal ini kurang menjadi pertimbangan hakim. Hal ini nampak dari hasil penelitian di PN Semarang dari perkara pidana tahun 2002 sejumlah 23 perkara, 22 perkara diputus dengan pidana penjara, dan 1 perkara dijatuhi pidana menjadi anak negara.

Dengan belum terlaksana sepenuhnya perlindungan anak dalam UU No.23/2002 dalam proses peradilan anak, maka penerapan saksi terhadap anak pelaku tindak pidana belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

A.2.3. Perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam UU No.4/1979 tentang Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Pengertian kesejahteraan anak dalam UU No.4/1979 adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial. Sedang yang dimaksud dengan usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. (Pasal 1 UU No.4/1979).

Ketentuan Pasal 1 sub a UU No.4/1979 sangat erat kaitannya dengan peradilan anak, yaitu mewujudkan kesejahteraan anak, dengan konsekwensi bahwa proses peradilan anak harus menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

Dalam UU No.4/1979, hak anak diatur dalam Pasal 2 yaitu:

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan sosialnya
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.

- Anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Atas dasar Pasal 2 ayat (1) UU No.4/1979, proses peradilan anak harus memberikan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh berkembang dengan wajar.

Pasal 6 Ayat (1) menyatakan: Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Atas dasar Pasal 6 Ayat 1), proses peradilan anak harus memberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Dari beberapa ketentuan dalam pasal UU No.4/1979 yang disebutkan diatas, nampak ketentuan tersebut menunjang proses peradilan anak dalam mewujudkan tujuan peradilan anak yaitu mewujudkan kesejahteraan anak

B. Kebijakan Sanksi (Pidana/Tindakan) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Masa Mendatang

B.1. Keterkaitan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana dalam UU No.3/1997, Konsep KUHP Tahun 2000 dan Dokumen Internasional

Dalam bahasan ini akan diuraikan ketentuan-ketentuan dalam Konsep KUHP tahun 2000 tentang sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana,

apakah lebih jelas dan rinci bila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peradilan Anak, yang saat ini berlaku, dan ketentuan- ketentuan Dokumen Internasional.

Kajian masalah ini berkisar pada beberapa aspek yaitu: batasan umur pertanggungjawaban pidana anak; Tujuan pemidanaan Anak; Pedoman pemidanaan anak; Jenis sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana.. Dengan mengetahui keunggulan dan kelemahan peraturan-peraturan tersebut, dimasa mendatang dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyempurnaan UU No.3/1997, agar penerapan sanksi dapat sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Kebijakan legislatif, menetapkan atau merumuskan sanksi apa yang dapat dikenakan, merupakan kebijakan yang paling strategis dalam pelaksanaan tahap berikutnya yaitu kebijakan penerapan pidana...Oleh karena itu agar kebijakan penerapan sanksi mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana, perlu sekali melakukan pembaharuan hukum dengan penyempurnaan dan penambahan terhadap UU No.3/1997 yang masih terdapat kelemahan-kelemahan..

B.1.1. Ditinjau dari aspek batasan umur pertanggungjawaban pidana.

.Batasan umur pertanggungjawaban pidana. Dalam Konsep KUHP Baru Tahun 2000 Pasal 106 menyebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai 12 tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Dalam UU No.3/1997, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas tahun).

Bila dibandingkan dengan Konsep KUHP Tahun 2000, nampaknya UU No.3/1997 menentukan umur pertanggung jawaban pidana lebih rendah. . Dalam UU No.3/1997, anak yang berumur 8 tahun yang melakukan tindak pidana sudah dapat dikenakan tindakan.

Hal ini perlu mendapat perhatian, menurut ahli psikologi Charlote Buhler, dilihat dari Psikologi Anak, pada umur 8 tahun anak memasuki masa sosialisasi anak. Pada saat itu anak mulai memasuki masyarakat luas. Anak mulai mengenal dunia sekitar secara obyektif. Dan ia mulai belajar arti prestasi, pekerjaan dan tugas-tugas dan kewajiban⁷⁹.

Menurut Loebby Loqman anak yang berumur 8 tahun dalam melakukan perbuatan, anak tersebut belum memahami/mengerti akibat dari perbuatannya, sehingga belum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁸⁰

Dengan demikian sudah sewajarnya Konsep KUHP Tahun 2000, menentukan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan perbuatan kejahatan/pelanggaran, tidak dapat dipertanggungjawabkan. baik pidana/tindakan.

Nampaknya kurang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana, apabila anak berumur 8 tahun sudah dikenakan pertanggungjawaban pidana, walaupun hanya dikenakan tindakan, karena pada umur 8 tahun anak pelaku tindak pidana belum menyadari akibat dari perbuatannya.

⁷⁹ Kartini Kartono, Psikologi Perkembangan, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 29.

⁸⁰ Loebby Loqman, Bahan Kuliah Peradilan Anak S2 Undip Tahun 2000.

Dalam *Beijing Rule*, penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana dipengaruhi budaya, latar belakang sejarah dan budaya masyarakat. Pendekatan modern ditetapkan pertanggungjawaban pidana atas diri anak diukur dari keserasian moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan anti sosial anak.

Dimasa yang akan datang, perlunya perubahan ketentuan dalam pasal 4 UU No.3/1997 yang menentukan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun, menjadi 12 tahun.. Sedang batas sampai umur 18 tahun dan belum pernah kawin sudah sewajarnya. Penulis lebih condong ketentuan dalam Konsep KUHP tahun 2000 dalam menentukan batas umur minimal 12 tahun untuk dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

B.1.2. Ditinjau dari aspek pedoman pemidanaan

Dalam UU No.3/1997, tidak tercantum secara jelas dan rinci pedoman pemidanaan, yaitu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak, khususnya dalam hal penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan.

Pedoman atau prinsip penjatuhan pidana terhadap anak inilah yang sangat penting untuk dikemukakan dalam ketentuan tentang “peradilan” karena masalah inilah yang menjadi pusat perhatian dari dokumen- dokumen Internasional⁸¹

Dalam Konsep KUHP Tahun 2000 merumuskan pedoman pemidanaan anak dalam Pasal 107 sebagai berikut:

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 demi kepentingan. masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda

⁸¹ Barda Nawawi Arief, dalam Romli Atmasasmita, Punyunting, Op.Cit, hal 76.

setelah mendengar pertimbangan Penyidik, Penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan.

(2) Penundaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan syarat :

- a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan atau:
- b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Bertolak dari pasal 107 diatas mengandung maksud bahwa penundaan pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan pasal 51 sebagai berikut:

(1) Dalam pembedaan wajib dipertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban atau;
- j. apakah tindak pidana dilakukan berencana..

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar

pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan .

Berdasarkan pasal 107 Konsep Tahun 2000 Jo Pasal 51 Konsep dapat disimpulkan bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 51 disertai syarat:

- a. anak tidak akan melakukan tindak pidana, dan atau;
- b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan petugas kemasyarakatan, demi hari depan anak perkaranya tidak perlu sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi perkaranya diselesaikan dengan perdamaian antara pelaku dan korban dengan mengingat ketentuan undang-undang.

Dalam UU No.3/1997 pedoman pemidanaan tidak diatur secara jelas dan rinci, Hanya nampak dalam penjelasan Pasal 25 sebagai berikut: Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu, hakim wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tua, wali, orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan. Demikian pula hakim wajib memperhatikan pembimbing kemasyarakatan.

Bila dibandingkan dengan pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 Konsep KUHP Tahun 2000, penjelasan pasal 25 UU. No.3/1997 yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana/tindakan, ketentuan dalam Konsep KUHP tahun 2000 nampak lebih jelas, lengkap dan lebih rinci

mencantumkan faktor-faktor yang sangat penting dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana., sehingga penerapan sanksi lebih mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana, karena ada pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.. Disamping itu, putusan akan lebih menjamin asas persamaan mendapatkan keadilan.

Dengan dasar pertimbangan yang tercantum dalam penjelasan pasal 25 UU No.3/1997, menurut penulis putusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak. Masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, yang sesuai karakteristik khusus anak yang harus dilindungi baik jasmani, rohani maupun sosial, untuk mewujudkan putusan hakim berlandaskan yuridis, sosiologis dan filosofis sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan tujuan peradilan anak yaitu mewujudkan kesejahteraan anak.

Bila dikaitkan dengan ketentuan SMR-JJ, Rule 17.1, maka pengambilan keputusan oleh pejabat/termasuk hakim, harus berpedoman pada prinsip-prinsip:

- a. Reaksi yang diambil/termasuk sanksi pidana harus diseimbangkan dengan keadaan-keadaan dan bobot/keseriusan tindak pidana, tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak dan kebutuhan masyarakat.
- b. Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi hanya dikenakan setelah pertimbangan hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan, kecuali melakukan perbuatan serius (termasuk kekerasan terhadap orang lain) atau terus menerus melakukan perbuatan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat.

- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Kemudian dalam Rule 17.4, tersimpul pedoman kekuasaan hakim yaitu: Pejabat yang berwenang (hakim) mempunyai kekuasaan untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses peradilan. Berdasarkan Rule 17.4 diatas, maka bisa saja hakim tidak menjatuhkan sanksi apapun (pidana/tindakan)⁸²

Demikian pula Rule 19.1 menyatakan bahwa: Penempatan anak dalam lembaga, harus selalu ditetapkan sebagai usaha terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan.

Dalam Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules for the Protection of juvenile Diproved of their Liberty*, antara lain dinyatakan:

1. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.
2. Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa. Ketentuan ini mirip dengan Rule 19.1 SMR-JJ.⁸³

Mengingat dalam UU No.3/1997 pedoman pemidanaan tidak diatur, dimasa mendatang perlu kiranya penambahan ketentuan dalam UU No.3/1997 yang mengatur pedoman pemidanaan anak. Sebagai bahan penyempurnaan dapat diambilkan pedoman pemidanaan yang diatur dalam Konsep KUHP Tahun 2000, serta mempertimbangkan ketentuan dalam dokumen Internasional yang berkaitan dengan pedoman pemidanaan anak.

⁸² Ibid, hal 76-77.

⁸³ Ibid, hal 77-78.

Dengan diaturnya pedoman pemidanaan dalam UU Pengadilan Anak, selain penting bagi hakim sebagai pedoman untuk menjatuhkan sanksi, juga lebih memantapkan perlindungan anak dalam proses peradilan, yang bertolak dari ide dasar dan karakteristik yang berbeda dengan proses peradilan orang dewasa.⁸⁴

B.1.3. Ditinjau dari aspek jenis sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana dalam UU No.3/1997 disebutkan dalam Pasal 22 yaitu :Terhadap anak pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan pidana atau tindakan.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 23 adalah pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 23 ayat1).

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana ialah:

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda;
- d. pidana pengawasan. (Pasal 23 ayat 2).

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana ialah:

- a. perampasan barang-barang tertentu; dan atau;
 - b. pembayaran ganti rugi. (Pasal 23 ayat 3).
- Lamanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana $\frac{1}{2}$ kali ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa.
 - Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana paling lama 10 tahun.

⁸⁴ Ibid.

- Pidana kurungan bagi anak pelaku tindak pidana $\frac{1}{2}$ kali lamanya ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
- Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana $\frac{1}{2}$ kali ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada Negara atau mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
- d. Tindakan sebagaimana ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Melihat jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana, pidana penjara diletakkan dalam urutan teratas, dalam penerapannya pun pidana penjara menjadi hukuman yang utama dari putusan hakim. Hal ini terungkap dari hasil penelitian penulis di PN Semarang, dari 23 perkara pidana anak yang ditangani hakim anak tahun 2002, 22 perkara dijatuhi hukuman pidana penjara; 1 perkara dijatuhi pidana menjadi anak negara. Hal ini dapat juga terjadi karena rumusan undang-undangnya yang kurang lengkap.

Bila dibandingkan dengan rumusan sanksi (pidana/tindakan) dalam UU No.3/1997 dengan Konsep KUHP Tahun 2000, nampak Konsep KUHP tahun 2000 lebih jelas lebih rinci, dan lebih lengkap.

Dalam Konsep KUHP Tahun 2000, pidana anak diatur dalam pasal 109 sebagai berikut:

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana nominal :
 2. pidana peringatan; atau
 3. pidana teguran keras;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. . pidana pembinaan diluar lembaga;
 2. Pidana kerja sosial;
 3. Pidana pengawasan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan :
 1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. pidana penjara;
 3. pidana tutupan.

(2) Pidana tambahan.;

- a. Perampasan barang-barang tertentu; dan atau tagihan;
- b. Pembayaran ganti kerugian;
- c. Pemenuhan kewajiban Adat.

Sedang tindakan, diatur dalam Pasal 122 Konsep sebagai berikut:

(1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 sebagai berikut:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang;

(2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok adalah:

- a. pengembalian pada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. penyerahan kepada Pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. keharusan mengikuti latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. pencabutan surat izin mengemudi;
- f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. perbaikan akibat tindak pidana
- h. rehabilitasi; dan atau
- i. perawatan di lembaga.

Mencermati begitu rincinya pengaturan jenis-jenis pidana pokok yang diatur Konsep KUHP Tahun 2000, menurut penulis hakim akan lebih leluasa memilih alternatif-alternatif sanksi (pidana/tindakan) yang paling tepat dikenakan pada anak pelaku tindak pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan anak yaitu mewujudkan kesejahteraan anak. Dalam menjatuhkan putusan sejauh mungkin dihindari penjatuhan pidana penjara.

Dimasa mendatang, perlu kiranya pengkajian ulang ketentuan pasal- pasal yang mengatur jenis-jenis pidana/tindakan dalam UU No.3/1997, dengan melakukan penyempurnaan/penambahan pasal-pasal yang mengatur jenis- jenis pidana/tindakan dalam UU No.3/1997, dengan mengacu pada jenis-jenis pidana/tindakan yang diatur dalam Konsep KUHP Tahun 2000 tentang hal-hal yang belum diatur dalam UU No.3/1997.

Dalam *Beijing rules* Jenis sanksi (pidana/tindakan) tidak diatur secara terperinci dalam *Rule 18.1* diatur macam- macam tindakan untuk menghindari bantuan anki yang bersifat institusionalisasi sebagai berikut:

- (a) tindakan/perintah perawatan, bimbingan, pengawasan.
- (b) pengawasan (*probation*)
- (c) perintah kerja social.
- (d) Pidana yang bersifat uang dan ganti rugi
- (e) Perawatan lanjutan dan tindakan perawatan lainnya
- (f) Tindakan/perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok konseling dan kegiatan lain yang serupa
- (g) Tindakan/perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu dengan tinggal di dalam lingkungan masyarakat yang bersifat mendidik
- (h) Tindakan-tindakan lainnya yang relevan .

Selanjutnya dala *Rule 18.2* ditegaskan: Tidak seorang anakpun dapat dilepaskan dari pengawasan orang tua baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali hal itu diperlukan mengingat keadaan kasus si anak. Dijelaskan dalam *Commertary*

pentingnya peranan keluarga dalam masalah pembinaan anak, oleh karena itu pemisahan anak dari orang tuanya harus merupakan tindakan terakhir.⁸⁵

Dari jenis-jenis tindakan dalam *Rule* 18.1 dan *Rule* 18.2 nampak saksi terhadap anak pelaku tindak pidana lebih diarahkan dalam bentuk tindakan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menghindari sejauh mungkin bentuk sanksi yang bersifat institusionalisasi.. Dalam pembinaan anak, peranan keluarga amat penting. Oleh karena itu pemisahan anak dari orang tuanya harus merupakan tindakan terakhir.

Penulis sangat sependapat bahwa, penjatuhan sanksi yang berbentuk tindakan lebih mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi berbentuk pidana sejauh mungkin dihindarkan.

Atas dasar hal tersebut diatas, di masa mendatang perlu kirannya dalam penyempurnaan/penambahan peaturan UU No. 3/1997 memperhatikan pula jenis-jenis tindakan yang diatur dalam *Beijing Rule*.

B.2. Keterkaitannya Dengan KUHP Negara Asing (Belanda, Perancis, Yunani, Inggris, Yugoslavia).

B.2.1. KUHP Belanda.

Peradilan Anak di Belanda diatur dalam Wv S Nederland, UU No.7-7-1994 Stb 1994 No.528, dalam Bab VIII Wv S (ketentuan-ketentuan khusus untuk anak).

Dalam Pasal 77 a, tersimpul pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menyebutkan: Tak seorangpun dapat dituntut pidana karena perbuatannya, karena seorang itu pada saat mulainya perbuatan berumur 12 tahun. Jadi seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dituntut apabila umurnya 12 tahun.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief Op. Cit, hal 126-127.

Sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 77 h, sebagai berikut:

1. Pidana pokok terdiri dari:
 - a. untuk kejahatan, dijatuhi pidana kurungan anak atau denda
 - b. untuk pelanggaran, dijatuhi pidana denda.
2. Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat (1) yaitu:
 - a. kerja sosial/pelayanan masyarakat;
 - b. pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana:
 - c. mengikuti proyek pelatihan.
3. Pidana tambahan:
 - a. perampasan;
 - b. pencabutan SIM;
4. Tindakan-tindakan terdiri dari:
 - a. penempatan pada lembaga;
 - b. penyitaan
 - c. perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum;
 - d. kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian.

Pidana /tindakan tambahan diatur dalam Pasal 77 i

1. Di samping pidana dan tindakan yang diterapkan dalam Pasal 77g dan 77h, perampasan barang dapat dikenakan sebagai “pidana tambahan” atau sebagai

“tindakan tambahan”, Barang dan hak yang menjadi subyek perampasan, dapat dirampas apabila delik dilakukan oleh orang yang mencapai 18 tahun.

2. Perampasan dapat juga dikenakan sebagai pengganti pidana tindakan.
3. Barang-barang yang tidak disita, yang menjadi obyek perampasan, dihitung /ditaksir oleh hakim dengan jumlah uang.
4. Barang yang tidak disita itu harus diserahkan atau dibayar harga taksirnya.
5. Apabila barang yang tidak disita tidak diserahkan atau harga taksirannya tidak dibayar, Pasal 24 b dapat diterapkan dengan ketentuan bahwa peningkatan (denda) ayat 1 pasal itu, dan jumlah minimum yang dinaikkan menurut ayat 2, tidak boleh lebih dari 5 gulden.

Pasal 77 m. tentang pengenaan sanksi alternatif:

1. Hakim hanya dapat mengenakan sanksi alternatif atas permintaan terdakwa. Pemohon harus menyatakan bentuk sanksi alternatif yang diminta.
 2. Lamanya kerja sosial atau lamanya kerja untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, tidak boleh lebih dari 200 jam.
 3. Jangka waktu bekerja yang dilaksanakan tidak boleh lebih dari 6 bulan apabila pekerjaan itu terdiri dari pekerjaan yang tidak lebih dari 100 jam dan tidak lebih dari 1 tahun di dalam “kasus-kasus yang tersisa”. Akan tetapi PU dalam menerapkan Pasal 77o ayat 2, dapat memperpanjang jangka waktu ini.
 4. Lamanya proyek pelatihan tidak lebih dari 200 jam.
 5. Jangka waktu berlangsungnya proyek pelatihan harus tidak lebih dari 6 bulan.
- Dengan PP dapat diatur mengenai sifat dan muatan/substansi pelatihan, dan cara bagaimana pelaksanaan ketentuan ini akan diuji/dievaluasi. Jumlah jam seperti

diatur dalam ayat 4 dapat dipisahkan dari sifat proyek pelatihan yang diwajibkan/diperlukan

6. Apabila lebih dari satu alternatif sanksi yang dikenakan, jumlah keseluruhan jam harus tidak lebih dari 240 jam.
7. Apabila suatu sanksi alternatif dikenakan, Pasal 27 ayat 1 dan 4 dapat diterapkan.⁸⁶

Bila dicermati, jenis sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana dalam WvS lebih lengkap bila dibandingkan dengan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam UU No.3/1997 yang sekarang berlaku. Disamping itu, pidananya nampak lebih ringan. Pidana pokok dari anak pelaku tindak pidana, adalah hukuman kurungan dan hukuman denda. Jadi hukuman pokok dalam Wv.S Belanda tidak ada hukuman penjara. namun hanya dapat dijatuhkan hukuman kurungan atau denda. Selain itu, hukuman kurunganpun dapat diganti dengan satu atau lebih sanksi alternatif yaitu:

- a. Kerja sosial (pelayanan masyarakat);
- b. Pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sedang dalam UU No.3/1997, pidana penjara diletakkan dalam urutan teratas dari ketentuan Pasal 23 UU No.3/1997 yang mengatur tentang pidana anak. Di dalam pelaksanaannya pidana penjara merupakan hukuman yang utama dijatuhkan oleh hakim Atas dasar ketentuan sanksi dalam UU No.3/1997, penerapan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana, belum

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 21-28.

sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.. Dalam upaya melindungi anak pelaku tindak pidana, sejauh mungkin penjatuhan pidana penjara dihindarkan. Pidana penjara dijatuhkan sebagai upaya terakhir.

Atas dasar hal tersebut diatas, dimasa mendatang dalam penyempurnaan UU No.3 tahun 1997, perlu mempertimbangkan jenis sanksi pidana dalam Wv S yang nampak lebih mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Bila dilihat dari batas umur pertanggungjawaban pidana, dalam WvS mengatur batas umur minimal pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun sejalan dengan Konsep KUHP Tahun 2000. Sedang dalam UU No.3/1997 batas umur minimal anak pelaku tindak pidana dapat diajukan ke sidang anak adalah 8 tahun. Menurut penulis, ketentuan ini kurang mencerminkan perlindungan anak, sebab pada umur tersebut, anak pelaku tindak pidana secara psikologis belum menyadari akibat dari perbuatannya.

Atas dasar hal tersebut, dimasa mendatang ketentuan batas umur pertanggungjawaban pidana dalam WvS perlu dipertimbangkan dalam penyempurnaan UU No.3/1997.

B.2.2. KUHP Perancis

Peradilan khusus untuk anak-anak (*Les Juridictioris pour enfants*), merupakan lembaga peradilan khusus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang sangat besar bagi kepentingan anak. Anak adalah harapan bangsa dan negara untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu perkembangan mereka baik mental, pendidikan maupun fisik harus dilindungi.

Dalam menyidangkan perkara-perkara kejahatan yang terlanjur dilakukan anak –anak remaja, keputusan yang diambil ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tuanya;
- b. Menempatkan di bawah pengawasan orang lain/pengawas/wali;
- c. Bebas dalam pengawasan (*Liberty servile*) ;
- d. Dengan hukuman yang sama jenisnya dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap orang dewasa atau dengan mengurangi separuh dari hukuman yang dijatuhkan terhadap orang dewasa.

Dalam pelaksanaan hukuman, sanksi yang dijatuhkan hakim bervariasi. Ini merupakan perluasan dari jenis hukuman. Variasi mana yang akan diambil antara lain sebagai berikut:

1. Perluasan Hukuman atau Sanksi

- a. Hukuman percobaan yang dibedakan menjadi:
 - hukuman percobaan biasa;
 - hukuman percobaan dengan ditentukan jangka waktunya.
- b. Hukuman sebagai pengganti hukuman penjara. Hukuman pengganti ini hanya berfungsi sebagai pengganti saja dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Hubungan tersebut dapat berupa :
 - larangan untuk melakukan kegiatan- kegiatan tertentu;
 - mencabut SIM;
 - dan lain-lain.
- c. Dispensasi;

Dispensasi juga merupakan variasi di mana terdakwa tidak dijatuhi hukuman sama sekali, hanya diberi dispensasi. Hal ini terjadi dalam hal tindak pidana yang tidak terlalu berat, dengan pertimbangan jika dijatuhi hukuman kemungkinan akan lebih parah akibatnya.

2. Keringanan hukuman atau sanksi. Keringanan hukuman atau sanksi ini juga bervariasi, tetapi yang perlu diketengahkan adalah semi Liberte (separuh bebas). Rasionalnya agar putusan pengadilan jangan sampai merusak kehidupan dan masa depan seseorang. Khususnya bagi remaja pelajar, atau mahasiswa yang mempunyai kewajiban tertentu (sekolah atau bekerja). Hukuman separuh bebas ini artinya, kepada terdakwa dengan pertimbangan tertentu diperkenankan untuk bekerja, pergi sekolah dan lain-lain seperti biasa pada siang hari, dan kembali ke penjara pada malam hari. Rumah penjara yang khusus untuk semi Liberte ini pun tidak sama dengan rumah penjara biasa.
3. Peranan hakim dalam pemeriksaan pendahuluan.

Dalam hal pelaku kejahatan anak yang dibawah 18 tahun, maka jaksa wajib memberi surat tuntutan agar hakim mengadakan pemeriksaan pendahuluan atasnya. Permintaan agar supaya hakim mengadakan pemeriksaan pendahuluan atas kejahatan anak tidak hanya datang dari pihak kejaksaan saja, melainkan bisa terjadi dari pihak lain, saksi, korban, wali pengawas ataupun dari anak sendiri kalau sudah mampu. Setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan telah selesai, maka ada dua kemungkinan:

1. Kalau hakim berpendapat bahwa terhadap tersangka cukup alasan untuk melakukan penuntutan maka hakim mengirim meneruskan berkas tadi kepada pengadilan untuk disidangkan.
2. Apabila hakim berpendapat bahwa tersangka tidak cukup alasan untuk melakukan penuntutan, maka hakim menyatakan dalam sebuah ordonansi dan membebaskan tersangka.

Hal ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan hakim bahwa seorang hakim adalah bebas dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dia bebas segala pengaruh, maupun tindakan dari pihak manapun termasuk dari atasan.⁸⁷

Dari uraian diatas nampaknya sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam KUHP Perancis lebih ringan dibandingkan dengan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia. Sanksi dalam KUHP Perancis lebih difokuskan pada pengenaan tindakan. Sehingga nampak lebih mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana, Pengenaan pidana sama dengan ketentuan dalam UU No.3/1997 yaitu 1/2 dari hukuman orang dewasa. Namun sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam KUHP Perancis dalam pelaksanaan bervariasi, sehingga nampaknya pengenaan pidana penjara sejauh mungkin dapat dihindarkan.

Atas dasar hal tersebut diatas dalam penyempurnaan UU No.3/1997, ketentuan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam KUHP Perancis perlu dipertimbangkan.

⁸⁷ Agung Wahyono, Siti Rahayu, Tinjauan Tentang peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal 54-59.

B.2.3. KUHP Yunani

Aturan sanksi (pidana/tindakan) untuk anak dan remaja diatur dalam Bab VIII Bagian Umum KUHP sebagai berikut:

Pelaku muda yang berusia antara 7- 18 tahun dihukum dengan “tindakan reformatif” (Psl 122 PC); “tindakan perawatan” (Psl 123 PC) dan pelaku yang berusia 13 tahun atau lebih dikenakan “penahanan dalam panti asuhan” (Psl 127 PC). Pertanggungjawaban pidana dimulai pada usia 13 tahun.

Tindakan – tindakan reformatif berupa:

- Teguran keras/cercaan bagi remaja (atau anak-anak).
- Penempatan remaja (atau anak) pada perwakilan pengawasan/yayasan perlindungan anak, lembaga perlindungan, atau panitia khusus untuk remaja;
- Penempatan remaja pada negara bagian/kotapraja/lingkungan masyarakat yang tepat, atau lembaga pendidikan privat;

Tindakan perawatan dapat diperintahkan atas nasehat spesialis medis di mana remaja memerlukan perhatian khusus karena menderita gangguan kejiwaan, buta, bisu tuli, epilepsi dan sebagainya.

Untuk anak berusia 7-12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan reformatif atau perawatan. Untuk yang berusia 13-17 tahun Pengadilan hanya boleh memerintahkan tindakan reformatif atau perawatan, atau apabila dipandang perlu, penahanan dalam panti asukan.

Pidana dapat dikenakan pada dewasa muda yang pada saat delik dilakukan berusia antara 18-21 tahun, dapat dikenakan pidana kustodial seperti orang dewasa, tetapi mendapat pengurangan.

Bentuk tindakan non-institusional merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan peradilan di Yunani. Dari jenis tindakan reformatif, sanksi”tegoran keras/cercaan” yang paling sering dikenakan. Jumlah tindakan institusional, sangat sedikit dijatuhkan.

Dari uraian diatas nampaknya KUHP Yunani dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, lebih cenderung mengenakan tindakan. Dalam KUHP Yunani diatur jenis-jenis tindakan yang begitu beragam, sehingga hakim dengan leluasa memilih tindakan yang paling tepat dikenakan pada anak Sanksi kustodial tidak dikenakan terhadap anak.

Mencermati hal ini menurut penulis, sanksi (pidana/tindakan) untuk anak dalam KUHP Yunani, lebih mencerminkan perlindungan anak dibandingkan dengan sanksi (pidana/tindakan) dalam UU No. 3/1997. Atas dasar hal tersebut diatas, dalam penyempurnaan UU No.3/1997 dimasa mendatang, kiranya dapat dipertimbangkan ketentuan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam KUHP Yunani.

B.2.4. KUHP Inggris

Putusan pengadilan Juvenile dapat berupa:

1. Pembebasan sama sekali disertai dengan petuah-petuah/nasehat-nasehat.
2. Pembebasan dengan perjanjian.
3. Tindakan probation.
4. Tindakan ganti rugi.
5. Pidana Denda.
6. Pengiriman ke rumah sakit jiwa.
7. Pidana pencabutan kebebasan.

Hakikat dari jenis-jenis putusan Juvenile tidak berbeda dengan Pengadilan Magistrate di atas. Hal ini apabila hakim beranggapan bahwa anak tidak perlu dikenakan pidana tetapi jika dilakukan oleh orang dewasa dapat dikenakan pidana penjara. Anak dikenakan pidana penjara bilamana sah terbukti tidak dapat dimasukkan tindakan-tindakan yang lebih ringan seperti dikirim/dimasukkan Sproproved School, dimasukkan Detention Centre atau Borstal.

Di Inggris orang sangat memperhatikan pemberantasan kejahatan anak-anak. Memasukkan narapidana anak ke penjara lokal tidak memberi kemungkinan yang baik. Oleh karena itu narapidana anak di bawah usia 21 tahun harus dipisahkan dari golongan-golongan yang lain apapun tindak pidana yang diperbuat. Pemisahan ini sedemikian rupa sehingga narapidana anak tidak mungkin bertemu dengan yang dewasa.

Jenis putusan tindakan lainnya dari pengadilan Juvenile ialah: Tindakan terhadap orang tua yang anaknya hingga melakukan pelanggaran, dengan memerintahkan orang tuanya agar mendidik anaknya hingga berkelakuan baik.

Melalui putusan Hakim, anak yang melanggar hukum dapat diserahkan kepada pemerintah, jika pemerintah demi kepentingan anak menganggap tidak perlu lagi memelihara, tanpa melalui pengadilan menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tuanya. Putusan hakim harus selalu mengingat perlakuan yang dialami oleh pelanggar hukum tersebut khususnya pelanggar usia muda. Dengan demikian maksud dari putusan pidana atau tindakan harus menekankan pada manfaat serta mengingat masa depan anak. Perlakuan terhadap pelanggar muda ini meliputi aktifitas dari peradilan anak. Sejak penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan

setelah ada putusan hakim, perlakuan terhadap anak sedapat mungkin memperhatikan kepentingan anak baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, Disini faktor-faktor psikologis sangat besar pengaruhnya.⁸⁸

Dari uraian tersebut nampak bahwa Pengadilan Juvenile di Inggris dalam menjatuhkan saksi terhadap anak pelaku tindak pidana, lebih mengutamakan mengenakan tindakan Pengadilan Juvenile di Inggris lebih jelas dan lebih rinci mengatur tentang jenis-jenis tindakan, dibandingkan dengan ketentuan pidana/tindakan dalam UU No.3/1997. Dengan demikian hakim lebih leluasa dan lebih mudah untuk memilih tindakan apa yang paling tepat yang bermanfaat bagi anak serta lebih menjamin kepastian hukum. Disamping itu, hakim berwenang untuk memberikan putusan/tindakan terhadap orang tua pelanggar. Hal ini sejalan dengan gagasan Barda Nawawi Arief tentang perlunya pertanggungjawaban individual terhadap anak dikembangkan menjadi pertanggung jawaban struktural Di Inggris. sanksi pidana dikenakan kepada anak, apabila sudah tidak dapat lagi dikenakan tindakan-tindakan yang lebih ringan.

Atas dasar hal tersebut diatas dalam penyempurnaan UU No.3/1997 dimasa mendatang, ketentuan saksi (pidana/tindakan) dalam KUHP Inggris perlu dipertimbangkan.

B.2.5. KUHP Yugoslavia

Mengenai sanksi (pidana/tindakan) untuk anak diatur dalam Bab VI mulai Pasal 64 s/d Pasal 79 L. yang berjudul "*Provisions Relating To Educative and Penal For Minor*"

⁸⁸ Agung Wahyono.Ny.Siti Rahayu., Op.Cit, hal 67-70.

Menurut Pasal 64, terhadap anak yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan-ketentuan dalam Bab VI ini dan ketentuan lain dari KUHP, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Bab VI ini.

Dalam bab ini dibedakan antara “anak”, “anak junior” dan “anak senior”, dengan pembatasan sebagai berikut:

- “anak”, yaitu di bawah usia 14 tahun.(Pasal 65:1).
- “anak Junior”, yaitu antara usia 14 tahun - 16 tahun.(Pasal.66:1)
- “anak senior”, yaitu antara 16 -18 tahun (Pasal 66: 2)

Seseorang anak yang pada saat delik dilakukan belum berusia 14 tahun tidak dapat dipidana maupun tindakan edukatif atau tindakan keamanan (Pasal 65 ayat 1) Terhadap anak itu, badan perwalian anak mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya (Pasal 65 ayat 2). Dengan demikian batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP Yugoslavia adalah 14 tahun

Seseorang anak yang pada saat delik dilakukan telah berusia 14 tahun tetapi belum mencapai usia 16 tahun (anak junior) tidak dapat dipidana tetapi dapat dikenakan tindakan edukatif.(Pasal 66 ayat 1)

Seseorang anak yang pada saat melakukan delik telah berusia 16 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (anak senior) dapat dikenakan tindakan edukatif sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP, dapat dipidana akan tetapi, pidana yang dapat dijatuhkan hanya pidana khusus untuk anak (Pasal 66 ayat 2).

Menurut Pasal 66 (3) tindakan keamanan dapat dikenakan kepada anak junior dan anak senior. Tindakan keamanan dan penjara anak tidak akan membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 37.

Pengenaan tindakan edukatif

Tujuan tindakan-tindakan edukatif menurut pasal 68, untuk melindungi pendidikan, perbaikan dan pengembangan para pelaku anak dengan memperluas perlindungan, bantuan dan pengawasan kepada mereka dan juga untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 69, jenis tindakan edukatif adalah:

1. Tindakan Disiplin:
 - a. Teguran keras/pencercaan.
 - b. Dimasukkan ke Pusat Pendisiplinan/Penertiban Anak;
2. Tindakan Pengawasan Intensif.
 - a. Pengawasan orang tua/wali.
 - b. Pengawasan dalam keluarga lain, atau badan-badan perwalian.
3. Tindakan Institusional ;
 - a. Penempatan di lembaga pendidikan;
 - b. Penempatan pada panti asuhan pendidikan korektif;
 - c. Penempatan pada panti asuhan anak cacat.

Pedoman Pemilihan tindakan diatur dalam Pasal 70 sebagai berikut:

- (1) Dalam memilih tindakan edukatif, pengadilan harus mempertimbangkan usia anak, tingkat perkembangan kejiwaan, kecenderungan-kecenderungannya, motif melakukan delik, pendidikan masa lalu, lingkungan dan kondisi dia tinggal, tingkat keseriusan delik yang dilakukan, apakah pernah mendapat tindakan edukatif atau pidana sebelumnya, dan keadaan-keadaan lain yang relevan..

- (2) Tindakan pendisiplinan harus diberikan kepada anak yang kepadanya tidak perlu dilakukan tindakan edukatif dan reformatif yang diperluas, dan khususnya apabila ia telah melakukan delik karena kurang ajaran.
- (3) Tindakan pengawasan intensif harus diberikan apabila perlu dilakukan tindakan-tindakan edukatif yang lebih diperluas terhadap anak itu, dan pengasingan/pemisahan dia dari lingkungannya tidak diperlukan.
- (4) Tindakan institusional diberikan kepada anak apabila perlu dilakukan tindakan edukatif dan reformatif yang diperlukan dan perlu dilakukan pengasingan/pemisahan dia dari lingkungannya.

Teguran Keras diatur dalam Pasal 71 sebagai berikut:

- (1) Teguran keras atau pencercaan diberikan apabila hal itu cukup untuk mencela/memarahi anak itu atas tindak pidana yang dilakukannya.
- (2) Dalam menjatuhkan teguran/cercaan, hakim menunjukkan kepada anak itu akan sifat berbahayanya dari perbuatannya dan memberi peringatan bahwa tindakannya lebih berat akan dikenakan kepadanya apabila melakukan tindak pidana lain.

Pusat Pendisiplinan/Penertiban Anak diatur dalam Pasal 72 sebagai berikut:

- (1) Pengadilan akan memasukkan anak ke pusat pendisiplinan apabila hal itu diperlukan untuk mempengaruhi kepribadian dan perilakunya dengan mengenakan tindakan-tindakan berjangka waktu pendek yang sesuai.
- (2) Pengadilan dapat memasukkan anak ke pusat pendisiplinan:
 - Untuk beberapa jam tertentu pada hari-hari libur dan tidak boleh lebih dari 4 hari libur berturut-turut;

- Untuk beberapa jam tertentu dalam sehari, tetapi tidak boleh lebih dari 1 bulan;
 - Untuk tinggal terus-menerus dalam beberapa hari, tetapi tidak boleh lebih dari 20 hari;
- (3) Dalam menjatuhkan tindakan ini harus diperhatikan dengan teliti bahwa anak itu tidak ketinggalan/meninggalkan pendidikan formalnya sebagai akibat dari tindakan ini.
- (4) Dalam pusat pendisiplinan, anak itu dikerahkan pada pekerjaan yang bermanfaat sesuai dengan usianya.
- (5) Dalam keputusan memasukkan anak ke pusat kedisiplinan, pengadilan dapat menetapkan bahwa setelah selesai menjalani tindakan ini, anak itu ditempatkan di bawah pengawasan intensif dari badan perwalian

Pengawasan Intensif oleh Orang Tua/Wali diatur dalam Pasal 73 sebagai berikut:

- Pengawasan intensif diberikan apabila orang tua/wali telah gagal melakukan pengawasan terhadap anak itu.
- Dalam putusan, pengadilan memberi instruksi dan kewajiban-kewajiban tertentu kepada orang tua/wali.

Pengawasan intensif oleh keluarga lain diatur dalam Pasal 74 sebagai berikut:

- Tindakan ini diambil apabila orang tua/wali tidak dalam posisi untuk melakukan pengawasan kepadanya atau tidak dapat diharapkan dari mereka untuk melakukan pengawasan.

Pengawasan intensif oleh badan perwalian diatur dalam Pasal 75 sebagai berikut:

- Tindakan ini diambil apabila orang tua/wali tidak dalam posisi untuk melakukam pengawasan intensif kepada anak itu dan tidak terpenuhi syarat-syarat untuk menyerahkan anak itu ke keluarga lain.

Penempatan ke lembaga pendidikan diatur dalam Pasal 76 sebagai berikut:

- Tindakan ini diberikan kepada anak yang memerlukan pengawasan tetap oleh orang para pendidik terlatih di dalam lembaga pendidikan untuk anak.
- Lamanya tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 3 tahun.

Penempatan ke panti asuhan untuk pendidikan/perbaikan diatur dalam Pasal 77 sebagai berikut:

- Tindakan ini diberikan dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan dan sifat delik yang dilakukan dan apakah sebelumnya telah dijatuhi tindakan edukatif dan pidana.
- Lamanya tindakan ini tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun.

Penempatan pada lembaga untuk anak cacat diatur dalam Pasal 78 sebagai berikut:

Tindakan ini diberikan kepada anak cacat (anak tuli, buta, tuli dan bisu dan lain-lain) sebagai pengganti tindakan keamanan yang berupa penempatan ke lembaga penahanan/pemeliharaan dan perawatan medis yang disebut dalam Pasal 61.

Pemidanaan anak senior (antara usia 16-18 tahun)

Menurut Pasal 79 C, pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada anak senior yang mampu bertanggung jawab apabila ia melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun penjara.

Menurut pasal 79 D, pidana penjara anak tidak boleh kurang dari 1 tahun dan tidak boleh lebih dari 10 tahun dan pelaksanaan pidana ini tidak dapat ditunda berdasarkan Pasal 48.

Pidana penjara anak dilaksanakan dalam lembaga khusus (disebut "*penal-corrective home*" atau "lembaga koreksi penal") dimana mereka dapat berada di situ sampai mencapai usia 23 tahun.

Menurut Pasal 79 L, seorang dewasa hanya dapat diadili untuk delik yang dilakukannya sewaktu/sebagai anak junior apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan apabila pidana lebih dari 5 tahun penjara diancamkan untuk delik yang dilakukannya.

Menurut Pasal 79 J, seorang dewasa yang diadili untuk delik yang dilakukan sewaktu/sebagai anak senior dapat dikenakan tindakan penempatan pada lembaga koreksi-edukatif dikenakan pidana penjara Anak.⁸⁹

Dari uraian diatas sanksi pidana/tindakan untuk anak dalam KUHP Yugoslavia, nampak lebih jelas dan lebih rinci bila dibandingkan dengan sanksi dalam UU No.3/1997. Sanksi terhadap anak dalam KUHP Yugoslavia lebih difokuskan pada pengenaan tindakan, Jenis tindakan sangat beragam. Disamping itu, diatur pula tentang tujuan dan pedoman pemilihan tindakan, sehingga hakim lebih leluasa memilih tindakan apa yang paling tepat untuk dikenakan pada kepada anak serta lebih menjamin kepastian hukum.

Anak yang belum mencapai usia 14 tahun tidak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, Anak yang berusia 16 tahun -18 tahun dapat dipidana, tetapi

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, Op.cit hal, 99-105.

pidana khusus untuk anak. Namun demikian, anak berusia 16 tahun -18 tahun masih dapat dikenakan tindakan. Dengan demikian nampaknya sanksi pidana/tindakan untuk anak dalam KUHP Yugoslavia lebih mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No.3/1997. Atas dasar hal tersebut diatas, dalam penyempurnaan UU No.3/1997 dimasa mendatang perlu mempertimbangkan jenis-jenis sanksi (pidana/tindakan) dalam KUHP Yugoslavia..

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dari bab I sampai dengan Bab III dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana, walaupun di Indonesia telah mempunyai Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang ditunjang dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam penerapannya ketentuan tersebut belum terlaksanakan sepenuhnya. Dari hasil penelitian terungkap antara lain:
 - Belum ada rumah tahanan khusus untuk anak.
 - Tahanan anak tidak dipisahkan dengan tahanan dewasa.
 - Anak yang berkonflik dengan hukum tidak diberikan bantuan hukum.
 - Penjatuhan sanksi (pidana/tindakan) semata-mata menitik beratkan faktor yuridis formal, kurang mempertimbangkan karakteristik khusus dari anak, yang membedakan dengan orang dewasa.
 - Pidana penjara masih menjadi pilihan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. .
2. Kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) dimasa mendatang yang mencerminkan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, perlunya

pembaharuan hukum pidana anak dengan penyempurnaan/penambahan peraturan dalam UU No.3/1997, khususnya yang berkaitan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana, pedoman pemidanaan dan jenis-jenis sanksi. Penambahan/penyempurnaan dengan mengacu pada konsep KUHP Tahun 2000, yang nampak lebih jelas, lengkap, rinci dalam rumusan pasalnya, serta mempertimbangkan dokumen Internasional dan KUHP negara-negara asing (Belanda, Perancis, Yunani, Inggris, Yugoslavia) yang berkaitan dengan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana.

B. SARAN

Agar kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga yang berwenang perlu sekali menyelenggarakan program peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya hakim yang bertugas menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum pidana, karena anak memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan pelanggar dewasa.
2. Kepada Lembaga yang berwenang hendaknya seoptimal mungkin mengupayakan terealisirnya sarana maupun prasaranya yang belum terealisir dalam rangka perlindungan anak antara lain:
 - a. Membentuk rumah tahanan khusus bagi anak, agar tahanan anak dipisahkan dengan tahanan dewasa.

- b. Mengupayakan seoptimal mungkin anak-anak yang berkonflik dengan hukum didampingi pembela. Bagi mereka yang miskin diupayakan mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.
- 3. Kepada Lembaga yang berwenang perlu peninjauan kembali UU No.3/1997, dengan penyempurnaan/penambahan pasal-pasal nya khususnya yang berkaitan dengan sanksi (pidana/tindakan) antara lain:
 - a. Penambahan pasal dalam UU No.3/1997 yang memuat pedoman pemidanaan termasuk tindakan secara jelas dan rinci. Pedoman pemidanaan sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.
 - b. Perubahan batas umur pertanggungjawaban pidana anak dalam UU No.3/1997, dari batas umur minimal 8 tahun dapat diajukan ke sidang anak menjadi 12 tahun.
 - c. Penyempurnaan/penambahan jenis-jenis sanksi (pidana/tindakan) untuk anak dalam UU No.3/1997.

Penyempurnaan/penambahan hal-hal tersebut diatas dengan mengacu pada Konsep KUHP Tahun 2000 serta mempertimbangkan dokumen Internasional dan KUHP negara-negara asing (Belanda, Perancis, Yunani, Inggris, Yugoslavia).

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Edisi pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Abidin, Zamhari. *Pengertian dan Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Affandi, Wahyu. *Berbagai Masalah Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Ahadian Ridwan, Indra, *Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1991.
- Apeldoorn, Van, LJ, *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kesepuluh*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1968.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Bonger, WA. *Pengantar Tentang Kriminologi*, diperbaharui oleh TH. Kempe, terjemahan Koesnoen, Penerbit Bersama PT, Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- , *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- , *Kriminologi Penyunting Widati Wulandari*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997.
- , *Penyunting Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Affandi, Wahyu. *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Daradjat Zakiah, *Kesehatan Mental*, Cetakan 16, CV. Haji Massagung, Jakarta, 1990.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention*, Alumni, Bandung, 1976..
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang, 1990.
- , *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Fan/Har, *Sepatutnya Anak-Anak Dapat Remisi Khusus*, Harian Kompas, 7 Agustus 2001.
- Fer/Rst, *Kejahatan Oleh Remaja Meningkat, Pelajar Rampas Sepeda Motor dan Barang-Barang Penumpang Bus*, Harian Kompas, 19 Juni 2000.
- Gautama Candra, Hanif Suranto, *Penyunting Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Cetakan Kedua, Penerbit LSPD, Jakarta, 2001.
- Gosita Arief, *Perlindungan Tunas Harapan Bangsa Tanggung Jawab Bersama*, Kata Sambutan dan Pengarahan Seminar Perlindungan Anak Pra Juwana Pusat di Jakarta, Tanggal 30 Mei – 4 Juni 1997.
- , *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Gunarso Singgih, Ny & Singgih Gunarso, *Psikologi Remaja*, Cetakan ketujuh, Gunung Mulia, Jakarta, 1985.
- Hadi Suprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tersbar Di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

-----, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Hartono, Sunarjati, *Adakah Rule of Law Itu*, Alumni, Bandung, 1976. .

-----, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1991.

Hassan Wadong, Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.

Hurwitz, Stephan, *Kriminologi*, Saduran Ny. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Indroharto (Et Al), *Kapita Selekta Hukum Mengenang Almarhum Prof. Oemar Senoadji*, Editor, Elrich, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Joni, Muhamad, Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Johkers, JE, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta. 1987.

Kartono; Kartini. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Cetakan ke IV, Mandar Maju, Bandung 1990.

-----, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Cetakan ke III, Rajawali Press, Jakarta, 1992.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV Tahun 1999 tentang GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004) Beserta Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Artaloka, Surabaya, 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasannya, Usaha Baru, Surabaya, 1981.

Kusumah, Mulyana, W. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.

- Kusumah, Mulyana, W. (ed), *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Cetakan I, Diterbitkan Yayasan LBH Indonesia Bekerjasama dengan CV. Rajawali, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Lamintang PAF, dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Dosen Koordinator Dalam Mata Kuliah Hukum Pidana I Fakultas Hukum Universitas Katolik Prahyanan*, Cetakan kedua, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Lubis, Mulya T. Penyunting, *Hak Azasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia Isu dan Tindakan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Meliana, (El.al) *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan ke X*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1978.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia Dimasa Mendatang*, Semarang, Pidato Guru Besar Undip, 1990.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- , *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- , *Bunga Rmapai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1993.
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 1996.
- Mulyono, Eugenia Liliawati, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*, Harvindo, Jakarta, 1998.

- Mul, 27 Pelajar Bawa Senjata diamankan, *Harian Kompas*, 14 Februari 2000.
- MSH, Kawanan Pelajar Menodong Penumpang Bus, *Harian Kompas*, 21 Februari 2000.
- MSH, Puluhan Pelajar Merampok Penumpang KRL, *Harian Kompas*, 29 Mei 2000.
- MSH, Selesai EBTANAS Siswa SLTP Tewas Dalam Tawuran, *Harian Kompas*, 2 Juni 2000.
- Noach, W.H.E. Dilengkapi oleh Grat Van Den Heuvel, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Diterjemahkan oleh Sahetapy, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- , *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prakoso, Djoko, *Eksistensi Jaksa Ditengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Purbocaroko, Purnadi, dan H. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, Alumni Bandung, 1981.
- Purniati, *Perlindungan Anak Harus Direalisasikan Dengan Undang-Undang*, *Harian Kompas*, 2 Maret 2000.
- Putro Mulyo, *Pendekatan Kualitatif Dalam Aplikasi Lapangan*, Disampaikan Pada Pelatihan Metologi Penelitian Ilmu Sosial, Diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 14-15 Mei 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1982.
- , *Pembangunan Hukum yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional, Masalah-Masalah Hukum (5-6)*, FH UNDIP, Semarang, Desember, 1982.
- , *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Reksodiputro, Mardjono, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat*, BPHN-UNAIR, 1980.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sadli, Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Sahetapi Y.E, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.

-----, *Kejahatan Kekerasan, Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.

-----, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung, 1984.

Saleh, Roeslan. *Mencari Asas-Asas Hukum Yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan Bahan Up Grading Pengajar Hukum Pidana Jilid 2*, Sub Konsorsium Ilmu Hukum, Jakarta, 1971.

-----, *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

-----, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

-----, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

-----, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, 1981.

-----, *Pemikiran-Pemikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

-----, *Mengadili Sebagai Pergaulan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Saleh, Wantjik. K, *Pelengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

-----, *Seminar Hukum Nasional (1963-1979)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Cetakan ke 3, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Seno Adji, Oemar, *Hukum, Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980.

-----, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.

- , *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Dimasa yang Akan Datang*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1981. .
- Setia Tunggal, Hadi, *Undang-Undang Pengadilan Anak (UURI No.3 Tahun 1997 tanggal 3 Januari 1997)*. Penerbit Harvarindo, Jakarta, 1997.
- Shanty Deliana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sholeh Soeaidy Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Sidharta Arief, Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiology Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1979.
- Singarimbun, Masri Sofian (editor), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Edisi Revisi, Yogyakarta, 1987.
- Siregar Bismar, *Tentang Pemberian Pidana Kertas Kerja Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, BPHN, Departemen Kehakiman, 1980.
- , Et Al, *Hukum dan Hak Anak*, CV. Rajawali dan LBH, Jakarta, 1986.
- Soedjono .D, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung, 1984.
- , *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Soekanto, Soerjono (Et Al), *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982 .
- , *Dampak Hukum Terhadap Pola Perilaku Manusia, Masalah-Masalah Hukum (5-6)*, FH UNDIP Semarang, Desember 1982.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983.
- *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.
- , *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1988.

- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- , Purbo Caroko, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Soekito, Wiratmo, Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- , *Lembaran Hukum dan Masyarakat, Mazhab-Mazhab Ilmu Hukum, Ilmu Hukum dan Beberapa Perspektif Terhadap Hukum, Masalah-Masalah Hukum No.4 Tahun 1990*.
- , *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan diucapkan Pada Upacara Peresmian Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 6 Desember 1990.
- , Irma Setyowati, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Subekti, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*, Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, FH UNDIP, 1975.
- , *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM FH UNDIP, 1976.
- , *Tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-FH UNDIP, Semarang, 1980.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, BABINKUMNAS, Jakarta, 1982.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Indonesia 1981.

Sumardjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, Jawa Tengah.